

PEMANGSA NURANI
POLITIK

ESAI-ESAI TENTANG KEGELISAHAN DAN PROBLEMATIKA UMAT

H. Hermanto Harun, Lc, MHI, Ph.D

Pengantar:

Ust. Prof. H. Abdul Somad, Lc, MA, Ph.D
Visiting Profesor Universiti Islam Syarif Ali Brunei Darussalam



PEMANGSA NURANI POLITIK
Esai-Esai Tentang Kegelisahan dan Problematika Umat

Penulis : H. Hermanto Harun, Lc, MHI, Ph.D

ISBN :

Copyright © Oktober 2020

Ukuran: 14.8 cm X 21 cm; Hal: viii + 178

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Pertama kali diterbitkan di Indonesia dalam Bahasa Indonesia oleh **Literasi Nusantara**. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penata Isi : Moh. Faizal Arifin

Desainer Sampul : Ahmad Ariyanto

Cetakan I, Oktober 2020

Diterbitkan pertama kali oleh **Literasi Nusantara**

Perum Paradiso Kav. A1 Junrejo - Batu

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Didistribusikan oleh CV. Literasi Nusantara Abadi

Jl. Sumedang No. 319, Cepokomulyo, Kepanjen, Malang. 65163

Telp : +6282233992061

Email: redaksiliterasinusantara@gmail.com

*Tulisan ini saya persembahkan kepada
mereka yang menisakan keimanan dalam Qalbunya,
sekaligus juga menggunakan akalinya untuk senantiasa berfikir
serta merenungi dan mencari kebenaran.*

TESTIMONI

Buku karya Dr. Hermanto Harun ini memaparkan secara ilmiah, tegas dan jujur tentang kegelisahan umat terhadap segala persoalan yang melanda penduduk bumi. Saya sangat mengenal Dr. Hermanto, karya-karya dan tulisannya biasanya sangat bernuansa akademis. Tapi kali ini, dalam buku Pemangsa Nurani Politik, beliau meracik dan meramu tulisannya memadukan dua unsur; Akademis dibalut dengan narasi kekinian. Buku ini menjadi saksi dan penyambung lidah yang mewakili aspirasi umat tentang segala kegelisahannya. Dalam bukunya kali ini, Dr. Herman tidak berbasa-basi, pejabat publik harus membaca ini. Ia bertanya, sekaligus mengkritisi berbagai kebijakan. Tentu dengan maksud dan harapan agar bangsa ini terus menjadi lebih baik.

H. M. Fadhil Rahmi, Lc, M. SP (Anggota DPD RI)

Setelah membaca buku karya Dr. Hermanto Harun ini, sungguh sangat terbuka lebar cara pandang kita terhadap masalah-masalah yang di hadapi sekarang ini, bagaimana memahami betul tentang ISIS, bagaimana harusnya ulama dan umara, siapakah ulama itu? dan masih banyak lagi hal yang kontemporer sangat menarik dalam buku ini. Dr. Hermanto telah mendudukkan bahwa ajaran islam itu sebagai referensi kehidupan. Bagi saya buku ini sebuah karya anak bangsa dan penulis buku ini adalah salah satu aset pemikir cendikiawan yang dimiliki islam, Dr. Hermanto telah membahas dan membuka cara pandang kita semua. Semoga buka ini bisa dibaca semua orang.

H. Bunyamin M Yapid Lc, MH (Ceo Annur Maarif Tour & Travel Makassar & Wakil ketua yayasan Universitas Narotama Surabaya)

Buku ini sangat luar biasa, di dalamnya dijelaskan dengan tegas dan sangat jelas bahwa Islam itu agama yang ramah, moderat, toleransi dan agama yang membawa kasih sayang bagi sekalian alam, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Islam anti radikalisme, Islam anti terorisme dan Islam anti sapatisme. Sungguh sangat tidak tepat menyudutkan Islam dengan segala bentuk kekerasan. Menurut saya, buku ini wajib dimiliki dan dibaca oleh seluruh masyarakat, tidak hanya orang muslim, tetapi juga non muslim.

Dr. Buya H M. Joni Musa, Lc, MA (Ketua MUI & Pengurus NU Kab Merangin-Jambi)

SAMBUTAN

Drs. H. Hasan BasriAgus, MM

(Anggota DPR RI dan Gubernur Jambi 2010-2015)

Assalamualikumwr, wb.

Sebuah karya merupakan khazanah kekayaan intelektual yang harus dijaga dan sangat patut untuk diapresiasi, apatah lagi karya yang digoreskan dari tinta pena kaum muda yang *notabene* beridentitas akademisi. Karena, karya pena mewakili dinamika zamannya, dan setiap zaman memiliki tokoh, tantangan dan problematikanya tersendiri. Bagaimanapun, potret sebuah zaman akan sangat bersinggungan dengan semua lini realitas sosial, kemudian menempa generasinya untuk menjadi "orang" di masa mendatang. Dari sini *support* pertama saya terhadap karya ini yang terangkum dalam ungkapan hikmah "*syubban al-yaum rijal al-ghad*" yang memiliki padanan ungkapan pepatah "*patah tumbuh hilang berganti, esa hilang dua terbilang*".

Semenjak menjabat sebagai Bupati Sarolangun sampai menjadi Gubernur Jambi, saya selalu memberikan motivasi kepada putra putri Jambi untuk terus menulis. Sejak ratusan tahun yang lalu, Jambi telah dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan. Sejarah mencatat, sebelum Islam masuk, salah seorang guru besar agama Budha yang bernama Atisha yang terkenal di India, Cina, Banglades pernah belajar di kompleks percandian Muaro Jambi selama 12 tahun. Setelah itu baru kembali Nalanda India. Begitu juga dengan ulama-ulama yang berasal dari Seberang Kota Jambi, mereka dikenal sebagai ulama kharismatik dan memiliki karomah diluar nalar. Keilmuan yang mereka miliki langsung didapat dari

para ulama yang ada di Timur Tengah. Seperti Mekah, Mesir dan Baghdad.

Saya sendiri, sebagai bagian dari objek tempaan zaman, pastinya tidak akan pernah abadi. Sebagai makhluk yang bersifat fana, maka proses regenerasi merupakan hal yang mutlak ada, karena kita tidak mungkin melawan *sunnah kauniyah* Tuhan yang telah digariskan kepada semua makhluk-Nya. Artinya, mempersiapkan generasi yang siap 'berlaga' di zamannya merupakan bagian dari kerja serius yang tidak boleh dianggap abai. Dan tentu, porsi terbesar dari kerja dan tanggung jawab itu berada dalam amanah para pemimpin. Dari dasar itu, secara pribadi, maka 'preface' saya ini tidak lain adalah sebuah pelaksanaan dari tanggung jawab sekaligus kebanggaan seorang "imam" terhadap kerja kreatif dan prestasi *jamaah*-nya.

Suatu yang lumrah dan laik untuk diberi penghargaan, ketika pencarian identitas 'budak' Jambi ini diwujudkan dalam karya nyata. Kita patut mengapresiasi coretan-coretan buku ini yang mencoba merangkum greget gumam, selanjutnya mempresentasikannya dalam wacana sosial keislaman. Semua itu, hemat saya, jelas bertolak dari idealisme *sense of belonging* yang mestinya selalu dipupuk oleh generasi penerus, utamanya para kaum intelektual dan akademisi. Agar, pemikiran-pemikiran idealistik itu, setidaknya dalam kontribusi minimal, dapat menjadi injeksi 'vitamin' yang menambah sensitifitas keilmuan. Hal ini penting, mengingat identitas keilmuan itu menjadi perlambangan eksistensi keberadaan dan keterbilangan para akademisi Jambi, baik dalam entitas nasional maupun dalam percaturan global.

Dari saya pribadi, selain penghargaan, juga harapan besar yang mengitari karya ini. Harapan yang lebih besar lagi adalah ketika karya 'pencarian identitas' para intelektual, khususnya penulis buku ini, dapat menularkan kegelisahan pemikirannya kepada para cendekia dan ilmuan Jambi yang lain, atau, sebaiknya dapat menjadi bagian dari rujukan dalam proses mencapai tujuan pembangunan sumber daya manusia yang lebih bermartabat. Paling tidak, kegundahan dari tulisan buku ini, hendaknya menjadi igauan yang senantiasa mengusik mimpi tidur masyarakat, pemuda, mahasiswa, pemimpin dan siapapun yang di teteskan taqdir sebagai bagian dari puak Jambi.

Akhirnya, saya ucapkan selamat kepada para penulis, dan selamat menikmati hidangan goresan-goresan buku ini, semoga karya ini merupakan potret lain dari stigma kilau Jambi yang selama ini dianggap redup. Saya yakin, walau karya ini mungkin belum dianggap kreasi berlian "budak" Jambi, tapi paling tidak, ini merupakan kemilau dari EMAS yang mulai bersinar. *Wallahu'alam.*

Wassalamualaikum wr, wb.

Drs. H. Hasan Basri Agus, MM

Pengantar

**Datuk Seri Ulama Setia Negara,
Prof. H. Abdul Somad, Lc., D.E.S.A., Ph.D
(Visiting Professor pada Universiti Islam Sultan Sharif
Ali Brunei Darussalam)**

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه ومن

والاه اما بعد

Dalam kesibukannya sebagai seorang Qadhi Qudhat (hakim agung) sekaligus mufti (ahli fatwa), ia masih sempat menulis Tuhfat al-Kiram fi Khabar al-Ahram buku tentang sejarah pyramid Mesir. Dialah al-Hafizh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi (wafat 911h).

Hari ini banyak intelektual yang terjebak pada kesibukan administratif. Ulama tenggelam dalam ritual ceramah dan tausiyah. Hingga kering dari bacaan yang bermetamorfosa menjadi tulisan bergizi untuk ummat dan generasi masa depan.

Tidak demikian halnya dengan DR. Hermanto Harun. Di tengah kesibukannya sebagai Akademisi, serta pemangku amanah sbagai Kepala (Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI UIN Sutha Jambi) , aktif juga sebagai ketua Ikadi Jambi, pimpinan pondok pesantren, tetap mengisi jadwal ceramah di masjid mencerahkan ummat. Tapi penanya tetap berjalan membahas masalah-masalah ideologi, politik, sosial, budaya, apalagi agama yang memang spesialisasinya.

Dalam satu hembusan nafasnya, ia bicara tentang budaya Melayu, hukum Islam dan politik di Mesir.

Pendidikan dasar pesantren yang mengakar, ditambah hafalan kuat di al-Azhar Mesir membuatnya menjadi bangunan yang kokoh.

Magister di UIN Sunan Ampel Surabaya, membuat pemikirannya berkembang lintas timur dan barat. Ph.D di Universiti Kebangsaan Malaysia membuat finishing bangunan pemikiran sempurna.

Tapi semua itu tetaplah berada dalam kepalanya, lalu ia tuangkan kepada ummat melalui mimbar masjid. Ia presentasikan kepada para intelektual muda di ruang-ruang seminar dan loka karya. Untuk khalayak yang haus akan bacaan berkualitas, ia torehkan pena dengan rangkaian kata bermakna. Ia telah lepas tanggung jawab di hadapan Allah untuk menyampaikan pesan dan petunjuk bagi ummat dan bangsa. Semoga kumpulan essai Tuan Haji DR Hermanto Harun yang diberi judul Pemangsa Nurani Politik ini menjadi inspirasi bagi para pemuda dan jadi amal jariyah buat beliau, amin.

Prakata

Sebuah buku tidak akan terlepas dari dinamika zaman yang mengitarinya. Dinamika itu kemudian menjelma dalam format sebuah karya yang dapat membingkai pesan kepada generasi berikutnya untuk diambil *ibrah* dan pelajaran berharga pada zamannya. *Lilkulli zaman rijal, wa likulli rijal zaman* (setiap masa ada tokohnya, dan setiap tokoh ada zamannya). Ungkapan ini menjadi sebuah keniscayaan dimana keabadian tidak akan pernah wujud bagi makhluk, namun yang mungkin tersisa di atas jalan sejarah hanya kisah yang bertutur dalam rangkuman catatan-catatan pemikiran yang ditoreh di atas kertas, untuk menjadi bukti otentik sebuah peristiwa.

Buku ini terdiri dari kumpulan esai yang menuangkan kegelisahan-kegelisahan tentang negeri dan umat. Kegelisahan itu sebagai pantulan dari *sens of belonging* yang lahir dari tanggung jawab, bahwa *ihitimam bi amril muslimin* (peduli terhadap kondisi umat) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sikap keberimanan seorang muslim. Apa yang diungkapkan melalui tulisan esai ini tentu tidaklah berupa solusi mutlak, atau sebuah upaya maksimal dalam usaha ikut berkontribusi menyelesaikan semua persoalan. Tapi, dalam usaha minimal, sebagai bukti pernah berupaya dan ikut berpartisipasi dalam mengurai problematika umat, meskipun hanya dengan cara mendemonstrasikan ide dan pendapat.

Kondisi umat serta persoalan keberagaman yang seringkali tampil dengan drama yang sangat paradok. Agama yang diturunkan sebagai *rahmatan lil alamin*, justru dalam realitas kehidupan

manusia, dan terkadang oleh umatnya sendiri justru malah dianggap sebagai biang dari masalah. Acapkali muncul pertanyaan yang sebenarnya merendahkan, mengapa justru umat yang dituntun oleh wahyu dan pernah memimpin peradaban manusia di jagad ini, kondisinya sangat tidak sepadan dengan apa yang diutarakan oleh kitab sucinya? Umat yang disebut sebagai *khaira ummah* (umat yang terbaik) oleh al-Qur'an, namun realitasnya justru menjadi umat yang terbelakang. Umat yang disebut sebagai *ummatan wasatha* (umat yang moderat), namun dalam kenyataannya acapkali tertuduh sebagai penganut ajaran radikalisme, aktrimisme dan bahkan terorisme.

Sungguh sangat banyak sekali referensi normatif serta akademis juga kenyataan sejarah yang telah mengungkapkan tentang bagaimana Islam sebagai agama menolak segala asumsi dan tuduhan negatif tadi. Namun anehnya, justru beberapa cendekia dan penguasa yang dianggap merepresentasikan umat, malah mengamini segala asumsi negatif yang memang sudah dirancang oleh golongan *out sider* untuk pembusukan Islam yang searah dengan fitrah. Adakah Islam dan muslim berjarak, sehingga kenyataan kondisi umat terlihat sebagai pentas peragaan anomali yang menggelikan. Akankah ungkapan *al-islam mahjub bi al-muslimin* (Islam akan menjadi asing bagi orang muslim) menjadi dalil terhadap kenyataan ini?

Ada segudang pertanyaan dan asumsi yang bisa dikonstruksikan dalam persoalan ini. Namun, harus diyakini bahwa Islam sebagai solusi dari semua persoalan kemanusiaan adalah sebuah keyakinan yang niscaya. Karena, hanya Islam sebagai agama (*din*) yang nama dan ajarannya yang langsung dari titah Tuhan semesta. *Al-Islam huwa al-hill*, Islam sebagai solusi akan menjadi kenyataan jika pengamalan kehidupan berdasarkan apa yang diinginkan oleh penciptanya, bukan atas dasar apa yang ditafsirkan sesuai nafsu angkara penganutnya.

Tulisan-tulisan esai yang terangkum dalam buku ini, mencoba menilik perspektif itu. Meskipun berangkat dari beberapa peristiwa keagamaan dan kebangsaan yang kemudian diurai dengan cara

pandang, perspesi dan paradigma yang merujuk kepada argument dan justifikasi pemahaman keagamaan yang penulis yakini berpijak kepada kebenaran. Walau, untuk memuaskan orang lain tentang kebenaran yang saya yakini bukanlah persoalan yang mudah. Tapi mengatakan apa yang diyakini sebagai suatu kebenaran adalah tugas mulya yang muklak dilakoni oleh setiap insan yang bertaqwa.

Akhinya, tiada kata yang layak untuk dihaturkan dalam ungkapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi atas terbitnya buku ini. Terima kasih juga kepada semua guru kami, sahabat seperjuangan angkatan Islah 98 (Alumni alAzhar Mesir 1998), semua sahabat Ikatan Alumni Darul Muttaqien (INADA) Tangerang, Khususnya ngakatan ke II (LEGIS), juga teman-teman Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Syekh Maulana Qory (IKA PPSMQ) Merangin. Terkhusus, saya ucapkan ribuan terimakasih kepada guru sekaligus sahabat saya, ust Prof, H Abdul Somad, Lc, MA, Ph.D yang telah sudi meberi pngantar buku ini.

Juga ucapan terimakasih kepada Bapak dan Emak, ayah dan ibuk, kakak-kakak, keluarga Besar Bani Harun, juga para kiyai, guru-guru, sahabat serta Istri tercinta, Erma Yunita, AM-Keb, serta Ananda Nayla Ghaita Maghfirah, Muhammad Azam al-Ghifari, Fayyad al-Izdihari, dan Nahda Eisy Maufurah. Terakhir, tentunya juga ucapan terima kasih kepada tim kalam literasi Jambi yang telah membantu proses lay out dan edit isi naskah buku ini. Berharap kepada Allah membalas semua kebaikan itu dan semoga setiap huruf yang membingkai kata yang selanjutnya menjadi kalimat dalam buku ini menjadi amal jariyah yang bisa memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin.

Lorong KS, Alam Barajo
Kota Jambi, 15 September 2020

Hermanto Harun

Daftar Isi

Testimoni	v
Sambutan	vii
Pengantar	ix
Prakata	xiii
Daftar Isi	xvii
<i>Ya khrabbaytak</i> 1	
Jejaring Melayu Serantau	5
Membangun Peradaban	10
Ikhwan Muslimin dan Tafsir Terorisme	15
Demokrasi Mesir dan Akal Sehat	19
Perang Gaza dalam Lensa Kiamat	23
Kado Kemenangan Hamas	27
KontekstualitasI Jihad	32
Ambiguistas ISIS	37
Kuda Troya Isu ISIS	42
Mamahami Islam	47
Mengukuhkan Islam Politik	49
Religiusitas PartaiPolitik	53
Menegaskan Identitas Ulama	58
Maulid di Tengah Kirisis Keteladanan	62
Kebenaran dan Kekuasaan	63
Abdi Negara <i>vis a vis</i> Abdi Kekuasaan	71
Menyoal Islam Radikal?	74
Ulama dan Umara'	78
Menguak Wacana Terorisme	82

Pembebasan Perempuan	87
Beribadah Dalam Berpolitik	91
Kerikil Parpol Islam	94
Kontekstualisasi <i>Tilawah</i> al-Qur'an	98
Pemangsa Nurani Politik	103
Perayaan <i>Valentine</i> ; Agama atau Budaya	108
Kontemplasi Keagamaan Dalam Kekuasaan	112
Mengagamakan Politik	116
Membaca Rasionalisasi Konstruksi Fatwa Ibadah Corona	121
Corona dan Posisi Keberagamaan Kita	125
Apa Setelah Isra' Mikraj?	129
Pancasila dan Pesantren Kami	133
Qurban dalam Nestapa Corona	136
Penolakan Dakwah UAS	140
Siuman Cendekiawan	144
Biografi Penulis	149

Ya khrabbeytak!

Khayalku menerawang, ketika akan berangkat mengais pengetahuan ke negeri nabi Yusuf dan Musa. Asumsiku betul-betul meleset ketika mengilustrasikan kondisi kuliah ke negeri yang sering dijuluki rakyatnya sebagai *Ummud Dunya* (ibu dunia). Akibat dari minimnya wawasanku tentang negeri Mesir waktu itu, jika kuliah di Universitas al-Azhar, maka kegiatan sehari-hari hanya rutinitas pengajian layaknya para santri di lembaga keagamaan seperti Pesantren. Pakaian kuliah ke kampus jelas selalu berjubah dan bersorban seperti kalangan agawaman yang sering tampil didepan publik.

Nyanyian musik pasti selalu irama solawat dan dan qasidahan seperti syair-syair lagu yang sering terdengar dari ujung menara surau saat perhelatan acara maulidan. Tak terlintas dalam fikiran 'kampungan' ku, bahwa kota Kairo sebagai ibu kota negara Mesir akan ada konser-konser musik ataupun tempat hiburan yang sama seperti tayangan hiburan di layar kaca di tanah air.

Ternyata asumsi dan khayalan tadi sama sekali salah. Kairo seperti Jakarta yang juga sangat metropolis, terbuka dan penuh sesak. Bahkan kelakuan masyarakat hedonis dari para artisnya juga juga tak jauh berbeda dengan banyak negara yang mengaku modern di dunia.

Ternyata, konstruksi peradaban matrealis dengan label modern itu sama saja. Bahkan, keberadaan mall, gedung menjulang langit

dan segala fasilitas untuk bermewah-bermewahan itu tersimbolkan dalam klaim sebagai negara maju dan modern. Maka tak heran, negara-negara Arab berlomba membangun gedung supertall pencakar langit seperti Burj Khalifa yang ada di Dubai yang mencapai ketinggian 829,8 M. Konon, gedung ini pun akan tereliminir rekornya oleh gedung Jeddah Tower di Saudi Arabia yang menjulang dengan tinggi 1000 M.

Apakah gedung supertall itu di bangun atas kebutuhan karena sempit nya lahan? atau sebuah kontestasi merebut julukan sebagai kota tercanggih di muka bumi? Entah lah, tapi simbol gedung-gedung itu beranjak dari sebuah mimpi untuk menggeser opini dari negeri gurun sahara menjadi modern seperti Eropa. Ungkapan inilah yang pernah diungkapkan putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman yang berkeinginan menjadikan negeri kekuasaannya sebagai Eropa di Timur Tengah.

Kota Kairo, meskipun tidak ada gedung mencakar langit, namun identitas negeri yang berperadaban tua sangatlah kentara. Negeri yang pemandangan alamnya tidak begitu indah, tetapi sungguh kaya nilai sejarah. Banyak kisah-kisah para nabi yang diungkapkan oleh kitab suci, kejadiannya terjadi di negeri seribu menara ini. Kisah nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Soleh dan bahkan kisah manusia bejad seantero pun juga terjadi disini. Kisah Fir'aun, penguasa yang mengaku tuhan, kisah Qarun seorang yang kaya raya yang angkuh dengan hartanya, semua tersimpan dalam arsip sejarah bahwa kejadian itu pernah terjadi disini.

Dari banyak kisah yang melegenda itu, rakyat Mesir seringkali jumawa, dan bahkan teman-teman kampus asal Mesir acapkali berucap, jangan sombong jika berada di negeri kami. Zayyuku katsir, ungkapan khas mereka yang berarti orang asing seperti kita itu biasa saja di negerinya. karena, kalau merasa gagah, maka mereka punya nabi Yusuf, kalau sombong karena harta maka mereka punya Qarun, dan kalau angkuh karena jabatan maka mereka punya Fir'aun.

Rakyat Mesir bertameng kepada kegagahan nabi Yusuf yang konon saking gagahnya sampai Zulaikha sang majikan begitu terkesima dengan ketampanan nabi Yusuf, hingga ketika

memandangnya, Zulaikha tak menyadari telah menyayat jemarinya yang disangka sedang memotong buah yang terhidang. Begitu juga ketika mereka bertameng kepada Qarun yang dalam kisahnya memiliki puluhan budak dengan pekerjaan khusus memikul kunci gudang hartanya mengelilingi kota untuk dipamerkan kepada khalayak. Pun begitu juga dengan Fir'aun yang tak tertandingi kekuasaannya oleh siapapun jua, sehingga merasa layak mengaku sebagai tuhan untuk disembah.

Bertameng dengan kisah legenda di atas, bahkan teman sekampus asal Mesir pernah bertanya kepadaku di awal musim kuliah. Hal fi baladak maugud utu bis wa tayran wa qitarat? Dengan bahasa ammiyah (pasar) Arabnya yang bermakna, Apa di negaramu ada bis kota, pesawat terbang dan kereta api? dengan sedikit rasa tersinggung saya menjawab asalaan saja, tidak ada!. Dengan senyumnya yang merasa di atas angin, kemudian teman tadi bertanya lagi, wa izzay tigi hina? lantas bagaimana anda bisa ke sini? nirkab khimar (kami naik keledai) jawaban saya yang ketus sekaligus meledek. Spontanitas ekspresi teman tadi berubah dengan wajahnya sedikit memerah seraya berucap, ya khrabbeytak!

Ungkapan ya khrabbeytak adalah bahasa idiom yang bermakna kekesalan dalam ungkapan serapah kemarahan yang bermakna hancurlah rumahmu. Dengan suara yang meninggi itu teman tadi tetap mudah berdamai karena sifat umum orang Mesir itu tidak pendendam. Bahkan dalam banyak kejadian, ketika mereka bertengkar dengan ucapan serapahnya bisa berdamai seketika dengan hanya ucapan orang penengah, shallu 'alan nabi. spontan mereka segera berangkuhan dan bersalaman.

Orang Mesir selalu berteriak ya mashril habib (wahai Mesir negeriku tercinta) mashri Ummud Dunya (Mesir ibu dunia) kalimat yang mereka ucapkan dengan penuh bangga dan ksantria. Bahkan lisan mereka tak ragu mengatakan birruh biddam (dengan jiwa dan raga) kepada pemimpin negerinya.

Bagaimana dengan rakyat negeri ku? Rakyat yang hidup di sepenggal tanah surga di bumi, namun menderita di tipu janji. Angin surga bertiup hanya dalam mimpi, berharap iba dari pemimpin

sendiri. Walau masih tetap jumawa dengan kepal tangan sambil tetap berteriak, merdeka! Karena saya sangat yakin, dalam denyut nadi mereka masih sama dengan teriakan orang Mesir kepada negaranya. Dan saya hanya bisa berkata: ya Khrabbeytak untukmu yang berbuat nista kepada kaum jelata. Sekali lagi, ***ya khrabbeytak!***

Jaringan Melayu Serantau

Baru-baru ini, saya mendapat kesempatan untuk dapat berkunjung ke kawasan Thailand Selatan bersama beberapa akademisi dari UIN Jambi. (IAIN) Perjalanan itu bertujuan untuk menjalin kerja sama antara Institusi Pendidikan Tinggi Islam Jambi (UIN STS) dengan beberapa perguruan tinggi di Asean, terutama yang berada di Malaysia dan Thailand. Tentu '*rihlah ilmiah*' tersebut menjadi sangat berarti, karena selain dapat bersilaturahmi, juga merasakan kehangatan emosi iman dalam kawasan rantau melayu.

Dalam kunjungan tersebut, kami sempat bersua dengan para ilmuan di CASIS UTM Malaysia, yang sangat saat itu di nahkodai oleh Prof Wan Nor Wan Daud, kemudian ke Yala, Thailand, bersua para pimpinan dan tokoh yang bernaung di lembaga pendidikan Syeikh Daud Fathani, seorang ulama terkemuka dan masyhur pada zamannya di Asean. Selanjutnya ke Prince Narathiwat University di Narathiwat, salah satu provinsi Thailand yang berada di kawasan Selatan Thailand. Juga mengunjungi beberapa tempat bersejarah, di antaranya Masjid tertua di kawasan itu.

Dalam safari keilmuan yang lumayan melelahkan itu, kesan yang berharga adalah tentang jejaring keilmuan Islam di rantau melayu sungguh sangat dinamis. Karena masuknya Islam di kawasan negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapore, Philipina dan Kamboja menjadi catatan penting dalam sejarah perkembangan Islam dunia. Kawasan

yang memiliki kemiripan etnik ini sering juga dinamakan dengan negeri melayu serantau, yang memiliki populasi penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Keberadaan Islam di kawasan serantau melayu ini menjadi catatan sejarah yang sangat berharga dan bahkan istimewa, karena nuansa dakwah dalam pengembangan keislaman di tanah melayu ini memiliki catatan yang sedikit spesifik dan bahkan spesial jika dibandingkan dengan kawasan lain di dunia.

Penyebaran dakwah Islam di kawasan melayu serantau ini bahkan menjadi justifikasi kepada dunia, bahwa Islam itu cinta damai, penuh toleran dan bisa beradaptasi dengan komunitas apapun, bahkan lintas budaya dan agama sekalipun, karena masuknya Islam ke kawasan melayu ini tidak meninggal catatan tentang agresi dan bahkan peperangan atas nama agama. Justru catatan-catatan sejarah peperangan di kawasan melayu itu terjadi sebagai akibat dari perebutan kekuasaan, motif ekonomi dan bahkan tidak jarang menyimpan legenda asmara.

Tidak ada danya catatan peperangan antara pemeluk agama, menjadi bukti betapa konsep Islam *rahmatan li al-alamin* telah membumi ke dalam realitas paham keberagaman masyarakat melayu muslim. Betapa tidak, kawasan melayu Asia Tenggara secara mayoritas yang dahulunya memeluk kepercayaan Budha dan Hindu dan kemudian berafiliasi secara konvensional kepada “Syahadat” tidak merekam jejak sejarah konfrontasi dan pertumpahan darah dengan pihak Islam. Fakta ini menjadi sedikit anomaly ketika penyebaran Islam di kawasan Arab yang diasumsikan oleh pihak Barat (orientalis) justru menggunakan cara kekerasan dan menghunus pedang. Walau hal ini, lambat laun telah dibuktikan sejarah, bahwa asumsi ini hanya sebatas propaganda dan tuduhan yang sangat rapuh secara akademis dan ilmiah.

Pembahasan sejarah Islam di dunia melayu, tentunya menjadi suatu bahasan menyeluruh yang mencakup semua negara yang terhimpun dalam Asean. Catatan sejarah itu seolah berantai yang tidak boleh mengetapkan perbincangan tentang kondisi Islam di ranah melayu yang lain. Dari itu, melihat sejarah Islam melayu tidak mungkin lengkap tanpa membahas komunitas muslim Patani

yang saat ini menjadi minoritas dari etnis Shiyam Thailand. Dari semenjak beberapa dekade, komunitas Patani menjadi kaum telah lama tersentuh oleh dakwah Islam. Bahkan, relasi Islam nusantara tidak bias lepas dari jaringan para ulama yang sejak lama menjalin hubungan dan komunikasi antara satu negara dengan Negara lainnya.

Proses komunikasi para ulama tersebut, misalnya disebut oleh hikayat Patani yang meriwayatkan kedatangan ulama dari Sumatera ke Patani seperti Sheikh Gombak dan muridnya Abd al-Mu'min dari Minangkabau, Sheikh Faqih shafi al-Din dari Pasai juga Hji Abd Rahman dari Jawa dan Faqih Abd Manan seorang Minangkabau dari negeri Kedah dan yang lainnya. Lebih jauh dari itu, sebagai akibat dari terjalannya komunikasi tadi, umat muslim Patani dibuat sadar akan adanya perkembangan dalam gagasan-gagasan Islam serta lembaga-lembaga keagamaan di bagian wilayah melayu lainnya. Hal ini yang memungkinkan para ulama tersebutmendorongdidirikannya lembaga pendidikan Islam tradisional yang dikenal di Patanisebagaipondok. Dari sini ada kesan bahwa system pondok yang dikembangkan di berbagai wilayah semenanjung melayu tersebut berasal dari Patani, dan bahkanseorang ulama tersohorasal Palembang Sumatera yaitu Abd Shamad al-Palimbani mendapat pendidikan awalnya di Patani.

Disamping hubungan dan koneksi intelektual antara berbagai ulama nusantara, ternyata mereka juga memiliki hubungan darah. Perspektif ini digambarkan bahwa adanya hubungan nasab antara Dawud al-Fatani, seorang ulama kesohor dari Patani dengan ulama Indonesia. Hal ini diyakini bahwa kakek Daud al-Fatani adalah Faqih Ali atau Datuk Andi Maharajalela seorang pengeran dari kesultanan Bone Sulawesi Selatan. Kemudian, dalam perjalanan kelana pendidikannya, Daud al-Fatani juga mengenyam pendidikan dari seorang guru yang bernama Muhammad Zayn bin Faqih Jalal al-Din al-Ansyi, seorang ulama terkemuka kesultanan Aceh yang ternama pada zaman pemerintahan Sultan Ala-al-Din Mahmud Syah.

Kuatnya jaringan yang mengikat budaya ilmu para ulama kawasan semenanjung melayu tersebut tentu tidak juga terlepas dari

tautan keilmuan para ulama di kawasan Arab, terutama di Haramayn dan Mesir. Kekuatan jejaring keilmuan antara para ulama tersebut boleh menjadi embrio atas kesadaran bersama ikatan emosionalitas serantau yang diikat oleh tali akidah Islam. Bentuk relasi atas dasar kesamaan akidah keislaman tersebut selalu terawatt dalam bingkai suci yang disebut *ukhuwah Islamiyah*.

Ukhuwah islamiyah menjadi fondasi strategis dalam menyatukan kembali emosi persaudaraan antar komunitas dan pribadi umat yang saat ini tengah terkoyak. Realitas umat dalam potret kekinian sungguh sangat memprihatinkan, dimana kondisi mereka sedang terpecah belah, dan bahkan saling menumpahkan darah. Fakta ini dengan telanjang dapat disaksikan pada dinamika *al-Rabi' al-Araby* (musim semi Arab) yang sampai hari ini masih terus berseteru antara sesama muslim, seperti yang terjadi di Tunisia, Yaman, Libya, Suriah, Mesir, Yaman dan lainnya.

Padahal, hubungan persaudaran (*ukhuwah*) sebagaimana yang telah dipatrikan oleh Rasul ketika hijrah, merupakan fondasi dasar dalam membangun sebuah imperium baru Islam. dalam konteks ini, *ukhuwah* bisa menjadi kekuatan melalui jejaring keintelektualan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama terdahulu, khususnya di kawasan rantau melayu nusantara, merupakan jejaring yang sangat kokoh, serta awet dalam rentang waktu yang panjang. Ini kemudian menjadi injeksi yang ampuh, terutama dalam keinginan menyegarkan kembali kesadaran akan pentingnya jaringan keilmuan, secara khusus dalam bidang keagamaan Islam. Selama ini, jaringan keilmuan tersebut cenderung tercerabut dari bingkai kesadaran keislaman muslim serantau ini, dan bahkan seringkali berserakan dalam sikap ambigu dan ketidak pedulian. Padahal, secara politis, kekuatan jejaring keilmuan melayu serantau sangat mungkin menjadi misi politik yang dapat mengantarkan melayu Islam menjadi *prototype* sebuah peradaban keilmuan, sehingga dapat berkompetisi dalam merebut peradaban dunia. Jika hal itu bias terwujud, maka kegundahan Amir Sakeb Arselan yang kemudian direkam melalui judul bukunya “mengapa umat muslim itu terbelakang sedangkan umat selainnya lebih maju” agaknya

tentu tidak lagi laik untuk didiskusikan, apatah lagi untuk ditulis kembali.

Bahan bacaan:

Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Nusantara*.

Amir Sakeb Arselan, *Limaza Ta'akhhara al-Muslimunwa Taqaddama Ghairuhum*.

Mustafa al-Siba'i, *al-Sirah al-Nabawiyah, Dirasatwa 'Ibar*.

Membangun Peradaban

Terasaagakragu, ketika membulatkan keputusan untuk melanjutkan studi program doctoral ke Malaysia. Maklum, *image* negeri jiran ini seringkali terkesan congkak dalam memperlakukan tenagakerja asal Indonesia. Juga, sering diopinikan pongah terhadap kedaulatan budaya dan integritas bangsa Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya stigma, bahwa belajar di Malaysia bukan belajar di “luar negeri”, karena bahasa yang digunakan tak berbeda dengan bahasa keseharian di tanah air.

Bangunan megah, dan suasana hiruk pikuk kota, rasanya negeri sendiri jauh lebih elit, lebih metropolis ketimbang Malaysia. Pokoknya, kesan yang tersimpulkan sementara, hampir tidak ada nilai tambahnya (*mumayyazah*) mengembara ilmu di negeri rumpun Melayu tersebut. Karena semua asumsi tadi menjadi kesimpulan negatif yang mengerucut pada sikap skeptik terhadap negeri tetangga. Hingga dalam pikiran saya, rasanya tidak ada sesuatu yang bisa dianggap menjadi prestise dan mengagumkan.

Namun, secara perlahan, ketika kaki menapak di tanah Malaysia, asumsi-asumsi miring seperti di atas tadi mulai menuntut klasifikasi. Akumulasi rasa penasaran itu selalu mencari validitas kebenaran anggapan yang penulis pendam selama ini. Walau subyektifitas kesimpulan penulis akhirnya harus mengakui, bahwa stigma miring tentang negeri jiran itu banyak kelirunya. Pengakuan “tulus” ini tidak berarti gagap dengan kemajuan yang berstandarkan realitas

simbolik, seperti gedung bertingkat, pusat-pusat perbelanjaan yang serba wah, yang selama ini sering dijadikan “ukuran” dari kemajuan peradaban, walau ukuran materialistic itu acap kali patut dimasukkan menjadi bagian dari standar majunya suatu peradaban (*hadarah*) sebuah negara. Akan tetapi, dalam mengukur kemajuan peradaban manusia dewasa ini, terutama dalam percaturan global, agaknya perlu membuat ukuran yang jelas dari sebuah kemajuan. Karena, kadang, kemajuan hanya didemonstrasikan secara verbal yang tidak berangkat dari nilai-nilai social keagamaan. Kemajuan seringkali terjebak ke dalam ruang hedonisme yang sangat kentara warna westernisasinya, walau bertopeng semboyan globalisasi.

Hal ini terlihat, misalnya, dalam soal mode, tontonan dan bacaan di pelbagai media tanah air, yang menjadikan budaya Barat sebagai “kiblat” dari ukuran kemajuan. Akhirnya, masyarakat Indonesia sepertinya silau dengan kemajuan simbolik itu, yang kemudian terus mengekor tindak tanduk masyarakat Barat. Maka seakan adagium “kalau tidak sama dengan Barat, berarti primitif alias ketinggalan zaman.

Kesan ini paling tidak, belum saya jumpai pada beberapa hal, khususnya tradisi mode masyarakat Malaysia pada keseharian mereka. Anggapan ini walau baru sepintas, tapi yang kasat mata member kesaksian kebenaran asumsi tersebut. Disini, penulis tidak ingin terjebak dalam kerangkeng generalisasi, apalagi menjadikan mode sebagai ukuran ‘tunggal’ dari maju tidaknya sebuah peradaban, akan tetapi ketika menengok dasar budaya dan tradisi secara etnik antara Indonesia dan Malaysia, maka mengkomparasikan dua negara yang beridentitas melayu ini agaknya juga tidak berlebihan. Pernyataan yang patut diajukan dalam mengkomparasi dua negara rumpun melayu ini, adalah, mengapa masyarakat Malaysia begitu percayadiri (*confidence*) terhadap nilai-nilai kemelayuannya? Akankah masyarakat Malaysia lebih “bertamadun” dari masyarakat Indonesia?

Bangunan Peradaban

Dalam *Wikipedia Indonesia*, Peradaban memiliki berbagai arti dalam kaitannya dengan masyarakat manusia. Seringkali istilah

ini digunakan untuk merujuk pada suatu masyarakat “kompleks”. Peradaban dapat juga digunakan dalam konteks luas untuk merujuk pada seluruh atau tingkat pencapaian manusia dan penyebarannya (peradaban manusia atau peradaban global). Istilah peradaban sendiri sebenarnya lebih digunakan sebagai sebuah upaya manusia untuk memakmurkan dirinya dan kehidupannya. Maka, dalam sebuah peradaban pasti tidak akan dilepaskan dari tiga faktor yang menjadi tonggak berdirinya sebuah peradaban. Ketiga faktor tersebut adalah system pemerintahan, system ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kaitannya dengan Malaysia yang sedang memproyeksi peradabannya, maka indikasi kearah itu seakan menyeruak kepermukaan. Jika diibaratkan gelombang, maka riak-riak gelombang peradaban Malaysia mulai bersemilir, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara Malaysia merupakan suatu negara yang mengagumkan, jika negeri ini sering dianggap remeh bagi Indonesia. Namun, ternyata negeri ini menjadi pilihan bagi para mahasiswa dari pelbagai bangsa untuk menimba beragam ilmu, terlebih dari negara-negara Arab dan Asia Tengah. Penulis hamper tidak percaya ketika bersua banyak sekali teman-teman sekampus yang berasal dari Iran, Iraq, Palestina, Saudi Arabia dan Turki. Ketidakpercayaan itu bukan karena masih “asing” bergaul dengan para pelajar manca negara, akan tetapi karena mereka belajar di negeri melayu Malaysia.

Sesuatu yang mungkin terasa ‘ganjil’ melihat fenomena ini. Akan tetapi fakta memang demikian. Negeri yang berkali lipat lebih kecil dari Indonesia ini menyediakan fasilitas pendidikan yang sangat baik dalam segi fisik maupun sarana. Berbeda dengan Indonesia, untuk menemukan fasilitas yang baik dan sarana yang elit sangatlah sulit, walaupun ada, harus mengorek korek yang sangat mahal. Bahkan komersialisasi pendidikan, *hatta* institusi pendidikan negeri (milik pemerintah) menjadi hiasan nyata. Akhirnya, pendidikan yang berkelas hanya menjadi milik kelompok yang berpunya, sementara bagi kaum proletar, hanya mengenyam kelayakan fasilitas pendidikan dalam janji-janji kosmetik para

politisi dan calon pemimpin dalam program “sekolah gratis” yang tak kunjung ada bagi mereka.

Dari sini agaknya ‘biang’ dari ketidakpercayaan diri (*inferiority*) masyarakat Indonesia terhadap jati diri budaya melayunya. Inferioritas itu berakar dari kebodohan yang sistemik, yang semakin hari dihantam badai kemilau budaya luar, yang *notabene*-nya banyak yang tidak akur dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan kita. Jika demikian, maka peradaban kemelayuan Indonesia akan semakin samar, bahkan sangat mungkin lenyap ditelan zaman.

Memang, dalam percaturan arus globalisasi, benturan peradaban pelbagai bangsa menjadi hal sangat niscaya. Akan tetapi, peradaban suatu bangsa itu akan tetap Berjaya manakala disangga oleh kekuatan ilmu pengetahuan masyarakatnya. Hal ini yang diakui oleh Prof. Wan Daud, seorang guru besar ISTAC. Dia menyatakan bahwa kejayaan atau kejatuhan suatu bangsa tergantung pada kuat atau tidaknya budaya ilmu pada bangsa itu. “Pembinaan budaya ilmu yang terpadu dan jitu merupakan prasyarat awal dan terpenting bagi kesuksesan, kekuatan dan kebahagiaan seseorang dan suatu bangsa. Suatu individu atau suatu bangsa yang mempunyai kekuasaan atau kekayaan tidak bias mempertahankan miliknya, atau mengembangkannya tanpa budaya ilmu yang baik. Malah dia akan bergantung kepada orang atau bangsa lain yang lebih berilmu’.

Kita telah melihat sendiri betapa beberapa negara minyak yang kaya raya terpaksa bergantung hampir dalam semua aspek penting kehidupan negaranya kepada negara lain yang lebih maju dari segi keilmuan dan kepakaran. Sedangkan unsur lain, yaitu harta dan tahta, bersifat eksternal dan sementara. Keduanya bukanlah ciri yang sejalan dengan diri seseorang atau suatu bangsa tanpa ilmu yang menjadi dasarnya. Sebaliknya jika ilmu terbudaya dalam diri pribadi dan masyarakat dengan baik, maka bukan saja bias mempertahankan dan meningkatkan lagi keberhasilan yang ada, malah bias memberikan kemampuan untuk memulihkan diri dalam menghadapi segala kerumitan dan tantangan.

Topangan ilmu pengetahuan bagi suatu peradaban bangsa menjadi kata kunci dari kesinambungan peradaban itu, termasuk

peradaban bangsa Indonesia. Kalautidak, maka kita akan selalu menjadi penumpang dari peradaban bangsa lain. Nah, Tulisan ini hanya keluh kecil dari sosok proletar anak bangsa yang sedang menapaki jalan asa dan cita untuk menjaga dan mempertahankan peradaban bangsanya. ***Wallahu a'lam***

Ikhwan Muslimin dan Tafsir Terorisme

Perbincangan tentang terorisme kembali menjadi isu utama pemberitaan dunia. Topik terorisme selalu menjadi jagalan laris, karena *main topic*-nya kejahatan terhadap kemanusiaan yang bermotifkan agama, walaupun secara definitif, *term* terorisme tidak memiliki definisi baku yang disepakati oleh dunia internasional. Namun dalam paradigm publik, Islam seolah telah diperangkapkan dengan ideology sesat itu, dan cenderung selalu tertuduh dalam setiap gerakan yang berlabelkan terorisme.

Kini, tema terorisme (*al-irhab*) kembali manggung di pentas opini Arab dan dunia, ketika junta militer Mesir yang dikomandoi Abd Fattah al-Sisi memberanguskan lawan politiknya yang melakukan demonstrasi damai di lapangan Rabea al-Adawea dan Nahdah di Kota Kairo. Demo damai (*al-i'tisham*) tersebut, bagi militer, telah disusupi dan ditunggangi oleh gerakan Islam Ikhwan al-Muslimin (IM) yang diasumsikan sebagai gerakan yang berideologi terorisme. Label terorisme itu dimunculkan ke permukaan, karena junta militer Mesir menjadikan terorisme sebagai alibi dalam rangka membunuh gerakan Ikhwan al-Muslimin sebagai lawan politik, sehingga seolah istilah teroris menjadi justifikasi (*tabrir*) penghalalan kelakuan pembunuhan sadis tersebut.

Pengistilahan terorisme (*al-irhab*) selanjutnya dikemas apik yang dijual di ruang opini dunia, karena personifikasi teroris agaknya telah menyatu dengan sosok Usama bin Laden, seorang anak Adam

yang pernah menjadi musuh nomor satu AS dan sekutunya. Juga, paham sesat ini dikesankan selalu bersama berbagai gerakan Islam garis keras, fundamentalis, ekstrimis dan lainnya. Dari itu, istilah terorisme memiliki daya magnetis tinggi di kalangan *islamophobia*, sekulerisme dan liberal. Di sini, menurut Khaled Abou el-Fadl, terminology terorisme menjadi label-label tertentu yang tidak hanya mendeskripsikan, tapi juga label-label itu juga menghakimi.

Stigma terorisme

Memahami *term* teroris mesecara *harfiyah* tidaklah begitusulit. Namun, menerjemahkannya secara *kully* (komprehensif) dengan konteks kekinian terasa amat akut. Mengingat, *term* terorisme sudah dipengaruhi oleh pelbagai kepentingan, baik ideology maupun politik. Sehingga, ketika harus menuding seseorang dengan teroris, terasa sulit untuk meyakini kebenaran relevansinya antara stigma dan pelakunya. Hal ini, karena *term* terorisme telah memasuki wilayah klaim masing-masing dengan beragam tafsiran, selaras agenda yang berkepentingan. Disinilah tepatnya ungkapan Fahmi Huwaidi dalam bukunya *al-Maqalat al-Mahzurah* (kumpulan artikel terlarang) yang menjelaskan, bahwa dekade terakhir ini, perbuatan baik dituding sebagai sebuah kejahatan, putih menjadi hitam dan mujahid dianggap teroris.

Namun, di tengah subyektifitas dan kerancuan makna terorisme, tidak lantas istilah ini terisolir dan luput dari pengertian akademiknya. Menurut Vidari, kata terorisme merupakan istilah asing yang digunakan untuk menyebut seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan teror di tengah-tengah masyarakat. (*Republika*, 23/6/2007). John M Echols menyebut arti terorisme sebagai pengetaran atau perusuh atau tindakan kekerasan yang disertai dengan sadisme yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan. Akan tetapi dalam kamus adikuasa, menurut Noam Avram Chomsky, terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara atau kelompok-kelompok kecil. Amir Thohiri dalam bukunya *al-lrhab al-Muqaddas* (terorisme suci) menulis, semua tindakan kekerasan yang diluar undang-undang

perang, seperti yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia dengan tujuan memberi rasa tidak aman demi tercapainya tujuan politik.

Pengertian di atas, merupakan persepsi personal ilmuwan dalam mendefinisikan makna terorisme. Pada level kenegaraan, Mesir misalnya, pernah diadakan forum dialog antara ketua Asosiasi Keamanan Nasional Arab dengan ketua Dewan Syura (MPR) Mesir pada tanggal 20 Maret 1993 yang mengangkat tema “Menghadang Terorisme”. Dalam dialog ini menelurkan pengertian terorisme, yaitu, segala praktek kekerasan atau ancaman dengan tujuan politis untuk mempengaruhi prestise negara atau untuk menguasai keamanan dengan obsesi menggoyang kepemimpinan nasional, yang bias dilakukan dengan pelbagai cara, seperti menghancurkan perekonomian agar tercipta keresahan yang berujung kerusuhan. Juga, sebuah obsesi untuk merubah perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara dan telah diterima oleh masyarakat.

Jika berangkat dari pengertian terorisme secara leksikal seperti di atas, maka *mafhum* sederhana dapat disimpulkan bahwa terorisme itu selalu ada dalam realitas sejarah kehidupan manusia. Bahkan, ada semenjak manusia itu membentuk komunitas social seperti tragedi pada bani Adam, Habil dan Qabil. Namun pengertian terorisme dalam pemikiran modern mengkristal semenjak revolusi Prancis pada tanggal 10 Agustus 1792, ketika pihak oposisi revolusi melakukan pelbagai tindakan kekerasan dalam menentang revolusi tersebut.

Dalam perkembangannya, gerakan terorisme memang sangat sering dilator belakangi oleh kepentingan politik. Hal ini terlihat dari beberapa klasifikasi yang dirangkumkan oleh para ilmuwan. Setidaknya ada tiga. *Pertama*, terorisme criminal seperti gerakan perampokan dan penodongan. *Kedua*, terorisme hegemonik seperti yang dilakukan oleh banyak penguasa terhadap lawan politiknya dalam melanggengkan kekuasaan. *Ketiga*, terorisme pemikiran seperti pemaksaan opini dan pemahaman terhadap kelompok lain.

Dari ketiga rangkuman tentang pemaknaan terorisme di atas, jika dikontekstualisasikan di negara Mesir sekarang ini, maka

sangat jelas bahwa kudeta yang bersimbah darah dari tangan-tangan sadis militer Mesir itu , merupakan terorisme hegemonik. Dimana pihak Militer yang merampas kekuasaan dari pihak sipil kemudian melakukan pembantaian kepada lawan politik mereka. Kelompok gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir dengan sayap politik Partai Kebebasan dan Keadilan yang telah ditakdirkan menjadi pemenang Pemilu hanya menjadi target dari alibi penumpasan terorisme global. Jamaah Ikhwan yang selama ini selalu mengedepankan intelektualitas politik dan moderasi Islam harus distigmakan dengan label terorisme, sebab hanya dengan alibi ini, kelakuan pembantaian yang dikomandoi Adb Fattah al-Sisi bisa ‘terima’ oleh pro status quo, liberal dan kelompok penganut *Islamophobia*.

Di sini letak rancunya. Demonstrasi damai (*al-i'tishom*) tanpa senjata, yang merupakan ciri khas demokrasi, justru dibantai dan dianggap sebagai gerakan terorisme. Tapi kudeta militer, pembantaian manusia dengan sangat keji oleh aparaturnegara dianggap sebagai kewajaran dan menjadi ikon perjuangan dalam menegakkan kedaulatan demokrasi dalam sebuah Negara. Beginikah tafsir terorisme yang kemudian menjadi rujukan pro kudeta? Ini yang mungkin dimaksudkan oleh Fahmi Huwaidi sebagai *ajras al-'audah ila al-wara'* (lonceng pertanda mundur kebelakang)? Tentu, yang berakal waras dapat menilai dengan objektif dan yang sebenarnya. ***Wallahu a'lam***

Demokrasi Mesir dan Akal Sehat

Mesir, negeri Arab yang sangat populer dalam sejarah dinamika kelimuan Islam dan negeri Kinanah yang telah merekam perjalanan para *anbiya* itu, kini sedang mencekam dan bahkan pernah bersimbah darah. Cerita kota Kairo yang penuh romantika cinta dalam novel-novel religi di tanah air, sekaligus pusat gerakan politik di Mesir, kini sedang merajut rangkaian cerita lain yang sangat sengit dan mengerikan. Para pegiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) se-antero dunia dikejutkan dengan fakta pengkhianatan demokrasi yang sedang bergelora di negeri viramid itu. Penggulingan presiden Muhammad Moursi dalam kudeta militer yang dikomandoi Jenderal Abd Fatah al-Sisi, merupakan petaka sejarah yang telah menorah duka mendalam di pentas dunia demokrasi di abad modern. Karena, Muhammad Moursi merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung dalam Pemilu pertama kali setelah tumbangny sang Diktator HUsni Mubarak yang kemudian lahirnya era reformasi di negeri al-Kinanah tersebut.

Naiknya Moursi sebagai presiden Mesir pertama yang dipilih dalam system demokrasi modern, tidak bias dipungkiri sebagai pertanda bangkitnya gerakan Islam politik di jazirah Arabia. Karena gerakan Islam politik selama ini dibungkam dan bahkan dikebumikan, sehingga tidak bias tampil ke ruang public untuk mengambil peran dalam kekuasaan. Momentum musim semi di jazirah Arabia (*al-Rabi' al-Arabiy*) nampaknya member ruang

untuk bangkit setelah beberapa decade dalam tekanan penguasa otoriter yang bertopeng demokrasi. Momentum *Arab Spring* yang bergulir pada akhir 2010 yang berhembus dari Tunisia dan menyebar hamper ke seluruh Negara Arab, seolah member angin segar dan peluang berharga dalam berkonpetisi di pentas demokrasi politik yang selama ini tertutup.

Runtuhnya rezim otoriter Husni Mubarak yang telah berkuasa selama tiga puluh tahun di negeri Musa itu, setidaknya member harapan besar terhadap perjalanan demokrasi di Mesir. Namun, alam demokrasi yang baru seumur jagung dinikmati rakyat Mesir itu, kini malah menuju sekarat. Cita demokrasi dengan credo 'suara rakyat adalah suara tuhan' yang selalu member ruang "kebebasan" kepada rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, kini menjadi suram setelah tangan besi militer kembali mengambil alih kekuasaan. Demonstrasi menentang Presiden Moursi di lapangan Tahrir (*Maidan a-Tahrir*) pada tanggal 30 Juli, dijadikan tameng oleh militer untuk mengambil kendali pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, alibi yang dibangun juga sangat meyakinkan, bahwa jumlah para demonstran anti presiden Moursi saat itu mencapai puluhan juta orang. Walaupun, argumentasi itu ternyata sangat lemah dan bahkan sangat sumir dalam perspektif ilmiah dan akademis. Tapi, tampaknya pihak militer tak peduli. Dengan meminjam 'daulat rakyat', kudeta militer terus melaju, walau ribuan nyawa rakyat Mesir yang tak berdosa harus menjadi tumbal.

Watak Demokrasi

Memang persoalan demokrasi menjadi problematika tersendiri bagi gerakan politik Islam. Perdebatan panjang tentang entitas (*mahiyah*) demokrasi dalam perspektif Islam agaknya tidak menemui ujung, karena setiap pendapat memiliki cara pandang berbeda. Apakah "penghukuman" terhadap demokrasi berangkat dari pengertian literal, sejarah dan bahkan ideologinya, atau justru pada substansi dan '*maqasid*'-nya. Walaupun, pihak yang selama ini bertelingkah tersebut, agaknya telah menemukan ruang "ijma", dalam berdemokrasi, baik berdasarkan pertimbangan pragmatis,

atau kondisi realitas yang menjadikan 'illat' pendapat itu berubah. Dalam hal ini, negara Mesir menjadi *prototype* tentang dinamika pergumulan itu, karena partai al-Nur yang bercorak salafi, yang selama ini gencar menolak *term* demokrasi ternyata mengikuti pemilu, dan partai Keadilan dan Kebebasan (*hizb al-hurriyahwa al-'adalah*) sayap politik Gerakan Ikhwan al-Muslimin bahkan menjadi pemenang pemilu.

Ketika dua kekuatan politik Islam di Mesir tersebut sedang berromantika dengan realitas demokrasi, justru demokrasi itu dirampas oleh kelompok yang selama ini mengkampanyekan demokrasi. Hal ini tak bisa ditepis, bahwa fakta kudeta militer di Mesir didukung oleh kelompok liberal dan sekuleris, yang didukung oleh Amerika Serikat, Israel dan sekutunya. Lantas, seperti apakah tafsir demokrasi yang merekamaksudkan? Bukankah kesepakatan atas tafsir demokrasi dalam politik ditentukan oleh kotak suara pemilu? Lalu mengapa mereka (liberal, sekuleris dan AS) mendukung penggulingan Muhammad Moursi dan bahkan menggantikan pemerintahan yang sah tersebut?

Pertanyaan di atas menjadi penting untuk mengungkap golongan manakah yang tulus terhadap tafsir demokrasi dan puak mana yang justru menjadikan demokrasi sebagai topeng belaka? Yang jelas, dari perspektif manapun, watak demokrasi adalah kebebasan yang merupakan hak sekaligus ruang terbuka bagi seluruh rakyat untuk mengekspresikan kemauan politik selama berada dalam koridor hukum yang sah dalam sebuah Negara. Namun yang terjadi di Mesir agaknya berbeda, karena tafsir demokrasi yang dimenangkan oleh partai Islam tidak sejalan dengan pemahaman dan kemauan demokrasi yang ditafsirkan oleh kelompok liberal dan sekulerism.

Pemahaman demokrasi oleh kelompok liberal dan sekuleris hanya benar bila pengendali kekuasaan di sebuah Negara mengikuti dogma yang selama ini mereka perjuangkan. Kata kunci perjuangan demokrasi persi liberal dan sekuleris adalah mengasingkan golongan Islam dari pentas politik. Hal ini karena ideologi liberal dan sekulerism pasti bertabrakan dengan rumus dan norma agama. Bagi mereka, bersenyawanya agama dan politik di pentas kekuasaan

merupakan persekongkolan haram yang harus dinistakan, bahkan harus dimusnahkan.

Ideologi permusuhan terhadap bersenyawanya agama dan politik tersebut nampaknya telah menjadi interpretasi mutlak dan tunggalbagikaum liberal dan sekulerism, bahkan persenyawaan itu menjadi momok yang selalu dipandang menakutkan. Sehingga, berbagai istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi golongan Islamis tersebut selalu dengan ungkapan mendiskreditkan, seperti fundamentalis, ekstrimis dan bahkan teroris. Pengistilahan ini menjadi bahasa baku yang selalu dijaja oleh kaum sekuleris dan liberal dalam opini publik yang dibungkus dengan kemasan yang apik yang seolah benar dan ilmiah.

Realitas demokrasi di Mesir yang sedang bergolak sekarang ini agaknya memerlukan penegasan kembali terhadap tafsir demokrasi di abad modern ini, apakah demokrasi itu masih sejalan dengan kemajuan berfikir manusia, atau justru terma demokrasi masih dalam kerangka paradgima peradaban masa lalu. Nampaknya, golongan Islam yang berjuang untuk demokrasi di Mesir dan dunia Islam lainnya, perlu membaca tafsir demokrasi yang dirumuskan oleh kaum liberal, sekuleris dan AS secara mendalam dan seksama. Karena, acapkali ruang demokrasi yang dimenangkan oleh golongan Islam, justru mendapat tahta yang berujung tragis di penjara. Bahkan, harus bersimbah darah, seperti yang terjadi di Mesir yang telah menumbalkan 6000-an nyawa rakyat tak berdosa. Jika seperti ini makna demokrasi yang diperjuangkan oleh kaum liberal dan sekuleris, maka sudah pasti yang membenarkannya layak untuk dikategorikan kehilangan akal sehat. **Wallahu'alam**

Perang Gaza dalam Lensa Kiamat

Seorang akademisi Prancis yang berdarah Yahudi, Andre Nocy mengungkapkan gumamnya atas ekspansi Zionis Israel ke Gaza, bahwa kebiadaban Zionis Israel di Gaza sekarang ini persis sama dengan perilaku kebiadaban yang pernah dilakukan Adolf Hitler terhadap sebagian negara Eropa. Kemudian, Andre juga mengucapkando'a "celakalah bagi Israel, saya sungguh malu atas perilaku mereka dan semoga tuhan melaknat mereka selamanya".

Ungkapan yang dirilis oleh *al-Jazeera* (13/10/2009) yang dikutip dari *Quds Press* tersebut setidaknya menunjukkan bahwa dari kalangan Yahudi sendiri sudah muak dengan kebiadaban Zionis Israel sekarang. Bagaimana tidak, sampai saat ini, kekejaman militer Zionis di Gaza tersebut telah menelan korban ribuan *syuhada*. Dari jumlah para *syuhada* tersebut, terdiri dari anak-anak, kaum perempuan dan orang-orang tua.

Kebrutalan Zionis di negeri tiga agama itu tidak hanya sebatas paradigm perang, akan tetapi sudah memasuki ranah pembantaian etnis (*al-harb al-ibadah*) atau yang disebut seorang ahli hukum Polandia, Raphael Lemkin dengan istilah Genosida. Dalam bukunya *Axis Rule in Occupied Europe* (1944), Lemkin mengartikan Genosida sebagai sebuah pembantaian besar-besaran, sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. Istilah Genosida memang tepat untuk potret

kebiadaban Zionis Israel, mengingat sejarah berdirinya Israel sangat identik dengan perilaku barbaristik yang setiap jengkal teritorialnya digaransikan dengan darah rakyat Palestina.

Jika ditelisik dalam lensa sejarah, lakon Zionis Yahudi di tanah Palestina sekarang bukanlah hal yang baru, mengingat konflik Palestina-Israel bukanlah konflik satu bangsa dengan bangsa lain, tapi konflik peradaban, atau bahkan konflik agama yang telah direkam sejarah dalam usia panjangnya. Bentangan sejarah perilaku congkak Yahudi dibuktikan dengan memusuhi semua ras besar dunia. Konflik antara Nabi Muhammad saw dengan kaum Yahudi di Madinah, konflik antara Yahudi dan Romawi, konflik antara Yahudi dengan negara-negara Eropa, konflik antara Musa dengan Fir'aun, bahkan konflik antara nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya.

Lakon kebiadaban Israel saat ini hanyalah pengulangan peristiwa, semenjak era Perang Arab, pembakaran Masjid al-Aqsha, tragedi Sabra Satila, Intifadhah akhir 80-an, tragedi al-Khalil Hebron, penembakan Muhammad al-Durrah, pembunuhan Syekh Ahmad Yasin dan Abdul Aziz Rantisi dan pejuang Palestina lainnya. Perbedaan keganasan Israel sekarang dengan yang terdahulu hanya terletak pada waktu dan pelaku.

Dalam perjalanannya, keberadaan Zionis Israel memang selalu bersama aliran darah. Semenjak terbentuk pada 1897 dan diproklamasikan di Swiss yang akhirnya membuat keputusan bahwa bangsa Yahudi harus kembali ke Palestina, maka dari sana cerita bersimbahnya darah rakyat Palestina selalu menjadi tinta dalam catatan kelam sejarah. Bermula dari kongres di Swiss hingga terbentuknya negara Israel Raya 1948 yang didukung penuh oleh negara-negara Barat, perilaku bangsa "kera" tersebut selalu membuat ulah. Hingga hari ini, kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina seolah hanya menjadi cerita yang tidak berarti bagi dunia.

Bangsa Barat bahkan ikut merestui kepongahan Israel dengan tanpa *reserve*. Hak Asasi Manusia yang didewakan oleh pengagum Barat, hanya berlaku bagi kesalahan ras dan bangsa lain terhadap Yahudi, namun tidak bermakna apapun, jika kejahatan Yahudi bagi bangsa selain mereka. Lantas, kita patut bertanya, apakah kekejaman

dan kebiadaban Zionis Yahudi terhadap bangsa Palestina tersebut sebatas persoalan politik, sebagaimana yang dikampanyekan kaum liberal di Indonesia dalam menjustifikasi penegasan Ehud Olmert, bahwa target mereka hanyalah menumbangkan Hamas atau konflik dalam pentas sejarah ini sudah marasuki wilayah agama?

Jika melihat persepsi sejarah, sulit menapikan bahwa kucuran darah yang selalu mengalir di bumi Palestina tersebut hanya bermotif politik semata. Sebab berdirinya Israel tahun 1948 merupakan mimpi besar Yahu disejak masa Musa, Dawud, Sulaiman, bahkan zaman Nabi Muhammad saw. Yahudi sangat membutuhkan “Kerajaan Bani Israil” untuk mengalahkan ras selain mereka. Dan ketika Yahudi menaklukkan al-Quds pada tahun 1967, pasukan Israel berkumpul di tembok ratapan. Mereka berteriak dengan menyatakan “hari ini kita berhasil membalas dendam perang Khaibar” kemudian mereka meneriakkan “tumpangkan buah misy-misy di atas buah Apel, agama Muhammad telah lari dan pergi”. Selain itu juga, Rundolf Churchil menyatakan bahwa lepasnya al-Quds dari penguasaan Islam merupakan impian bersama umat Kristiani dan Yahudi. Parlemen Israel telah mengeluarkan keputusan mengenai al-Quds, yaitu sebagai kota milik bangsa Yahudi dan sekali-kali tidak boleh kembali ketangan umat Islam.

Lebih jauh dari itu, konflik di Timur Tengah yang disebabkan oleh Israel merupakan skenario Yahudi dalam menerjemahkan doktrin Talmud yang sangat mereka yakini, bahwa negara Israel Raya berdiri dalam batasan sungai Nil di Mesir sampai sungai Furat di Iraq. Profesor Jamal Abd al-Hadi dan Wafa Muhammed Rif'at dalam bukunya *al-Tariq Ila Bayt al-Maqdis* mengungkapkan beberapa doktrin Talmud yang dijadikan Yahudi sebagai acuan dalam menjustifikasikan ambisi bejat mereka, di antaranya adalah, *pertama*, asal manusia selain Yahudi sama dengan asal hewan. *Kedua*, arwah orang Yahudi sangat mulia di sisi Tuhan, sementara arwah manusia selain mereka adalah arwah setan yang menyerupai ruh hewan. *Ketiga*, membunuh selain Yahudi merupakan kebajikan yang akan dibalas oleh Tuhan. Jika tidak mampu membunuh selain Yahudi secara langsung, maka wajib bagi Yahudi membuat segala

cara untuk kehancuran selain mereka. *Keempat*, kehidupan orang selain Yahudi adalah milik Yahudi, begitu juga dengan harta mereka. *Kelima*, perbedaan manusia dengan hewan sama seperti Yahudi dengan manusia selain mereka.

Ada banyak teks Talmud yang diimani oleh Zionis Israel untuk menghancurkan manusia selain mereka. Dengan demikian, ambisi Zionis tidak akan pernah padam sebelum cita mereka terbukti nyata. Bagi kaum Zionis Israel, segala acara menjadi halal demi kepentingan dan keculasan mereka. Sifat kaum Zionis Yahudi itu mewarisi sifat besar, yaitu sifat durhaka diturunkan dari sifat saudara-saudara Yusuf (seayah berbeda ibu). Di sana sudah terpupuk bakat-bakat kelicikan, dengki, kebohongan, dan sebagainya. Walau sifat-sifat itu sebatas potensi, bukan kemutlakan takdir.

Jadi, kebiadaban Zionis Israel saat ini di Gaza hanyalah sebagian dari konsekuensi dari dendam sejarah. Awalnya, Bani Israil (Yahudi) hanyalah sebuah kaum yang selalu mendapat bimbingan seorang Nabi. Namun dinamika sejarah Yahudi yang sangat panjang melahirkan watak biadab dan tidak berprikemanusiaan. Semua karakter buruk Yahudi tersebut seolah telah menjadi skenario Tuhan untuk menjadi cobaan di akhir zaman. Mungkin, kelakuan Zionis Yahudi yang terhadap rakyat Palestina merupakan rahasia yang mulai terkuak untuk membuka mata dunia. Karena Israel selalu picik dalam mempengaruhi opini manusia. Atau mungkin, kebiadaban Zionis Israel sekarang ini menjadi potret dari lensa kiamat, sebagaimana isyarat baginda Nabi dalam sabdanya, bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi perang antara muslim dan Yahudi. Jika benar demikian, maka kebiadaban Zionis Israel di Gaza hingga sekarang ini bukanlah perilaku akhir mereka. Semua itu hanya *replay* sejarah dan *postponed scenario* sebelum *go with new aggression*. ***Wallahu a'lam***

Kado Kemenangan Hamas

Agresi kebiadaban Israel di tanah Gaza Palestina, dalam waktu berkisar tigaminggu lalu, berakhir sudah. Bersimbah darah, reruntuhan bangunan, raung tangisan dan tetesan air mata dari para korban perang di Gaza telah terekamdalam potret sejarah. Semua itu menjadi rentetan bukti kezaliman Zionis Israel terhadap umat manusia, khususnya Rakyat Palestina. Rekaman perang Gaza menjadi abjad dari bilangan frustrasi negara biadab itu terhadap tragedy kemanusiaan, utamanya warga Palestina. Seolah, kamera zaman tidak pernah berhenti memotret kaum pembangkang itu, karena dalam setiap klik lensa sejarah, rekaman kezaliman, culas, bringas dan haus darah, selalu menjadi cirri jejak dari tapak Zionis Israel di bumi Tuhan ini. Walau demikian, karakter angkuh Zionist Yahudi tetap masih mampu mengelabui, bahkan tetap menarik simpati dunia. Seakan apa yang mereka lakukan terhadap golongan lain di dunia ini, merupakan pembelaan diri dan mempertahankan entitas kehidupan mereka. Dengan pengelabuan ini, opini dunia menjadi perangkat yang siaga untuk menggolongkan orang yang kontra dengan Zionis Yahudi menjadi golongan teroris, militan, fundamentalis dan sederet istilah minor lainnya.

Penguasaan Yahudi atas opini dunia sudah menjadi rahasia publik, karena kekuatan Zionis Yahudi menjamah semua sector lintas kehidupan manusia. Pengaruh Yahudi menyusup dalam pelbagai lini, baik media, ekonomi, politik dan bahkan militer.

Sehingga, umat manusia hamper tidak mampu mengelak virus "antrak" pengaruh umat yang dilaknat Tuhan tersebut. Kehancuran peradaban manusia di belahan bumi ini, seakan sulit untuk menafikan andil dari umat yang selalu mengingkari semua utusan Tuhan tersebut. Henry Ford dalam bukunya "*The International Jew*" mengungkapkan semua kekuatan Yahudi Internasional yang menggurita dan sekaligus menjadi alat kejahatan mereka terhadap golongan lain di dunia ini. Karena menariknya buku Henry Ford itu, Geral L.K Smith dalam penutup prakatanya di buku tersebut sampai mengungkapkan "setiap pembaca mustahil akan menolak logika Henry Ford, dan saya sepakat sepenuhnya dengan Henry Ford bahwa Amerika dan dunia membutuhkan pengetahuan tentang hakikat Yahudi, dan hakikat itu telah membebaskan kita dari segala kejahatan dan bahaya yang timbul dari kegiatan dan segala aktifitas permusuhan Yahudi".

Barangkali dari sini, sebuah pertanyaan bergolak dalam benak seorang pemikir muslim, Mohmd Thahir Ulwani. Dalam tulisannya yang berjudul "Gazawa Khitab al-Malhamiyah al-Qur'aniyah Li Bani Israel" (Islamonline, 01/02/2009), Ulwani menulis, mengapa banyak sekali ulasan al-Qur'an yang berkaitan dengan Bani Israel, yang mengesankan bahwa seolah mereka mendapat prioritas bahasan dalam al-Qur'an. Ulwani beranalogi bahwa banyaknya ulasan al-Qur'an tentang Bani Israil serupa dengan banyaknya ulasan al-Qur'an tentang Iblis. Keberadaan Iblis dihadapkan pada posisi konfrontatif dengan nabi Adam. Begitu juga dengan Bani Israel yang berada pada tempat konfrontasi dengan umat Islam. Dua kelompok yang populer tadi (Iblis dan Bani Israil) merupakan tamsil kebiadaban yang selalu berada dalam posisi kontra dengan golongan Adam dan umat muslim. Karena keduanya berusaha menginvestasikan idealitas kebenaran dalam realitas umat manusia.

Sekiranya interpretasi Ulwani di atas "patut" dijadikan sandaran, maka peta damai antara umat muslim Palestina dan Israel hanya mampu terwujud dalam dunia ilusi yang tidak pernah konkret. Perdamaian yang diobralkan pihak Zionist Israel dan pelbagai Negara sekutu karibnya (Amerika Serikat dan beberapa

negara Eropa) hanyalah perdamaian yang licik dan timpang, karena hanya berpihak kepada kemaslahatan Zionis Yahudi semata. Hal ini karena, logika dari kekacauan di kawasan Arab sekarang yang sejatinya adalah problematika Palestina telah disulap oleh Zionist Yahudi menjadi persoalan bagi Israel. Artinya, perdamaian di kawasan Palestina disebabkan karena ketidaknyamanan Israel yang selalu dimusuhi Palestina, bukan sebaliknya. Padahal faktanya sangat antagonis, ketidaknyamanan, banyaknya pengungsi rakyat Palestina disebabkan oleh bercokolnya Zionis Israel di tanah Arab tersebut.

Bertolak dari titik ini, semua pemimpin dunia faham, dan lensa sejarah sudah merekamnya, bahwa keberadaan Israel di Palestina bukan akibat, tapi sebab dari ketidak harmonisan dan peperangan antar anak manusia di tanah suci sana. Akan tetapi, dalam realitas opini kekinian, seolah ranah "akibat" lah yang mesti diselesaikan, dengan bersikap acuh terhadap sebab dari persoalan *waqi'*-nya.

Dari realitas di atas, nampaknya arah terminal damai yang dituju melalui kendaraan diplomasi yang selama ini dijadikan *soft power*, dan andalan oleh pelbagai pihak yang mengagungkan kata damai, hanya ruang waktu bagi Israel untuk membuat kehancuran selanjutnya atas Palestina. Dengan demikian, eksistensi Hamas sebagai Organisasi Perlawanan (*al-harakah al-muqawamah*) bagi umat Islam Palestina merupakan hal mesti ada. Entitas Hamas yang lahir dari rahim gerakan pembebasan merupakan jawaban yang tegas dan terhormat bagi Israel dan sekutunya. Dengan slogan "*al-intisar aw al-syahadah*" yang berarti menang atau syahid, setidaknya Hamas telah menunjukkan bukti slogan tersebut dalam perang tiga pecan dalam medan laga di Gaza.

Tidak banyak yang mengetahui, bahkan banyak yang menganggap sumir, bahwa dalam perang yang disebut Hamas dengan *al-furqan* di Gaza tersebut, ternyata mendulang kemenangan. Di atas catatan kertas dan hitungan angka kekuatan, rasanya anggapan mustahil kemenangan Hamas sangat mewakili rasionalitas. Akan tetapi, terkadang kemenangan tidak melulu berdasarkan kekuatan fakta hitungan angka. Kemenangan Hamas agaknya menempati urutan

irasionalitas kekuatan angka tadi, layaknya seperti yang pernah terjadi dalam perang Badar dan Hunain.

Dalam pernyataan resmi Hamas, seperti yang dilansir website resmi al-Qassam tanggal 19/01/2009, jumlah tentara Zionis yang mati sebanyak 80 orang, di samping ratusan yang luka-luka dan cedera. Juga pasukan al-Qassam telah menghancurkan 47 tank baja Israel, menjatuhkan 4 helikopter dan satu pesawat pengintai. Sebaliknya korban dari pasukan al-Qassam hanya 40 orang yang syuhada dan 1300 orang syahid yang terdiri dari anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia. Dari data ini disimpulkan bahwa perang Gaza dimenangkan oleh Hamas, mengingat jumlah korban yang berperang (tentara) dan peralatan perang, jelas Zionis Israel lebih banyak jumlahnya. Kemudian, dari target yang selama ini didengungkan Israel untuk membasmi gerakan Hamas terbukti gagal total. Faktanya, sampai saat ini, Hamas tetap menjadi sebuah kekuatan yang solid dan bahkan menjadi *prototype* perjuangan umat manusia, khususnya umat muslim terhadap kebiadaban Zionis Israel.

Kemenangan Hamas ini jelas tragedy memalukan sekaligus memilukan bagi Israel dan sekutunya. Bagaimana tidak, upaya yang dilakukan Israel untuk melumpuhkan Hamas bukan hanya saat menghujani bom-bom di tanah Gaza. Akan tetapi semenjak lahirnya Hamas dalam sebuah gerakan perlawanan menghadapi Israel. Para pemimpin Hamas di penjara, rakyat mereka di embargo, namun semua itu bukan membuat mereka lemah. Justru cobaan itu menjadi vitamin yang selalu menambah vitalitas perjuangan. Inilah kekuatan yang pernah diungkapkan Rantisi "bagi kami (Hamas), mati karena sakit jantung dan mati karena serangan Apache adalah sama-sama mati, tapi mati karena serangan Apache lebih kami cintai".

Perang Gaza telah membungkus kado kemenangan berharga dari Hamas. Seolah kado kemenangan itu bertuliskan "kemenangan umat akan diraih dengan percaya diri, ketulusan niat, keyakinan yang kuat, azam yang sehat dan *tsiqah* dengan pertolongan-Nya, dan untuk menghadapi kekuatan Zionis Israel tidak mesti dengan cara diplomasi, karena mereka itu tidak pernah mau menerima pendapat

orang lain”. Pesan ini juga yang kemudian dilontarkan PM Turki, Tayyip Erdogan kepada Simon Peres, kamu (Yahudi) memang tidak pernah mau mendengar! ***Wallahua’lam***

Kontekstualisasi Jihad

Kepergian para pelaku yang tertuduh meledakkan bom Bali, menuju keharibaan Tuhan, meninggalkan varian kesan yang penuh tanya dalam konteks keberagamaan umat. Kepergian “tigaserangkai” tersebut, pada satusisi, melepaskan dahaga orang-orang yang menunggu ”pembalasan” akan ledakan bom yang sempat mengguncang Bali, bahkan menggetarkan opini dunia waktu itu. Bagi para korban ledakan Bom Bali tersebut, dengan dihukum matinya tiga serangkai itu (Amrozi cs), maka amarah dendam yang menggelegak dalam bathin seolah telah terterbayar. Kebencianterhadappelakubomtersebut, seakantelahinpasdengandihukumnyamereka di ujung senapan penembak jitu. Kesimpulan dari kelompok ini, para pelaku bom Bali memang layak dan pantas dihukum mati, sebagai imbalan dari perilaku ketidak manusiaan yang telah mereka lakukan.

Tapi ternyata, simpulan seperti di atas tidak berlaku bagi sebagian yang lain. Bahkan member kesan yang sangat berbeda. Dalam persepsi mereka, Amrozi cs layaknya sebagai pejuang yang melambangkan anti penindasan dan bahkan boleh dianggap sebagai pahlawan. Kematian Amrozi cs, meskipun tidak bias diterima dengan alasan kebiadaban peradaban yang hegemonik dan juga sebagai kebiadaban kekuasaan yang selalu pongah dan penuh intrik dalam jagalan politik. Tapi sungguh demikian, ditengah ketidakmampuan menolak kepergian ”trio bombers” ini, kematian mereka justru

menganugerahkan sebuah cita dalam merangkai impian akan mati dengan harga yang sungguh sangat mulia, yaitu mati syahid. Predikat *syuhada* bukan gelar yang bias disogok dengan harta dan kekuasaan, tidak bisa didapatkan dengan lobi politik. *Syuhada* merupakan gelar kehormatan yang Tuhan anugerahkan kepadahamba-Nya yang terpilih, yang kadang berada dalam wilayah misteri Tuhan. Di ranah inilah, legenda seorang panglima perang Khalid bin Walid harus menerima kenyataan, walau selalu dalam bari santer depan bahkan komando dalam banyak medan perang, tapi harus rela mati di atas ranjang tidurnya.

Dua varian kesan akan kematian Amrozi cs itu, seolah berjalan dengan logikanya sendiri-sendiri. Kedua sangkaan di atas, bertolak dari argumen yang layak untuk dijadikan pijakan. Namun, kedua konklusi dari varian sangka tentang status kematian Amrozi cs jelas member kesimpulan yang sangat berbeda. Jarak dua kutub kesimpulan tersebut cukup menganga. Ibarat api dan air yang tidak akan mungkin bersama. Kerana, bagi kelompok pertama, kematian Amrozi cs adalah sebuah karma dari kejahatan dan sikap *immoralitas* terhadap sesama manusia. Sehingga, dengan persepsi itu, maka status Amrozi cs adalah penjahat, biadab dan teroris yang memang harus mendapat hukuman yang setimpal. Sebaliknya, dari kelompok kedua, status kematian Amrozi cs merupakan sebuah kehormatan, bahkan menjadi impian, mengingat gelar *syuhada* adalah tingkat tertinggi dari persembahan seorang hamba kepadaTuhannya. Kesimpulan ini jelas bertolak dari anggapan, bahwa Amrozi cs adalah para mujahidin yang telah mengorbankan hak miliknya yang paling berharga, yang tidak bernilai dibanding apapun, yaitu nyawa.

Lantas, kesimpulan kelompok manakah yang paling benar, atau bias dianggap sebagai varian konklusi hukum yang lebih mendekati kebenaran? Untuk mendapat jawaban yang lebih memuaskan (*iqna'*), rasanya memang sangat sulit. Mengingat kedua kesimpulan tadi memiliki justifikasi yang tidak hanya sekedar berpijak dari nalar kemanusiaan, akan tetapi juga berangkat dari argumentasi ketuhanan. Keduanya member alasan yang searah dengan narasi konteks, yang kemudian dijustifikasi oleh teks-tekskeagamaan.

Dalam mendobrak kesulitan untuk mendapatkan sebuah kebenaran konklusi hukum atas kematian Amrozi cs, akhirnya penulis ajukan dalam sebuah seminar yang baru-baruini (25/11/2008) diadakan oleh "World Fatwa Management And Research Institute" di Malaysia. Dalam seminar tersebut, Profesor Wahbah Zuhaily, seorang akademisi *syari'ah* dari Universitas Damascus Suriah menyatakan bahwa, bagaimanapun, perilaku bom Bali tidak dapat dibenarkan. Dari jawaban ini, penulis juga belum mendapat kepuasan. Walau secara literal, jawaban dari professor tadi bias dibenarkan. Akan tetapi, dalam ranah jihad, persoalannya tidak sebatas pada pengertian teks, namun juga sangat perlu mengetahui konteks. Dari sinilah sebenarnya dealektika ilmu fiqh. Menurut Yusuf al-Qaradawy, dalam bukunya *Taysir al-Fiqh Li al-Muslim al-Mu'asir Fi Daw'i al-Qur'an wa al-Sunnah*, factor realitas dalam kajian fiqh tidak boleh dianggap sederhana, karena fiqh harus berkaitan dengan realitas. Hal ini, menurut Abu Yasid, berdasarkan fakta sejarah yang menunjukkan bahwa para ahli hukum Islam selalu memperhatikan realitas masyarakat dalam mengembangkan pola konklusi hukum. Ini dapat dimaklumi, sebab penempatan hukum sesuai konteks realitas adalah bentuk lain dari penerapan nilai-nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam (Abu Yasid, 2005).

Kesulitan dalam memformulasikan persoalan hukum jihad yang bermakna perang, memang agak sedikit rumit, karena sangat sarat dengan konteks realitasnya. Tapi, pertimbangan konteks realitas semata dalam rujukan kesimpulan hukum juga akan mengarah kepada liberalisasi hukum, mengingat realitas memiliki pelbagai rekomendasi hukum yang mengakibatkan relativitas. Akhirnya, hukum bersifat nisbi yang tidak memiliki kekuatan normatif. Jika demikian, hukum tidak lagi membawa sifatnya yang boleh memaksa, dihormati dan sakral. Jadi, dalam hal ini, *term* jihad tidak boleh lari dari teks normativitas dan juga tidak boleh mengabaikan konteksrealitas.

Dalam membincang konklusi hukum atas kematian Amrozi cs, maka perpaduan antara teks dan konteks harus diperhatikan secara komprehensif dan detail. Karena dari sanalah akan dapat menangkap

kesimpulan hukum. Namun, sayangnya, sebelum menemukan pengertian jihad secara original, *term* jihad seolah terperangkap dalam sebuah dilematika yang cukup akut. Opini dunia selalu menggiring ide publik, bahwa ajaran jihad dalam Islam seolah identik dengan tindakan terorisme. Pembusukan opini dunia terhadap *term* jihad akhirnya menyamakan definisinya. Sehingga dalam konteksnya, orang yang berjuang demi tegaknya kemurnian agama, melawan ketertindasan, dan memerangi ketidak-adilan menjadi tertuduh sebagai teroris, sementara para teroris sebenarnya, yang selalu menindas, memerangi bangsa lain dan bahkan membunuh ribuan nyawa manusia, dianggap sebagai pahlawan.

Dalam kondisi yang seperti ini, maka kematian Amrozi cs, boleh jadi sebagai akibat dari perjuangan kebenaran dalam ruang medan yang keliru, seperti ungkapan Fahmi Huwaidi "*jundullah fi makrakat al-ghalat*" tentara Tuhan dalam medan perang yang salah". Atau sebuah kebenaran yang masih disembunyikan oleh kekuasaan Tuhan. Karena terkadang, banyak kebenaran justru diketahui bukan saatnya terjadi, tetapi setelah peristiwa tersebut digenggam oleh sejarah.

Yang jelas, ketiga manusia itu adalah makhluk biasa yang tidak terlepas dari segala kekurangannya. Namun, dalam senyum terakhir mereka, seolah ingin mengatakan kepada kita semua, bahwa "kami mati terbunuh bukan karena peledakan bom Bali, karena belum cukup fakta membuktikannya, tapi kami mati karena adanya rekayasa global dan kepentingan politik lokal". Jika demikian, maka hukuman mati terhadap mereka adalah sebuah kezaliman. Karena dalam Islam, dilarang melaksanakan eksekusi mati kecuali sudah berdasarkan bukti yang pasti. Seperti sabda Nabi "*idra'u al-hudud bi al-subuhat*" hindari pelaksanaan hukuman eksekusi dengan bukti yang masih samar.

Ambiguitas ISIS

Bincang ISIS (*Islamic State of Iraq And Syiria*) menjadi topic trendi yang banyak menghiasi bincang media dewasa ini. Gerakan yang mengusung term Negara Islam (*Dawlah Islamiyah*) atau *Khilafah* ini seolah secara tiba-tiba menghiasi isu sekaligus jagalan obral media secara nasional, dan bahkan Internasional. Padahal, di tengah hiruk pikuk opini tentang kegaduhan politik nasional, dunia juga sedang diguncang oleh kelakuan genosida bangsa biadab Israel di Gaza. Isu ISIS seolah dilahirkan secara ‘caesar’ yang tidak jelas target dan tujuan dalam perspektif kebangsaan dan keagamaan Islam.

Di tengah gempita tentang berita ISIS tersebut, wujud organisasi yang mengusung “Negara Islam” ini bermetamorfosa dari sekedar opini tentang komunitas kecil yang berjuang dengan idealisme ‘keliru’ yang mereka yakini, selanjutnya menjadi kabar tentang sebuah kekuatan ideologi yang seram dan sangat menakutkan. Akhirnya, hamper sulit dipisahkan, antara pemberitaan ISIS sebagai pembelajaran tentang “salah-kaprah”nya pemahaman keagamaan Islam yang *rahmatan lil-alamin* dengan menjual ISIS sebagai komoditas penyempurna dari proyek *Islamophobia*, seperti yang selama ini memang sedang digaungkan. Ujungnya, opini ISIS bersinergi dengan berbagai kekuatan anti Islam yang memang memiliki agenda jangka panjang sesuai arahan Samuel Huntington dalam proyek “Benturan Peradaban” (*Class of Civilization*) yang telah digagasnya.

Lantas, siapadan apasebenarnya ISIS tersebut? Agaktidak mudah untuk ‘menguliti’, apalagi dengan spontan mengkategorikannya sebagai organisasi Islam yang ‘sesat’. Mengingat, identitas ISIS terasa masih tergolong “misteri”, karena dalam beberapa rujukan yang merangkum tentang organisasi dan gerakan keislaman yang pernah ada di dunia decade ini, nama dan entitas ISIS justru tidak ditemukan. Dalam beberapa *maraji*’ (sumber) yang banyak mengupas tentang organisasi dan gerakan Islam di dunia, misalnya buku *al-Mausu’ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Madzahib al-Mu’ashirah* (Ensiklopedi Ringkas Tentang Agama dan Mazhab Modern) terbitan organisasi Pemuda Muslim dunia (WAMY), bahasan ISIS atau embrionya tidak terungkap.

Di buku ini, gerakan yang mengusung term khilafah hanya Hizbut Tahrir (HT), sebuah organisasi pergerakan Islam yang digagas oleh Taqiyuddin al-Nabhani pada tahun 1952. Gerakan ini berpandangan, bahwa kembali tegaknya khilafah merupakan sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Namun, hingga sekarang, Hizbut Tahrir masih hanya berkutat dalam ‘*nasyr al-fikrah*’ (penyebaran opini) dan belum mengumumkan siapa yang didaulat untuk menjadi khalifah.

Kemudian buku *al-Furuq al-Islamiyah Baina al-Fikr wa al-Tatarruf* (Golongan dan Organisasi Islam Antara Pemikiran dan Radikalisme) yang ditulis oleh Jendral Hasan Shadiq, hanya menulis beberapa organisasi pergerakan yang menurutnya tergolong radikal, seperti Tanzim Jama’ah al-Takfir wa al-Hijrah, yang dicetuskan oleh Syukri Mustafa dari balik jeruji penjara di Mesir. Jamaah ini, meski dianggap radikal dan bahkan sempat dituduh melakukan berbagai tindakan kekerasan kepada petinggi negara Mesir, namun, hingga saat ini juga tidak mendeklarasikan siapa khalifah yang mereka bai’at untuk menjadi pemimpin besar umat Islam dunia.

Selanjutnya, dalam sebuah mahakarya hasil dari penelitian di Universitas Islam Madinah, *al-Tariq Ila Jama’at al-Muslimin* (Jalan Menuju Organisasi dan Gerakan Islam) karya Husain bin Muhsin bin Ali Jabir, penelitian tesis ini banyak menjelaskan tentang organisasi pergerakan Islam yang juga memiliki harapan akan hadirnya system kekhalifahan. Namun, menurut Husain, meskipun hamper semua

gerakan Islam itu menginginkan kembali hadirnya kekhalifahan, sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah dunia Islam, akan tetapi cara yang digunakan tetaplah mengacu kepada pola yang mulia, menyampaikan ide kekhalifahan dalam ruang pendidikan, kemudian menjauhkan orang-orang yang kontra dengan Islam untuk tidak mengotori hukum Islam.

Jika menyimak dari beberapa rujukan di atas, perwujudan ISIS dengan bentuk dan doktrin yang cenderung radikal, sebagai sarana untuk menegakkan sistem khilafah, memang tergolong fenomena baru bahkan aneh dalam dinamika pergerakan Islam. Meskipun, jika dilihat dari simbol yang digunakan dan jargon yang diperjuangkannya, sebenarnya, ISIS tidak sepenuhnya berseberangan dari *mainstream* kajian pemikiran politik Islam. Tapi, dengan menggunakan kekerasan, apalagi dengan melakukan pembunuhan, jelas itu semua tidak sejalan dengan konsep *wasathiyah* (moderat) Islam.

Bertolak dari perspektif di atas, wujud ISIS penuh ambigu dan patut dipertanyakan. Organisasi yang didirikan pada tahun 2006, sejak dini telah memproklamasikan Abu Bakr al-Baghdadi sebagai khalifah nya, kemudian menamakan komunitasnya sebagai *Daulah Islamiyah fi al-Iraq wa al-Syam* atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) atau Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) dan selanjutnya memiliki nama permanen Islamic State, memproklamasikan diri menjadi sebuah negara pada 9 April 2013. Mereka telah menguasai 400.000 km/persegi, yang meliputi Irak dan Suriah dan kemudian menjadikan Raqqa di Suriah sebagai ibu kota Negara.

Semenjak kemunculannya dan telah menguasai beberapa wilayah di Irak, keberadaan ISIS menyeruak menjadi sebuah fenomena heroik. Edward Snowden, mantan pegawai NSA Amerika Serikat menyatakan bahwa wujud ISIS merupakan ‘sarang lebah’ yang sengaja dibentuk oleh satuan Intelijen dari Inggris, Amerika Serikat dan Mossad Israel. Senada dengan itu, Yasmina Haifi—mantan *project manager* Cyber Security Center—di Belanda menjelaskan bahwa ISIS tidak ada kaitan dengan Islam. ISIS adalah bagian rencana Zionis yang sedang mencoba habis-habisan mencoreng nama Islam.

Namun, seorang pengamat dunia Arab, Fahmi Howaydi menulis dalam artikelnya “*Da’isy Baina Sakhafatain*” (ISIS, Antara Dua Kelemahan) yang berprediksi bahwa kemunculan ISIS, antara lain merupakan bagian dari ungkapan protes keras dan kemarahan golongan Sunni dan Kurdi Iraq atas kebijakan rasis Nuri al-Maliki dari golongan Syiah yang menggolongkan ISIS sebagai golongan teroris. Dari itu kemudian mereka mendirikan bentuk pemerintahan sendiri dengan system Khilafah. Sikap lain tentang ISIS, yang justeru secara resmi dikeluarkan oleh Persatuan Ulama Muslim sedunia (*Ittihad Ulama al-Muslimin fi al-Alam*) yang dipimpin oleh ulama kesohor Yusuf al-Qardawi, yang menyatakan, bahwa deklarasi system khilafah oleh kelompok kecil tertentu tidak memiliki konsekwensi secara syar’i, dan ini merupakan kebatilan karena tidak berpijak pada landasan dan realitas (*waqi’*) yang benar serta akan melahirkan banyak kemudaratan.

Sekarang, golongan ISIS sedang menjadi gosip populer yang fenomenal, bahkan bincang ISIS diucap oleh banyak pemimpin dunia, termasuk presiden SBY dalam pidato kenegaraannya. Sebegitu besarkah pengaruh ISIS di negara Republik Indonesia ini? Menolak mutlak doktrin anarkisme dan radikalisme serta terorisme dalam pola beragama merupakan kewajiban bagi setiap muslim, namun jangan sampai, opini ambigu ISIS mencuri pikiran sadar masyarakat kita, bahwa kelakuan serupa juga tengah terjadi di negara yang sedang merayakan HUT kemerdekaannya, serta pemaksaan dan penggiringan opini tentang ‘negatifnya gerakan Islam justru menjadi tontonan yang menina-bobokan umat. Karena, ketidaktahuan terhadap sesuatu akan menjadi musuh sejati yang pasti bagi setiap orang.

Sumber Bacaan:

Husen bin Muhsin bin Ali Jabir, *al-Tariq ila Jamaah al-Muslimin*, Dar al-Da’wah, Kuwait 1984.

WAMY, *al-Mawsu’ah al-Muyassarah fi al-Adyan wa al-Mazahib al-Mu’ashirah*, Riyad KSA.

Hasan Shadiq, *al-Furuq al-Islamiyah Baina al-Fikrwa al-Tatarruf*,
Maktabah al-Ussrah, Kairo 2002.

Republika, Snowden: *ISIS Bentuk Israel AS dan Inggris*, 1 Agustus
2014.

Fahmi Hiwaydi, *Da'isy Baina Syakhafatain*, al-Jazeera 8 Juli 2014.

www.qaradawi.net. *I'lan Fasil Mu'ayyan li al-Khilafah, BathilS-*
yar'an, 3 Juli 2014.

Kuda Troya Isu ISIS

Semenjak munculnya isu ISIS (*Islamic State In Iraq and Syria*) kepermukaan opini global, hamper semua pihak di dunia ini mengecam, mengutuk dan bahkan mengungkapkan kebenciannya dengan sumpah serapah. Luapan ungkapan emosi yang sedemikian geram itu dirasa wajar, atau bahkan menjadi keharusan, jika disejajarkan dengan perilaku kelompok ISIS yang Nampak begitu sadis dan ganas, sebagaimana yang selalu muncul di pelbagai media selama ini. Tapi anehnya, perilaku beringas ‘gerombolan’ ISIS tersebut mengeksploitasi dalil-dalil kitab suci Islam, dan mengidentifikasi diri melalui performa simbol-simbol keagamaan Islam sebagai alibi untuk membenarkan kelakuan bejat mereka.

Kemunculan ISIS dengan model ganas dan menggunakan symbol syiar Islam tersebut, sungguh naif dan sangat paradoks dengan nilai dan dogma Islam yang *rahmatan li al ‘alamin*. Dari sini kemudian menimbulkan syak wasangka yang sangat akut dari kalangan internal umat muslim. Siapa dan apa sebenarnya ISIS itu? Pertanyaan ini menjadi penting, sebab, berawal dari ISIS ini, melahirkan bias dan pelbagai efek domino yang sarat dengan rasa ketidakadilan bagi kalangan umat Islam. Cap ISIS yang berlabel kekerasan dan terror itu kemudian secara latah dijadikan legalitas pihak penguasa untuk memperangkapkan kelompok Islam ke dalam golongan yang radikal, ekstrim dan bahkan teroris.

Padahal, secara normatif, Islam sebagai sebuah dogma yang semenjak awalnya sangat anti dan menolak kekerasan, memberi ruang untuk berdialog dengan dogma syura, dan bahkan memberi kemerdekaan setiap individu untuk bersikap, termasuk dalam memilih keyakinan dan agama, sudah sangat cukup untuk menafikan pelbagai asumsi negatif tersebut kepada penganutnya. Tapi mengapa justru orang-orang yang mengimani Islam sebagai sebuah kebenaran agama dijebak secara acak dalam perangkap paradigm terorisme, radikal, ekstrimis dan teroris? Adakah isu ISIS itu menjadi “KudaTroja” sebagai justifikasi stigma yang berujung pada pelabelan umat Islam sebagai ekstrim, radikal dan teroris tersebut?

Kehadiran ISIS dalam dinamika percaturan politik negara Timur Tengah, terutama setelah bergemuruhnya gerakan reformasi negara-negara Arab (*Arab Spring*), memang menimbulkan pelbagai spekulasi dan asumsi. Betapa tidak, kelompok yang secara tiba-tiba muncul dengan berbagai kekuatan persenjataan dan dengan jargon khilafah-nya itu, justru menjadi isu sentral yang tidak hanya eksis di panggung politik dunia Arab, tapi juga menjadi tema strategis yang seakan mengancam stabilitas dunia global.

Penamaan singkatan ISIS yang berasal dari *Islamic State in Iraq and al-Syam* itu, merupakan terjemahan dari bahasa Arab *al-Daulah al-Islamiyah fi al-Iraq wa al-Syam*. Tapi menurut *Associated Press* dan *AS*, golongan ini disebut sebagai *Islamic State in Iraq and The Levant* (ISIL). Dalam istilah umum yang digunakan media negara Arab, ISIS itu populer dengan sebutan *Da'isy* yang menunjukkan arti dari tiga huruf dalam sebutan itu, yaitu huruf *dal* yang berarti *daulah* (negara), *'ain* yang berarti Irak dan *syin* yang berarti Syam (Syiria). Penamaan ini sekaligus menunjukkan lokasi lahir dan wilayah kelompok ini bergerilya melakukan agresinya.

Menurut Fahmi Howaidy, seorang jurnalis senior Arab yang sekaligus pengamat politik Timur Tengah, embrio lahirnya ISIS berawal dari aqidah *Salafiyah Jihadiyah* yang dikembangkan dari organisasi al-Qaeda di Afganistan. Wujud kelompok ini kemudian menjadi lebih eksis di kawasan Irak setelah adanya ekspansi tentara

Amerika Serikat tahun 2003 ke negara yang dipimpin Saddam Husein tersebut.

Lebih jauh dari pandangan Fahmi Howaydi tadi, Andrew Thompson dan Jeremi Suri dalam sebuah artikel di *New York Times* berjudul *How America Helped ISIS*, bahkan berasumsi, bahwa cikal bakal radikal golongan ISIS ini berawal dari militer AS yang dinilai semena-mena terhadap rakyat Irak, kemudian menangkap siapa saja yang dianggap ‘membahayakan’, baik dari mantan militer Saddam Hussein atau kelompok militan. Ekspansi durjana militer AS itu bahkan telah memenjarakan sekitar 26 ribu orang, bahkan ratusan ribu warga Irak pernah mendekam di balik jeruji besi. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, sebagian mereka yang dianggap teroris banyak dihukum mati. Namun banyak tahanan masih mendekam di penjara saat kelompok-kelompok yang menjadi cikal bakal ISIS berhasil membebaskan mereka usai menguasai beberapa daerah di Irak.

Keberadaan organisasi ISIS mulanya bertujuan untuk memayungi berbagai front yang sedang berjuang di Irak dan Syria. Abu Mush’ab al-Zarqawi seorang yang berkebangsaan Yordania menjadi pelopor pertama berdirinya organisasi “Negara Islam” ini, khususnya untuk front yang berada di kawasan Iraq. Sepeninggalnya al-Zarqawi pada tahun 2006, kepemimpinan beralih ke Abu Hamza al-Mohajir yang kemudian juga tewas di ujung peluru tentara AS pada tahun 2010. Setelah itu, *tauliyah* ‘khalifah’ dimandatkan kepada Abu Bakr al-Baghdadi, berdasarkan hasil musyawarah dewan Mujahidin yang berada di Iraq. Setelah bergabungnya *Jabjah al-Nusrah* (Font Kemenangan), yaitu suatu front yang sedang berjuang di Syria, wujud *daulah islamiyah* (Negara Islam) itu kemudian melebur dalam satu komando dengan nama Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). Walaupun, koalisi dengan *Jabjah al-Nusrah* yang berada di Syria pada akhirnya pecah, dikarenakan ada tindakan di dalam front dianggap sudah keluar dari koridor pemahaman jihad seperti yang diajarkan Islam.

Dalam versi yang lain, menurut Martin Golf, seorang pengamat Timur Tengah seperti yang diungkapkan dalam media *The Guardian*

di Inggris, embrio lahirnya ISIS berawal dari pertemuan rahasia pada musim semi (*rabi'*) antara utusan intelijen Syria dengan pentolan *Daulah Islamiyah* di daerah el-Zabdany di sekitar Damaskus pada tahun 2009. Pertemuan rahasia ini difasilitasi oleh orang-orang partai Ba'ats Iraq yang melarikan diri ke Syria setelah jatuhnya presiden Saddam Husein. Jadi, lahirnya kebrutalan kelompok ISIS tidak lepas dari peran partai Ba'ats yang pernah lama menjadi penguasa di Iraq maupun Syria.

Terlepas dari sumber mana yang lebih valid mengurai kebenaran kelompok ISIS itu, keragaman pendapat tersebut menunjukkan adanya kekaburan asal muasalnya, sehingga menambah kebingungan tentang entitas ISIS yang sebenarnya. Lantas, mengapa isu ISIS di tanah air begitu heroik, sehingga seolah menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara Indonesia. Adakah ISIS memiliki cabang gerakan dan telah melakukan aksinya di negara ini?. kesaksian ini sangat merisaukan, mengingat isu ISIS sudah mempengaruhi kebijakan pemerintah, khususnya kepada umat Islam yang menghuni mayoritas Republik Indonesia ini. Pemblokiran berbagai situs Islam, dicegahnya nama Muhammad dan Ali keluar masuk dari *autogate* bandara Internasional Soekarno Hatta, dua contoh kebijakan 'membingungkan' ini sudah cukup membuktikan adanya korelasi bias isu ISIS dalam kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, kebijakan untuk memproteksi gerakan ISIS itu tidak memiliki standar dan definisi yang jelas tentang radikal, sehingga, alih-alih menghentikan dan mengantisipasi bahaya radikal ISIS, tapi justru melahirkan sikap apriori dan bahkan mungkin menimbulkan goncangan sosial di tengah umat.

Apriori umat tentang langkah penanganan ISIS di negeri ini dirasa *ma'qul*, karena arus *mainstream* pengelola negara periode ini terkesan ingin menegaskan simbol dan peran Islam dalam system bernegara, seperti wacana penghapusan kolom agama dalam KTP, penghapusan SKB 3 Menteri soal pendirian rumah ibadah, bahkan sampai pada pengawasan khutbah Jum'at. Dari *qarinah* (indikasi) itu, isu ISIS dijadikan "KudaTroya" sebagai pintu masuk pemberian stigma radikal kepada gerakan keagamaan Islam di level kenegaraan.

Tujuan akhirnya adalah menegaskan peran dan symbol keagamaan Islam itu di ranah publik, atau lebih ekstremnya, isu ISIS menjadi racun yang mematikan embrio serta tunas potensi Islam menguasai ranah kekuasaan Negara.

Jika benar asumsi di atas tadi, maka gerakan *Islamophobia* dan liberal semakin mendapatkan ruang untuk mengeksisikan perannya di ruang negara, karena lampu hijau telah dinyalakan oleh penguasa. Juga, berkat stigma 'Islam radikal' itu, umat muslim yang berfaham sekuler semakin mendapat justifikasi, bahwa Islam itu cukup sebagai pegangan norma individu yang hanya pantas mengurus rumah ibadah semata. Apabila *shahih* demikian, mari kita angkat tangan untuk mentakbirkan empat kali kondisi negara Islam yang terluas di muka bumi ini.

Sumber Bacaan:

<http://www.dakwatuna.com//www.dakwatuna.com/2014/06/30/53863/asal-muasal-isis-dan-perkembangannya/#ixzz3WgUZWplUdiunduhtgl> 8 April 2015.

Fahmi Huwaidi, *Daisy Fi Masr*, Koran al-SabilJordania 19-2-2015.

Memahami Islam

Sebagai dogma transenden, penutup dari semua *risalah* Rasul, Islam merupakan ajaran yang universal dan integral. Keuniversalan ajaran Islam terletak dalam ajaran-ajarannya yang tidak hanya membatasi nilai ajaran hanya kepada pemeluknya semata, namun juga bisa dan boleh direalisasikan bagi golongan *outsider* yang *notabene*nya tidak meyakini kebenarannya. Kemudian, keintegralan Islam berada dalam ajarannya yang menyentuh semua dimensi kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan pertahanan.

Namun, universalitas dan Integral ajaran Islam tersebut seolah hanya pengakuan yang tidak realistis, mengingat kondisi realitas umat justru berbalik arah dari cita-cita ajarannya. Dari sini kemudian letak 'kegalauan' Muhammad Qutb, sehingga beliau menulis sebuah buku yang menggelitik dengan judul *hal nahnu muslimun* (apakah kita benar-benar muslim?). judul buku yang berbentuk pertanyaan tersebut berangkat dari dua rumusan; bagaimana generasi awal muslim memahami Islam dan bagaimana seharusnya kita memahami maknanya?

Dua rumusan pertanyaan di atas seolah menggugat kesadaran pemahaman kita selama ini terhadap Islam. Jika kita bersikukuh pada pertanyaan pertama dengan jawaban 'sama', maka selanjutnya timbul pertanyaan lain, lantas mengapa di zaman awal Islam penuh dengan kemajuan pengetahuan, tingginya moralitas dan bahkan

sampai Islam memimpin peradaban manusia sejagat raya. Agaknya dari pertanyaan ini, Amir Sakeb Arselan dalam *Masterpiece*-nya memuat pertanyaan yang kemudian dibuat menjadi judul buku '*Limaza Taakhhar al-Muslimunwa-Taqaddama Ghairuhum*' (mengapa umat muslim mundur dan umat yang lain maju?).

Memang, pemahaman terhadap sesuatu akan mengakibatkan seseorang lebih mengerti tentang sesuatu itu. Lebih mengerti yang akhirnya lebih menghayati, ditambah lagi dengan dogma keimanan yang selanjutnya terjadilah sinkronisasi dan keselarasan antara pemahaman dan tindakan. Bukankah Rasul telah menyatakan "keimanan bukan dengan berangan-angan dan berbasa-basi, akan tetapi iman itu adalah yang bersemayam dalam hati kemudian direalisasikan dengan amal (*laisa al-iman bi al-tamanniwa la bi al-tahalli, walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal*).

Persoalannya sekarang adalah, sejauh mana seorang muslim telah memahami agamanya dan kemudian merealisasikannya dalam kehidupan nyata? jangan-jangan selama ini umat muslim baru sebatas belajar tentang agama, baru belajar tentang Islam, namun belum memahami tujuan dan fungsi agama dengan sebenarnya. Jika demikian adanya, maka tak heran muncul orang-orang yang belajar tentang agama namun berperilaku jauh dari ajaran agama. Adakah ini yang disinyalir oleh Rasul, '*alim al-lisan wa jahil al-qalb*? yaitu orang yang bicaranya begitu fasih, tapi hatinya buta? Atau yang memiliki sederet gelar keagamaan namun justru merusak agama, na'uzubillah. **Wallahu a'lam**

Mengukuhkan Islam Politik

Gemuruh suasana Pemilu, setiap periodenya selalu menggenderang. Pertarungan politik dalam menggaet massa ketika memasuki masa Pemilu terjadi begitu sengit dan bahkan menganulir rasa malu. Dalam kalkulasi politik, semua kesempatan menjadi ruang halal yang mesti dipergunakan untuk mendekati rakyat, karena dalam medan demokrasi yang dianut bangsa Indonesia sekarang ini suara rakyat merupakan “suara Tuhan” yang akan menitahkan siapa pemangku kekuasaan lima tahun kedepan.

Dalam konteks itu, maka sangat relevan jika membuka lagi lembaran Islam politik di Indonesia, karena jumlah muslim yang mayoritas akan selalu menjadi standar awal dalam mengambil kesimpulan akan korelasi Islam sebagai doktrin agama dan politik sebagai alat menuju kekuasaan. Eskalasi pertarungan politik di bumi pertiwi seolah tidak bias lepas dari perbincangan hubungan agama dan politik, khususnya Islam dan kekuasaan. Hal ini karena, populasi muslim tidak mungkin tercerabut dari bumi Indonesia, bahkan ada ungkapan “Indonesia ada karena adanya umat Islam, dan Islam mayoritas, karena adanya Indonesia”.

Dalam ruang globalisasi, menurut al-Ba’labaki, manusia seakan menjadi masyarakat yang satu (*al-qaryah al-‘alamiyah*), sehingga jarak tempat antar manusia menjadi tidak berarti. Globalisasi yang kemudian melahirkan zaman modern ini memungkinkan setiap manusia itu untuk berinteraksi dengan sesamanya tanpa lagi

terhalang oleh pelbagai sekat, baik oleh adat istiadat, budaya dan bahkan agama. Rambu-rambu adat, budaya dan bahkan agama seakan menjadi urusan privat yang tidak perlu lagi mengurus persoalan publik. Artinya, hukum agama tidak lagi dijadikan *common law* yang akan mengatur lalu lintas interaksi antara sesama manusia dalam satu negara. Hukum agama hanya berlaku dalam kehidupan setiap individu, sesuai dengan agama yang diyakini. Hukum agama tidak diberlakukan menjadi hukum positif negara, kerana akan dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, juga akan dituduh akan melahirkan kesan, bahwa agama mayoritas dalam sebuah Negara akan menjadi “hakim” dan penentu akan kebijakan publik, dan hal seperti ini akan mendapat tantangan, bahkan akan menimbulkan perpecahan yang berujung pada disintegrasi sebuah negara bangsa (*nation state*).

Disamping itu juga, adanya klaim bahwa semua agama dianggap memiliki nilai-nilai substansial yang universal, nilai-nilai itu tidak hanya dimonopoli oleh satu agama, akan tetapi semua agama mempunyai nilai-nilai kebaikan yang memiliki tujuan yang sama antara satu dengan yang lain. Hal inilah yang menurut John Hick, bahwa sejatinya semua agama adalah merupakan manifestasi-manifestasi dari realitas yang satu. Dengan demikian semua agama adalah sama, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Isu ini kemudian dikenal dengan adanya istilah pluralisme agama. Isu ini berangkat dari pendekatan substantif, yang mengungkung agama dalam ruang (*privat*) yang sangat sempit, dan memandang agama lebih sebagai konsep hubungan manusia dengan kekuatan sakral yang transendental dan bersifat metafisik ketimbang sebagai suatu system sosial.

Pemahaman seluler liberal seperti di atas di era global sekarang ini, seolah member kesimpulan bahwa agama harus terpisah dengan negara. Dengan alasan ini, maka muncul istilah negara sekuler. Menurut Abd Wahab al-Masiry, sekuler memiliki dua pemahaman, *pertama*, sekuler yang parsial (*‘ilmaniyah juziyah*) yang berarti hanya memisahkan agama dengan negara (*fasl al-din ‘an al-daulah*). Kedua, sekuler yang global (*‘ilmaniyah syamilah*), yang berarti

memisahkan segala nilai-nilai kemanusiaan, akhlak, dan agama dari segala kehidupan manusia. Sejalan dengan Masiry, Naquib al-Attas menyatakan bahwa sekularisasi menghapus kuat kekuasaan agama sebagai lambing penyatu kebudayaan. Dia merupakan suatu gerak-daya sejarah yang lambat laun tapi pasti akan membebaskan masyarakat dan kebudayaan dari ikatan pengawalan agama dan pandangan alam yang ‘tertutup’—yakni merupakan yang lengkap serta tetap dan kekal.

Sebagai dogma transenden, Islam tidak semata cakupan akidah, bukan pula semata ibadah spiritual, bukan sistem ekonomi, sosial dan politik, akan tetapi Islam merupakan sistem hidup (*manhaj hayat*). Agama Islam bersifat universal yang tidak mengenal istilah parsialisasi dalam ajarannya. Di sini adagium “*shari’ahsaleh li kulli zaman wamakan*”menjaditerm yang tepat, kerana Islam selalu sejalan dengan karakter kehidupan manusia secara umum, dan agama Islam selalu sesuai dengan fitrah manusia dan keberadaannya. Keyakinan inilah yang secara praktis mengamini Islam politik. Politik merupakan bagian dari instrument keberagamaan dalam merealisasikan ajaran agama.

Pandangan ini menurut Schacht misalnya, seperti yang dikutip Qardhawi, menyatakan bahwa Islam lebih dari sekedar agama, karena Islam juga mengandung pandangan-pandangan hukum (*qanun*) dan politik. Secara umum, bahwa Islam adalah sistem budaya yang lengkap yang mencakup agama dan negara secara bersamaan. Ungkapan ini juga diamini oleh ‘gerbong’ pemikir orientalis yang lain seperti V. Fitzgerald, C.A. Nallino, R. Strothmann dan D.B Macdonald.

Integrasi Islam dan politik, seperti nyata telah menjadi konsensus para ulama dan pemikir muslim. Pemahaman integrative tersebut, berangkat dari amalan Rasul bersama sahabatnya di Madinah yang mengandung sisi politik, meskipun dari orientasi dan landasannya bersifat agama. Meskipun, menurut Abd Raziq, bahwa Nabi Muhammad SAW tiada lain kecuali Rasul yang hanya berdakwah untuk agama Islam semata, bukan untuk kekuasaan dan bukan untuk mendirikan Negara. Pendapat Abd Raziq ini jelas tidak

benar, kerana Nabi disamping menyampaikan risalah Islam kepada umatnya juga sebagai seorang penguasa yang bertugas melaksanakan hukum-hukum Islam. Inilah kali pertama pemerintahan Islam yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sesudah beliau.

Dari ulasan di atas, maka konsepsi agama versus politik, lebih khususnya Islam dan kekuasaan, merupakan hal yang tidak perlu dipertentangkan di bumi Indonesia. Konsepsi ini menjadi signifikan di ranah kekinian, mengingat dalam memasuki arena pemilu, khususnya Pemilu 2009, isu pemetaan dan pengkotakan Islam versus nasionalis, sekuler versus religious seringkali dihembuskan. Obralan isu ini jelas tidak akan menguntungkan bagi bangsa Indonesia, karena hanya akan menguras energy anak negeri secara sia-sia.

Maka untuk kedepan, jalan yang tepat bagi anak bangsa adalah mengukuhkan Islam politik dalam arti sesungguhnya, yaitu menerapkan perdamaian, menegakkan keadilan dan membumikan nilai-nilai kemanusiaan. Lantas, perahu politik mana yang siap mengusung nilai idealitas ini? Mari menjawab bersama dengan melihat realitas, kemudian menanyakan secara jujur jawaban intuisi dalam hati nurani kita yang tidak akan pernah berdusta.

Wallahua'alam

Religiusitas Partai Politik

Hingar binger politik selalu menjadi *icon* menarik. Eskalasi politik senantiasa mencuat dalam menuju rubric isu panas di pentas kekuasaan negeri ini. Seolah bincang politik selalu ‘memukau’ dan mewacana dalam segala level social masyarakat. Hampir semua orang *ogah* ketinggalan informasi politik. Seolah ritme politik telah menjadi irama goyangan *lisan* di setiap topic perbincangan.

Memukaunya isu politik bahkan telah membius kesadaran akan esensi berpolitik. Kesadaran berpolitik semata hanya terlukiskan dalam hak politik yang tercermin dari kebebasan berpendapat, berekspresi dan persamaan hak dalam merenggut kursi kekuasaan. Dengan demikian, esensi politik menjadi kabur, bahkan menyimpang dari *khittah*-nya. Memang, *khittah* politik menjadi sangat nisbi, karena tidak satupun sikap politik yang bebas dari “virus” kepentingan. Bahkan, dengan kepentingan itulah terwujudnya rahim politik. Hasilnya, politik melahirkan sifat-sifat yang tidak lagi berdasarkan moral dan agama. Berpolitik menjadi bebas nilai, karena ada kepentingan yang mendominasinya, bahkan kepentingan itulah yang menjadi rujukan nilai politik. Dimana, kapan, dan bagaimana kepentingan itu bias terwujud, maka politik diformat sesuai birahi kepentingan itu.

Hal inilah yang menjadikan politik memiliki kadar magnetis yang luar biasa, karena rayuan kepentingan yang banyak diakomodasi oleh kekuasaan terlihat begitu sangat menjanjikan. Realitas empiris

telah kasat mata mempertontonkan perilaku politisi, yang dengan kekuasaannya mampu meraup modal kekayaan yang luar biasa, mendapat fasilitas kehidupan yang serba mewah yang seakan lebih terhormat, terpendang, dan dibutuhkan oleh segala *level* social masyarakat.

Kenyataan sikap berpolitik seperti di atas tidak terlepas dari paradigam hedonisme yang tengah mewabah di masyarakat. Wabah hedonistic tersebut menyebar tularannya ke pelbagai dimensi kehidupan. Bahkan telah bersenyawa dengan dinamika social masyarakat. Sehingga standard kebaikan segala hal diukur dari dimensi keduniaan. Sedangkan unsure keakhiratan menjadi urusan personal dan bahkan harus dipenjarakan dalam jeruji privasi. Akhirnya, agama tidak lagi menjadi orientasi dari politik. Agama harus terpisah dari politik, dan politik diharamkan untuk intervensi terhadap agama. Jadi, agama dan politik menjadi dualitas yang tidak lagi searah.

Walau demikian, agama tidak dapat ditinggalkan secara total, mengingat modal capital politik kekinian bertumpu pada komunitas massa, dan agama menjadi alat yang paten dalam membius massa. Maka akibatnya, agama hanya dijadikan “daun salam” dalam masakan sayur politik. Ketika memasak dan agar selalu enak, maka bumbu daun salam disertakan, tapi ketika ingin menyantap makanan, daun salamnya disingkirkan. Begitulah kira-kira analogi posisi agama dan politik kekinian. Walau sesungguhnya keharusan politik dan agama menjadi dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk diceraikan. Agama menjadi pilar dan norma politik, sedangkan politik menjadi kendaraan dan cara dalam menerjemahkan kemauan titah agama.

Dalam konteks politik modern, partai merupakan institusi yang legal dalam menerjemahkan kemauan dan kepentingan politik. Bahkan, partai dianggap sebagai cara yang modern dalam mengarungi pergulatan dunia politik. Dalam *mausu'ah al-siyasiyah* (ensiklopedi politik) yang diterbitkan oleh Lembaga Studi dan Pengembangan Arab (*al-Muassasah al-Arabiyah li al-Dirasatwa al-Nasyr*), partai politik (Parpol) merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki orientasi ideology politik

yang sama kemudian mereka bergabung dalam sebuah organisasi untuk mewujudkan program dan cita-cita politik yang mereka anggap realistis dalam merebut kekuasaan di tempat mereka berdomisili. Pengertian Parpol ini berangkat dari realitas masyarakat sekarang yang hamper menyeluruh menyalurkan ragam aspirasi politiknya melalui Partai (*al-hizb*).

Jika dikorelasikan dengan istilah keagamaan, pengistilahan Partai (*al-hizb*) dalam kajian keislaman bukanlah barang baru. Bahkan menurut Muhammad Imarah dalam bukunya *Hal al-Islam Huwa al-Hill*, istilah partai (*al-hizb*) bukanlah hasil produk asing yang diadopsi secara *sembrono* oleh peradaban pemikiran Islam, akan tetapi memiliki argumentasi yang transendental. Hal ini karena dalam kitab suci al-Qur'an terdapat ayat yang menggunakan kata *hizb* dan *ahzab* (QS al-Ahzab: 22 & al-Maidah: 56). Penggunaan kata *hizb* dalam al-Qur'an tidak hanya berkonotasi negatif, tapi juga bermakna positif. Juga, di dalam hadits nabi terdapat pula penggunaan istilah *hizb*, bahkan dengan ungkapan *hizb Muhammad*.

Terlepas dari maksud kata *hizb* di atas, pengistilahan partai memiliki legalitas keagamaan, walau penerjemahannya ke ranah realitas sangat beragam, malah tidak beragama. Akan tetapi, jika ditilik dari substansi Parpol secara akademis, maka Parpol memiliki tugas yang sama dengan dakwah, yang *notabenenya* sebagai media dalam mengembangkan dan mempertahankan agama. Bahkan 'berparpol' seharusnya merupakan bagian dari institusi keberagaman yang terlembaga dalam dakwah.

Secara akademik, dakwah memiliki beberapa pengertian seperti *al-nida* (memanggil), *al-du'a* (menyeru, memohon) atau suatu upaya untuk menarik manusia menuju suatu aliran atau agama tertentu. Akan tetapi, dalam realitas paradigm umat, ungkapan dakwah juga memiliki nasib yang serupa dengan politik. Kata dakwah terjajah ke dalam kubangan pengertian yang sangat parsial, yang sudah terpola menjadi suatu perbuatan yang hanya identik dengan ceramah, pidato, *kultum* dalam bentuk oratif lain yang berisikan ayat-ayat al-Qur'an atau hadits. Jadinya, ruang dakwah menyempit pada momen tertentu dan bahkan menjadi

ajang hiburan yang penuh lelucon. Paradigma dakwah seperti ini bahkan telah membudaya, sehingga tidak jelas *juntrung* orientasi capaiannya.

Inilah persoalan dan letak penyakitnya. Padahal, dakwah memiliki pengertian dan ruang lingkup yang sangat luwes juga luas. Intinya, dakwah adalah mengajak orang lain ikut bersama, bersatu dalam satu orientasi kesefahaman atau kesadaran akan tugas dan kewajiban sebagai hamba Tuhan. Artinya, dakwah bias dilakukan dengan politik dan bahkan berpolitik menjadi wajib strategis dalam berdakwah. Jika berdakwah berarti mengajak umat kepada kebaikan, maka berpolitik merupakan suatu perilaku yang harus selalu mengarah kepada kemaslahatan umat, maka konsekuensinya politik mesti terorganisir, teratur dan terarah, dan partai merupakan penerjemahan organisasi politik (orpol) untuk karcis kekuasaan secara sah dan modern.

Dalam negara modern, partai merupakan zona berpolitik yang konstitutif dan legal. Berpartai berarti mengakui kewajiban dan hak politik juga menyalurkannya secara elegan dan bertanggung jawab. Namun, penerjemahan partai di ranah politik mengerucut menjadi tiket menuju terminal kekuasaan. Di terminal inilah semua kepentingan, baik ideologi, budaya, dan agama berjibaku dalam menuju kekuasaan. Tak jarang, kata haram terkubur dan sirna ketika goyangan kursi kekuasaan telah menggoda.

Keinginan partai menduduki kekuasaan dilindungi selama masih dalam *role of game* konstitusi. Dengan demikian, partai Islam memiliki kapasitas besar dalam meraih kekuasaan, dan di ruang ini letak strategisnya pelebagaan dakwah dalam suatu partai politik.

Dari beberapa argumentasi di atas, agaknya sangat rasional untuk menjadikan politik yang berbentuk partai sebagai bagian dari instrument dakwah. Politik dijadikan alat berdakwah agar kepentingan-kepentingan dakwah bias diakomodir dalam politik. Maka menjadi kelaziman bagi seorang muslim untuk mendakwahkan Islam melalui politik, bukan justru sebaliknya, menjadikan dakwah sebagai instrument lipstick politik yang akhirnya dakwah hanya menjadi titian penyebrangan menuju kekuasaan. Jika itu yang ada,

maka itulah oportunist medakwah yang barangkali tidak memiliki perbedaan dengan kemunafikan. Begitukah bukan? **Wallahu a'lam.**

Menegaskan Identitas Ulama

Baru-baru ini, ada peristiwa yang cukup istimewa bagi tradisi keilmuan Islam di Jambi, dimana tradisi keilmuan seperti itu hampir sudah jarang terdengar dalam budaya ulama di tanah Melayu ini. Peristiwa istimewa yang laik direkam sejarah tersebut terangkum dalam acara “Silaturahmi Ulama dan Pimpinan Pesantren Se-Provinsi Jambi” yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Modern al-Hiayah (PPM al-Hidayah) Pal 10, (9/12/2013). Keistimewaan acara tersebut bukan hanya terletak pada upaya sinergisitas dan penyamaan persepsi ulama tentang solusi penyelesaian problematika umat, namun juga terjadi *munazarah (sharing)* dalam *bahtsul masa-il* yang membahas pelbagai permasalahan keumatan, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun *mu’amalah* (sosial).

Selang sehari berikutnya, (10-12/12/2013) penulis juga menghadiri acara forum ulama yang sangat prestise, dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang bertempat di Gedung MUI Provinsi Jambi. Acara ini menjadi lebih bergengsi mengingat para peserta merupakan pentolan ulama yang mewakili setiap daerah kab/kota dalam Provinsi Jambi.

Meski terkesan sederhana, acara yang mengusung tema; Pemantapan Program, Konsolidasi Organisasi dan Perbaikan Akhlak Bangsa, Pemberdayaan Ekonomi Umat Menuju Jambi Emas 2015, merupakan perhelatan rutinitas yang cenderung seremoni. Namun,

berkumpulnya ulama Jambi dalam rumah MUI ini tentu memiliki banyak makna, dan menyimpan harapan besar umat, mengingat kontribusi ulama sangat diharapkan, bukan hanya terhadap persoalan *ubudiyah*, namun juga dalam merespon tantangan zaman yang selalu dinamis dan berkembang.

Kedua 'gawe' ulama seperti dalam perhelatan di atas, sekilas menjadi *signal* akan adanya ketersambungan harapan umat melalui peran aktif para ulama terhadap dinamika kekinian, terutama yang berhubungan dengan persoalan sosial keagamaan. Hal ini menjadi sangat penting, karena ulama nyaris dianggap absen dari dinamika itu, bahkan terkesan terisolir dari peran otoritas sosial yang semestinya.

Padaahal, keberadaan ulama dalam dinamika kehidupan masyarakat muslim, menurut Thoha Hamim, secara sosiologis dituntut kehadirannya memberi legitimasi teologis terhadap totalitas kehidupan umat. Ulama yang kemudian menjelma menjadi kelompok *elit* agama dalam realitasnya seringkali mengendalikan kehidupan masyarakat muslim, dan kemudian dengan keahlian mereka dalam bidang ilmu keagamaan Islam, memerankan *elit* agama ini menjadi regulator bagi segala dimensi kehidupan, mulai dari moral, pendidikan, ekonomi, hukum sampai sosial budaya.

Dalam perspektif keimanan Islam, wujud aktif ulama ditengah umatnya merupakan pewaris tahta para nabi (QS Fatir 28). Dari itu, para ulama memiliki kewajiban laiknya tugas para Rasul dalam menyampaikan *risalah* (ajaran) mulia agama, dan selanjutnya mengimplementasi nilai-nilai mulia itu dalam kehidupan nyata, sesuai perintah dan praktek yang telah dilakoni para Rasul yang tersimpan dalam sabdanya "*ballighu 'anni*" (sampaikan dariku) meskipun hanya satu pesan (*ayat*).

Dari sinilah kemudian, Imam al-Ghazali dalam karya monumentalnya *Ihya 'Ulumuddin* memberi analogi relasi ulama dengan umatnya bak seperti tongkat dengan banyangannya (*al-'ud wal al-zil*) atau seperti kanvas tanah dengan lukisan. Perumpamaan ini jelas sekali menggambarkan bahwa, kondisi sosial keagamaan masyarakat saat ini merupakan potret dari entitas ulama-nya.

Ulama seolah tongkat yang tentu akan memberi efek bayangan, yang bagaimana mungkin bayangannya akan lurus, jika tongkatnya bengkok.

Ilustrasi relasi ulama dan umatnya seperti gambaran al-Ghazali tersebut sepertinya cocok dengan realitas kekinian sekaligus juga menggelitik. Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan kembali bahwa absennya ulama menjadi suatu sebab akutnya problematika sosial masyarakat .

Dari sini kemudian, wujud MUI menjadi signifikan dan absah, karena dianggap representasi ulama yang lintas sektoral, yang mewakili pelbagai komunitas institusi keumatan yang hidup ditengah masyarakat. Akan tetapi, ketika identitas keulamaan itu menyatu dalam komunitas dan terlembaga, kadang menimbulkan pelbagai pertanyaan yang agak musykil, seperti standar kualifikasi apa yang bisa memberi label keabsahan seseorang itu bisa “dianggap” ulama? Selanjutnya otoritas apa yang dimiliki para ulama itu sehingga klausul rekomendasi Rakor itu bisa direalisasikan dan bersinggungan langsung dengan kebutuhan umat?

Beberapa pertanyaan sederhana tadi yang kemudian menggelinding ke permukaan publik, menggelitik untuk didiskusikan dan dicari jawabannya secara bijaksana. Munculnya pertanyaan tersebut, hemat penulis, setidaknya karena beberapa persoalan; Pertama, ketidakjelasan proses regenerasi dan rekrutmen anggota MUI itu sendiri. Juga, proses pengkaderan ulama yang masih sangat kabur, sehingga efek berikutnya mengaburkan kualifikasi kepantasan menyandang gelar keulamaan itu. Sebagai akibatnya, identitas MUI sendiri sebagai lembaga yang menamakan diri institusi (*majlis*) ulama masih bisa dianggap bermasalah dan bahkan mungkin diragukan. Jika demikian, maka *output* kerja dan hasil Rakor MUI bisa mentah sekaligus cacat etika, karena jika identitas awalnya sudah bermasalah, jelas produksi hasilnya juga bermasalah.

Kedua, ketidakjelasan status MUI dalam sistem kenegaraan, yang mengakibatkan lemahnya otoritas yang dimilikinya. Sepintas, keberadaan MUI hampir sama dengan Institusi Fatwa (*Dar al-Ifta*)

yang ada di berbagai negara muslim. Namun, posisi MUI dalam sistem negara berbeda dengan Institusi Fatwa tersebut, karena Institusi Fatwa seperti di Malaysia misalnya, diakui sebagai bagian dari stuktur negara, sehingga memiliki otoritas dan wewenang di bidang fatwa yang selanjutnya direalisasikan oleh negara. Lain halnya dengan MUI yang keberadaannya mirip dengan Ormas keagamaan yang tidak lebih sebagai lembaga “moral” sehingga tidak memiliki posisi yang jelas dalam struktur negara. Konsekuensinya, keberadaan MUI penuh dilema, wujudnya tidak begitu penting, namun ketiadaannya begitu dirindukan. Ketidak-pastian status MUI ini menempatkannya pada posisi “*muzabzab*” yang seringkali membuatnya tidak berdaya, tidak independen yang ujungnya hanya menjadi stempel legitimasi kekuasaan, karena posisinya sebagai tangan dibawah yang terkesan “memelas” dari kebijakan pemerintah.

Dua persoalan musykil terhadap identitas ulama tadi, semestinya menjadi perhatian bersama sebagai warga negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Karena perhelatan ulama seperti dalam dua kegiatan tadi, paling tidak sudah menunjukkan bahwa para ulama dan intitusi keagamaan tidak absen dari realitas problematika sosial umatnya. Dan sudah seharusnya pula, ulama menjadi penentu kebijakan dalam kerangka mencari formulasi kemaslahatan umat dan negara. Bukankah selama ini, ulama menjadi bagian dari pengurai berbagai krisis ditanah air, seperti ungkapan Fahmi Huwaidi, *al-ulama mafatih al-azamat* (ulama sebagai kunci penyelesaian krisis), bukan seperti “daun salam” dimasukkan ke dalam masakan hanya untuk penikmat rasa, selanjutnya dibuang ketika mau disantap. ***Wallahu ‘alam.***

Maulid di Tengah Krisis Keteladanan

Perayaan Maulid seakan telah menyatu dengan budaya, sehingga menduduki posisi penting dalam keberagamaan muslim di Indonesia. Ritualitas maulid yang berangkat dari paradigme keagamaan "cinta" Rasul bagi seorang muslim itu, seolah menjadi tampilan formal dari kualitas pemahaman seseorang terhadap ajaran inti agama Islam, karena konten mauleid sudah pasti membicarakan sosok seseorang yang bernama Muhammad bin Abdillah, tokoh yang melegenda dalam keyakinan imam kaum muslimin sekaligus juga figur yang sangat berpengaruh dalam sejarah manusia.

Muhammad bin Abdillah, itulah nama yang paling *masyhur* sejagad. Nama yang sampai hari ini, bahkan sampai masa mendatang akan selalu paling populer, dalam ruang dunia selebritis. Bahkan nama itu melebihi semua nama yang dimiliki oleh makhluk sejagad. Popularitas nabi Muhammad SAW seolah tidak pernah menemui kata penutup bagi tinta sejarah dalam merekam jejaknya. Segala tingkah laku, tutur kata dan perjuangannya senantiasa menjadi acuan dalam tindakan manusia. Rekam jejak nabi Muhammad SAW menitikkan keteladanan yang melampaui sekat kesukuan, kebangsaan dan bahkan keagamaan. Sehingga sampai hari ini, biografi (*sirah*) nabi terakhir ini (*khatam al-nabiyin*) paling banyak ditulis oleh umat manusia.

Ragam tulisan biografinabi Muhammad SAW mencakup semua dimensi dan sudut pandang keilmuan, baiekonomi, sosial, politik,

budaya dan kemanusiaan. Dengan demikian, Anis Mansur, pemikir sekaligus budayawan Mesir, menaruh judul buku-nya *A'zam al-Khalidin* (pembesar-pembesar yang abadi) dengan menempatkan sosok nabi Muhammad sebagai pembesar pertama di antara nama pembesar dunia lainnya. Kebesaran nabi Muhammad, menurut Anis, karena beliau adalah satu-satunya manusia di jagad ini yang paling sukses, baik pada tatanan keagamaan maupun keduniaan.

Pelbagai karya tentang kepribadian nabi Muhammad SAW itu tidak hanya digoreskan oleh para ulama Islam yang *notabene*-nya pemangku warisan risalah beliau. Akan tetapi, ada cukup banyak karya yang diukir oleh kurir tinta pengingkar dan oposisinya. Hilal Gorgun dalam website *lastprophet.info*, mencoba merekam banyak karya para orientalis yang mencoba menganalisa sosok Rasul tersebut. Dalam tulisannya yang berjudul "*The Orientalist View of Prophet Muhammad*" Gorgun menyebutkan karya Montgomery Watt "*Muhammad at Madina*", yang menjelaskan bahwa sebagai tokoh besar dalam sejarah, nabi Muhammad adalah tokoh yang paling banyak dicemari namanya. Masih banyak lagi karya orientalis tersebut seperti *Refutation du Coran Confutatio Alcorani* yang ditulis oleh Nicetas Byzantium pada abad ke 9 M, juga *Chronographia* yang ditulis oleh Theophanes (758 - 816).

Ragam perspektif, motif dan bahkan keyakinan berbagai penulis dan sejarawan, telah memmeriahkan sekaligus memperlengkap catatan-catatan kepribadian Rasulullah tersebut, sehingga wujud nabi Muhammad SAW yang telah sirna dari alam fana, seolah dapat diilustrasikan kembali dalam kenyataan. Gambaran kepribadian Rasul selalu menjadi rujukan yang dirindu kehadirannya dalam segala ruang waktu dan zaman. Sehingga semua problematika kemanusiaan sampai hari ini, bahkan untuk masa mendatang, seolah telah terakomodasi dalam sabda Rasul. Dinamika kehidupan manusia dalam lintas waktu, rasanya sangat sulit untuk tidak menoleh kepada perilaku nabi Muhammad, karena sosok kenabian dan kerasulannya memang telah dipersiapkan oleh Pengutusnyanya (Allah SWT) untuk menjadi *problem solver*, pengayom dan penerang bagi kehidupan anak cucu Adam. Di sinilah letak relevansi jawaban Aisyah RA

ketika ditanya oleh para sahabat tentang perilaku Rasulullah, seperti apakah akhlak nabi Muhammad SAW itu? Dengan bahasa yang lugas, Aisyah RA mengungkapkan "*kana khuluquhu al-Qur'an*" (akhlaknya adalah al-Qur'an), sebagaimana juga termaktub dalam firman Allah SWT "*wainnakala'alakhulukazim*".

Dalam bingkai keindonesiaan, bincang tentang keteladanan Rasul SAW sudah menjadi bagian dari ritualitas budaya yang telah berurat berakar. Bulan Rabiul Awal seakanterhipnotis oleh ritual maulid yang tidak boleh absen dari agenda tahunan umat, bahkan telah menjadi ritual beberapa negara yang berpenduduk mayoritas muslim, sehingga pada tanggal 12 Rabiul Awal dijadikan hari cuti nasional.

Tentu dalam perspektif keagungan seorang utusan Tuhan, pengadaaan pelbagai ritual hingga keputusan cuti nasional sebagai perlambangan akan cinta kepada baginda Rasul, rasanya juga belum sangat memadai, karena perjuangan nabi Muhammad SAW tidaklah sebanding dengan formalisme cuti tersebut. Bahkan, seremoni peringatan maulid justru tidak jarang mengaburkan substansi perjuangan dan *risalah* yang dibawabeliau, baik dalam realitas kemanusiaan maupun dalam bingkai kerasulan.

Dalam bingkai kemanusiaan, misalnya, bagaimana sikap Rasul yang sangat *care* terhadap eksistensi manusia, bahkan sampai kepada jasad manusia sekalipun. Seketika jenazah seorang Yahudi melintas di hadapannya, maka Rasul berdiri sebagai penghormatan atas jasad manusianya.

Dalam perspektif kerasulan, ada banyak hal yang sangat urgen untuk ditelaah kembali dalam kegiatan seremonial *maulid al-rasul*. Seremonial maulid yang sejatinya tidak semata ritualitas yang pada akhirnya terjerumus kepada pengkultusan dan bahkan cenderung *taqlid* buta kepada budaya, adat istiadat dan bahkan meniru ritual agama selain Islam, merupakan kecelakaan sejarah dalam menerjemahkan pesan kerasulan Muhammad SAW. Pesan maulid yang seharusnya merekatkan kembalipemahaman parsialitas masyarakat tentang Islam, justru semakin samar. Kesan maulid di tengah masyarakat hanya tercitrakan dengan syair-syair kitab

barzanji yang ditulis oleh ulama asal Kurdistan (*al-barzanjiyah*) yang bernama Sayid Ja'far bin Husain bin Abdul Karim al-Barzanji.

Kitab Barzanji yang berjudul asli "*I'qd al-Jawhar fi Mawlid al-Nabiy al-Azhar*" karangan ulama kesohor tersebut, isinya sangat bersentuhan dengan kehidupan Rasul, baik *hikayat* beliau dilahirkan, keluarga sampai kepada akhlak moral. Namun, sangat disayangkan, *bait-bait* syair indah dalam kitab tersebut hanya sekedar lantunan hiburan yang miskin akan makna spiritualitasnya. Penerjemahan seremoni mauled kedalam ruang "ritualitas" sangat mungkin merupakan bagian dari parsialitas pemahaman Islam tadi, karena berkesannya hari kelahiran Rasul seolah bentuk lain dari perayaan "*happy birthday*" walau dipoles dengan irama verbalistis religius. Padahal, substansi dari perayaan maulid, selain aktualitas cinta secara verbal, mengenang kepribadian dan perjuangan Rasul, juga bagaimana menerjemahkan keteladanan pribadi beliau ke dalam segala dimensi kehidupan manusia kekinian.

Bertolak dari fakta tersebut, akhirnya para ulama berbeda pendapat tentang perayaan "ritual" maulid Nabi. Dari yang berpendapat sangat literal sampai kepada asumsi rasional, dari yang berargumen *bid'ah* hingga yang berasumsi *sunnah*. Misalnya, Ibn Hajar berasumsi bahwa perayaan mauled belum dikreasikan pada era pertama Islam, sedangkan Jalal al-Din al-Suyuthi berasumsi bahwa seremoni mauled sudah ada semenjak kelahiran Rasul. Dengan *hujjah* bahwa kakek baginda nabi, Abd al-Muthalib dan nabi sendiri merayakannya sebelum era kerasulan. Pendapat lain dari Abd Rauf Uthman, yang menyuguhkan bahwa perayaan maulid "dipatenkan" oleh penguasa Dinasti Syiah Fathimiyyah di Kairo sebagai media *aproac* kepada rakyat. Namun ada juga yang berasumsi bahwa perayaan mauled berawal dari inovasi Shalahuddin al-Ayubi sebagai injeksi ruh jihad kepada prajuritnya dalam menghadang pasukan salibis.

Terlepas dari mana yang paling benar dari pendapat di atas, yang jelas semua sepakat bahwa kepribadian Rasul sebagai *uswah hasanah* telah diabadikan Tuhan dalam al-Qur'an. *Uswah hasanah* tersebut jelas tidak tereliminasi dalam ranah yang sempit, parsial,

apatah lagi harus terkungkung dalam wilayah seremonik. Hal ini selaras dengan argumen Said Hawwa dalam bukunya *al-Rasul*, yang menjelaskan empat sifat esensial para Rasul itu. *Pertama*, kejujuran mutlak yang tidak akan pernah dibatalkan dalam kondisi apapun. Karena itu, ungkapan para Rasul akan selalu bersenyawa dengan ranah realitas. *Kedua*, sikap konsistensi yang total terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Sang Pengutusnyanya. Dari sini, perilaku seorang Rasul sangat mustahil keluar dari *rule* yang telah digariskan Tuhan. *Ketiga*, kontinuitas penyampaian kandungan *al-risalah* (wahyu) secara integral walau harus menghadapi pelbagai tantangan. *Keempat*, kecerdasan yang brilian, karena penyampain wahyu akan mengalami stagnasi jika tidak sepadan dengan rasionalitas umat. Semua *muwasafat* (karakteristik) Rasul ini merupakan elemen dasar dari kepribadian Rasul dengan tanpa mengesampingkan karakteristik yang lain.

Jadi, peringatan maulid yang telah menjelma menjadi ritual tersebut, jelas bukan sekedar menceritakan keindahan fisik Rasul, keagungan akhlak, kepaiawaian kepemimpinan, dan keagungan risalah yang dibawa oleh beliau, akan tetapi semestinya semua itu menjadi cermin bagi umatnya dalam mengaca perilaku kehidupan. Sudahkan ritual itu menjadi standar keberagamaan yang selalu dievaluasi, atau hanya lipstick dari ungkapan bibir yang tidak pernah beriringan dengan kebijakan perilaku keseharian kita? Jangan-jangan ritual mauled hanya drama paradoksal yang dipentaskan di saat krisis keteladanan. Nauzubillah! ***Wallhu'alam.***

Kebenaran dan Kekuasaan

Suatu kenyataan yang sampai saat ini masih menjustifikasi, bahwa magnetisme kekuasaan masih berdaya tarik tinggi dalam mengait peminatnya. Kekuasaan seolah menyihir semua manusia, sehingga terhipnotis oleh kilau singgasana yang begitu menjanjikan. Inilah sebuah kenyataan ambisius manusia, sehingga kitab suci al-Qur'an melegendakannya dengan sebutan yang miris, *innahu kana zaluman jahula*, sungguh manusia itu berada dalam kezaliman dan kebodohan yang nyata.

Betapa tidak, antagonism perilaku kekuasaan menjadi tontonan yang memilukan. Seolah, singgasana kekuasaan menjadi hak milik personal, sehingga antara pemangku kekuasaan dan umat yang menitahkan kuasa terdapat batas, bahkan ada jarak yang sangat menganga. Kekuasaan seolah menjadi pagar sekaligus tembok pemisah dari umatnya. Kekuasaan menjadi *tasyrif* (kemuliaan) yang sangat elitis dan borjuis, diblokir oleh mereka yang memiliki modal. kaumatas, ningrat dan berdarah biru. Bagimereka, kekuasaan seolah berbentuk harta yang harus diwariskan kepada keturunan atau kroni yang bias menyelamatkan segala “kepentingan” di masa mendatang.

Kekuasaan tidak lagi bersifat *taklif* (tanggung jawab) yang dipandang sebagai amanah yang mesti dipertanggungjawabkan kepada Allah dan umat. Sehingga wujud kekuasaan yang semestinya menjadi penyangga kebenaran justeru beralih fungsi menjadi “dalang” dalam menetaskan kezaliman. Padahal jika kekuasaan dan

kebenaran bersatu, ia akan melahirkan kekuatan dalam menegakkan keadilan.

Namun jika kebenaran terpisah dari kekuasaan, maka kekuasaan akan menjadi sumber kezaliman, dan kebenaran menjadi makhluk lumpuh yang terkurung dalam jeruji kekuasaan. Dengan demikian, kebenaran hanya menjadi retorika dari kepentingan-kepentingan penguasa. Dari sini timbul adagium, kebenaran hanya milik otoritas kekuasaan bukan kebenaran otoritas. Akibatnya, penguasa memangsa rakyat sendiri. Penguasa tidak ubahnya seperti senjata yang memangsa tuannya.

Realitas kekuasaan seperti ini, dengan sendirinya akan memposisikan statusnya sebagai raja, majikan dan penguasa yang memerlukan orang-orang yang tamak, oportunistis, penjiat dan pragmatis. Acuan dari kekuasaan seperti ini bukanlah kebenaran, tapi keuntungan yang memberhalakan segala bentuk kebendaan. Maka, secara konstan para penguasa dalam lingkaran ini bersifat hipokrit yang menggunakan rumus “tiada kawan yang abadi, karena yang abadi hanyalah kepentingan”.

Anehnya, rumus machiavelistik tersebut seolah mendapat tempat dalam ranah paradigm politik rakyat. Area kekuasaan sepertinya memang telah dituliskan untuk bersahabat akrab dengan sekulerisme yang memisahkan diri dari norma moral keagamaan. Jadinya, konsep teoritik kekuasaan yang berlandaskan norma agama, tergolong menjadi barang antik yang sungguh mewah di ranah kenyataan. Syahwat kekuasaan begitu menggoda untuk membuang jauh-jauh kejujuran, kebijaksanaan dan kebenaran. Sebagai akibatnya, dalam kamus kekuasaan sekarang yang benar itu pendusta, yang cerdas itu hipokrit, dan yang selamat itu oportunistis.

Agama seolah dijadikan dalil dalam menjauhi kekuasaan plus anti politik. Gemuruh kekuasaan seolah berteriak, “jika berpegang pada agama, maka jauhi kekuasaan dan politik”. Biasanya, faham aneh menuturkan “agama cukup sebatas persoalan individual antara manusia dan Tuhan semata”. Dengan demikian, kebenaran dalam kebijakan penguasa bukan bertolak ukur dari maslahat agama, namun berangkat dari kepentingan penguasa dan kroninya.

Jika demikian, Wacana etika dalam kekuasaan hanya diperagakan ketika member sambutan acara keagamaan sebelum menduduki tahta. Etika agama hanya mampudi terjemahkan pada retorika dalam ruang yang sempit, seperti rumah ibadah, majelis ta'lim dan ritualitas keagamaan lainnya. Etika tidak mampu menjamah uang dan kekuasaan. Dampaknya, etika yang bernafaskan agama, hanya menjadi lipstik dan alat propaganda angin surge belaka. Hal ini terlihat, ketika mencalonkan diri sebagai penguasa, sejuta janji terucap, penuh basa-basi, mengunjungi rakyat kecil, terjun langsung kebawah dan seabrek pekerjaan mulia dipublikasikan. Tapi ketika kekuasaan sudah dalam genggaman, semua janji terlupakan, berdiam diri dalam istana kekuasaan, rakyat kecil hanya menjadi tumbal politik, dan kebijakan hanya berpihak kepada kaum elit dan konco kekuasaan.

Setumpuk cerita antagonis kekuasaan barangkali tidak cukup untuk diuraikan dalam jangka waktu yang sebentar. Cerita antagonis itu sebenarnya tiada lain dari bentuk kealfaan dan kebodohan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Karena pemilihan penguasa di negeri ini terlanjur mengamini kecurigaan teori Barat terhadap kekuasaan, bahwa negara dan kekuasaan secara mutlak mempunyai potensi untuk diselewengkan, dengan itu patut disediakan ruang bagi rakyat untuk mengkritisi dan menghadang kesewenang-wenangan kekuasaan tersebut.

Secara teoritik tentu hal itu tidaklah salah, namun dalam kenyataannya rakyat terjebak dalam perangkap jeratan pecandu kekuasaan, sehingga lupa bahwa tugas mulia untuk mengontrol penguasa telah ditukar dengan opsi godaan-godaan yang seketika. Akhirnya, kebenaran penguasa menjelma dalam otoritas kekuasaan yang menyelimuti kepentingan mereka. Kebenaran penguasa diukur dari seberapa banyak tumpukan kekayaan, jumlah kroni yang menjabat dan kebijakan membangun tempat hiburan. Sedangkan kebenaran rakyat hanya menjadi slogan keadilan yang sepi dari kenyataan.

Kini saatnya kebenaran dalam menentukan penguasa diukur dari seberapa jauh maslahat keagamaan itu dapat diketengahkan.

Harapannya agar kekuasaan dan kebenaran bias seiring, sehingga meretaskan kekuatan dalam menegakkan keadilan. Jikapun itu menentukan penguasa nanti, sulit rasanya “mengawinkan” kekuasaan dan kebenaran, maka jenjang kategori prioritas dalam penentuan tentunya layak untuk dilaksanakan. Itusemua bertujuan, untuk menghindari dari kualifikasi terpilihnya pemimpin terburuk dari yang terbaik. Karena, walaupun tidak mungkin ada pemimpin yang paling baik, paling tidak ada usaha dan ikhtiar memilih penguasa yang terbaik dari yang terburuk. ***Wallahu ‘alam***

Abdi Negara *vis a vis* Abdi Kekuasaan

Pada lingkaran pemerintahan, isu *reshuffle* selalu menjadi isu yang menggema. Dalam dinamika organisasi, apatah lagi organisasi pemerintah, *reshuffle* pejabat yang mendiami ‘singgasana’ tertentu merupakan hal biasa terjadi. Terlepas dari pelbagai alasan yang terkesan apologis, *reshuffle* menjadi jawaban telak dan seakan ‘hargamati’ untuk membenahi pelbagai problematika pemerintahan. Walaupun untuk menghapus kesan politis dari *reshuffle* tersebut sulit untuk dihindarkan. Bau ‘amis’ tendensi politik dari bungkus *reshuffle* terlanjur menjadi stigma bahkan paradigm masyarakat. Bukankah ‘politik balas jasa’ cukup menyengat aroma penciuman kala pergantian kepemimpinan hingga jual beli jabatan tertentu sudah menjadi rahasia umum?.

Dalam tulisan ini, sebagai rakyat pinggiran, penulis tentu tidak kapabel untuk mengusut kebenaran itu, karena tugas *usut-mengusut* itu sudah diamanatkan kepada Kejati, KPK atau yang lain, yang lebih profesional dan ‘berkepentingan’. Namun tulisan ini terusik oleh beberapa kalimat yang kerap disampaikan oleh para pemimpin ketika melantik jajaran pembantunya. Kalimat itu sangat sederhana, namun memiliki nilai bobot “kepada semua pihak sebagai **abdi negara** dan abdi masyarakat, agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan yang diberikan baik pelayanan di bidang administrasi pembangunan, administrasi pemerintahan maupun administrasi kemasyarakatan.

Pengistilahan *abdi Negara* kepada pejabat yang dilantik agaknya sangat menggelitik. Karena dalam analisis sosiologis, pemilihan terhadap nama atau ungkapan tertentu dapat dipastikan menunjukkan adanya maksud yang dipunyai oleh orang yang memilihnya. Menurut Ali Syari'ati, melakukan analisis terhadap suatu kata, acapkali diperoleh petunjuk yang amat berarti; dengan mengamati barang sejenak terhadap akar suatu nama, bisa diperoleh dorongan pada langkah-boleh jadi akan mengantarkan kita untuk sampai kepada suatu konsep tertentu dan menjadikan kita mampu menemukan prinsip ilmiah. Dengan merenungi suatu kalimat tertentu, anda bisa sampai di dunia yang amat jauh, tersembunyi dan penuh misteri.

Berangkat dari analisa di atas, hemat penulis langkah berikutnya yang berada dalam ungkapan abdi negara yang kadang terkesan sepele, namun cukup memiliki nilai bobot yang sangat prestisius dan sarat makna positif. Secara esoterik, ungkapan *abdi negara* mengandung nilai keikhlasan, pengabdian dan ketundukan. Ini artinya, bahwa seorang pejabat pemerintah harus benar-benar memiliki nilai-nilai perjuangan dengan penuh keikhlasan, walaupun terminology keikhlasan tidak berarti bekerja tanpa pamrih. *Term* keikhlasan bisa selalu senyawa dengan orientasi kerja yang semata menjadikan pangkat dan jabatan yang diamanahkan kepadanya sebagai suatu ibadah.

Dengan demikian, jika jabatan menjadi lahan dalam beribadah, maka lazimnya jabatan itu tetap selalu dalam koridor kebenaran, kejujuran dan keteladanan. Bila ibadah menjadi spirit dan sugesti seorang pejabat dalam mengemban amanahnya, maka jabatan itu tidak akan menjadi lahan arogansi, tapi menjadi motivasi. Tidak terjebak pada area pongah, tapikh *idmat*. Dari sinilah khalifah Mu'awiyah bin Abi Sofyan bias *legowo* ketika menerima ungkapan dari rakyatnya "*assalamu'alaikaa yyuha al-ajir*"(selamat atasmu wahai pembantu).

Sementara ungkapan kekuasaan secara literal mungkin tidak berbeda dengan kata jabatan atau pemerintahan. Tapi istilah kekuasaan terkadang lebih berkonotasi pada hal yang agak sedikit

miris dan destruktif. Karenanya, ungkapan penguasa lebih terkesan tiruan, status quo dan otoriter. Hal ini atas asumsi pada padanan ungkapan kekuasaan dengan kata *al-sulthah* dan *al-imarah*, juga sering terdeng arungkapan “daulat penguasa” yang lebih cenderung menempatkan seorang penguasa memiliki kedaulatan dengan sepenuhnya.

Ungkapan ini seirama dengan teori kedaulatan yang dikemukakan oleh Jean Bodin pada abad ke-16. Menurut Bodin, kedaulatan itu adalah kekuasaan yang mutlak dan kekal dalam suatu republik. Kedaulatan—masih menurut Bodin—meski sudah mengalami bermacam-macam perubahan tafsiran, tapi semua tafsiran itu bertujuan untuk membenarkan kekuasaan politik dari orang-orang atau golongan yang berkuasa dalam suatu negara.

Dari uraian di atas, ungkapan ‘abdi kekuasaan’ jelas sangat kontras dan *vis a vis* abdi negara. Karena abdi negara selalu menempatkan kekuasaan sebagai pasilitas (*watsilah*) bukan tujuan (*ghoyah*). Abdi negara senantiasa mengedepankan nilai-nilai moral dan kemaslahatan umat. Sebaliknya, abdi kekuasaan menghambakan diri pada kekuasaan dan jabatan. Segala cara menjadi ‘legal’ untuk dilakukan demi untuk meraih jabatan dan kekuasaan itu. Ini tak ubahnya dengan pesan ‘mantra’ Niccolo Machiavelli yang telah banyak menyihir para pemangku jabatan di negeri ini.

Untuk melanggengkan kekuasaan, Machiavelli berpesan; “adalah baik untuk berpura-pura mempunyai belaskasih, berkemanusiaan, jujur dan beragama. Sangat perlu untuk memperlihatkan kanseolah-olah ia memiliki isifat-sifat baik tadi. Tapi memiliki sifat itu dan senantiasa menerapkannya sebenarnya berbahaya. Berpura-pura mempunyainya adalah berguna. Hendaklah menyesuaikan diri kemana angin bertiup dan tidak menyimpang dari apa yang baik bila mungkin, dan dapat berbuaah jahat bila terpaksa”. **Wallahualam**

Menyoal Islam Radikal

Kajian tentang Islam nampaknya semakin hari mengalami eskalasi yang sangat menggembirakan. Pelbagai profesi dalam lintas disiplin keilmuan merasa *greget* untuk ambil bagian dalam bincang tentang Islam. Tentu semua itu memiliki persepsi dan cara pandang yang berbeda sesuai *background* keilmuan yang dimiliki, sehingga menimbulkan keragaman persepsi tentang agama *samawi* terakhir ini.

Keragaman persepsi tentang Islam sebenarnya sah-sah saja, karena Islam memang agama universal (*kamil*) dan integral (*syamil*) yang tidak membatasi diri pada lingkaran penganutnya *ansich*, tapi juga cukup terbuka bagi *the other* untuk memperbincangkannya.

Dalam ranah kekinian, wacana Islam sering kali ‘teridentifikasi’ sebagai dogma yang stagnan. Teks dogmatis Islam dipandang tidak dapat berinteraksi dengan konteksnya. Hingga terkesan hanya sebagai wahyu yang selalu melangit. Dengan demikian, Islam harus diinterpretasikan sesuai kebutuhan-kebutuhan zaman.

Untuk kebutuhan inilah, perlu mengklasifikasi Islam sesuai varian-varian keberagamaan yang ada dalam komunitas Islam dalam ruang kekinian: Sehingga pelbagai label keislaman mencuat kepermukaan opini public dengan beragam nama dan *embel-embelnya* sebut saja misalnya; Islam radikal, liberal, fundamental, revival yang semua ini acap kali diidentifikasi sebagai Islam ekstrem dan teroris. Sebagai rivalnya, sebutan lain darivariantiadalah Islam

modernis, humanis, reformis yang selamainiseringdielukan dengan stigma toleran, moderat, tidak tekstual data selalu bersahabat:

Pada dasarnya pengistilahan dan polarisasi Islam seperti di atas tidak pernah ada dalam sejarah abad pertama Islam, karena Islam yang diterjemahkan oleh nabi Muhammad SAW dari kitab suci al-Qur'an adalah agama rahmat bagi alam semesta (QS:21:107), *din* juga agama yang maha sempurna (QS:5:8). Menurut Hasan al-Banna (1906-1949); kesempurnaan Islam terletak pada ajarannya yang universal, yang bahasannya mencakup semua level dan lini kehidupan, baik *daulah* (negara), *hukumah* (pemerintahan), *ijtimaiyah* (kemasyarakatan), *khuluqiyah* (moral), *'adalah* (keadilan), *tsaqafah* (pengetahuan), sampai *tsarwah* (kebendaan).

Namun seiring perjalanan sejarah secara factual polarisasi Islam seperti varian-varian di atas, tumbuh dan berkembang. Hal ini mungkin dikarenakan kurangnya pemahaman yang jernih dan obyektif terhadap Islam sehingga menimbulkan faham Islam yang parsial. Pemahaman parsial terhadap Islam inilah yang selalu mengurung pemeluknya ke dalam ruang 'isme-isme' dan kadang terjebak pada kepentingan-kepentingan sesaat.

Pada sisi lain, polarisasi varian Islam lebih terkesan stigma yang 'dipaksakan' oleh Barat, terutama setelah terjadinya peristiwa Sabtu kelabu yang meledakkan WTC dan gedung Pentagon di AS. Pengistilahan varian Islam lebih cenderung dikelompokkan kepada dua kubu yang berlawanan, yaitu pihak kawan dan lawan. Bagi varian yang bersahabat dan bisa 'mengakomodasi' kemauan Barat, selalu mendapat sebutan reformis, modernis, dan toleran. Sebaliknya, yang terkesan tidak 'familiar' dengan pihak Barat, senantiasa mendapatkan label radikal, liberalis dan bahkan teroris, walau semua label itu tidak memiliki standar pemahaman yang jelas dan definisi yang konkrit. Bahkan sampai saat ini. Semua *embel* Islam tadi masih menjadi bola salju yang siap menggelinding di atas pelbagai kepentingan, baik ideology maupun politik.

Penulis sepakat, bahwa untuk meredam radikalisme, perbaikan ekonomi, penataan keadilan sosial serta pemberantasan korupsi menjadi hal yang sangat penting, karena buruknya kesejahteraan

sosial akan melahirkan sikap radikal. Hal ini seperti slogan Arab “*shout al-bathn a’la min shout al-dhumir*” (suara perut lebih nyaring dari suara nurani). Pemberantasan korupsi juga menjadi hal sangat urgen dalam meredam sikap radikal, karena tindakan korupsi merupakan sikap kesewenangan dan kepongahan pemangku kekuasaan yang selalu mempertontonkan arogansinya di hadapan rakyat jelata, sehingga melahirkan rasa kecemburuan sosial dan ketertindasan.

Namun, anggapan di atas, patut untuk dikritik, setidaknya dalam dua hal; *Pertama*, pengidentifikasian beberapa varian Islam di Indonesia ke dalam kelompok radikalisme seperti Hizb al-Tahrir, Majelis Mujahidin serta pesantren Ngruki yang dipimpin Kiyai Abu Bakar Ba’asyir. Menurut penulis – walau ada hal yang juga berbeda dengan mereka- identifikasi ini seakan menggiring opini public untuk menstigma varian tadi ke dalam kelompok yang harus ‘diwaspadai’ karena akan melakukan tindakan radikal. Di sini penulis tidak melihat standar apa yang digunakan dalam mengelompokkan beberapa varian ini pada grup yang berpaham radikalisme. *Kedua*, beragama secara ‘hitam putih’ akan melahirkan sikap radikalisme. Bagi penulis, pernyataan ini memperlihatkan bahwa pola pikir semacam ini telah terkontaminasi oleh konsepsi Barat dalam menyikapi Islam.

Karena menurut Majdi al-Hilaly dalam bukunya “*mawqif al-musyrikin min al-shahwah al-islamiyah*”, pihak Barat sering kali mengidentifikasi istilah radikal dengan seorang muslim yang berusaha mengaktualisasikan faham keberagamaannya secara menyeluruh. Istilah radikal dan beberapa embel lainnya sengaja dihembuskan Barat untuk mengaburkan nilai-nilai Islam.

Dalam Islam, memang ada ruang yang harus ‘hitam-putih’. Ruang ini lebih dikenal dengan *tsabat*. Ruang hitam putih (*tsabat*) terletak pada ketegasan hukum Islam yang *qat’I* yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. Ibn Qayyim dalam bukunya *ighatsat al-lahafan* membagi format hokum dalam Islam kepada dua bentuk. Pertama, format hukum yang tidak berubah dalam kondisi apapun baik oleh waktu, tempat maupun keadaan. *Kedua*, hokum

kondisional yang berubah sesuai masalah manusia. Pada ruang pertama, bagi pemeluk Islam dan beriman dituntut untuk konsisten terhadap dogma agamanya (QS:2451.54). Hal ini berarti dalam aktualisasinya harus hitam putih. Di sisi lain, ada ruang yang *murunah* tidak harus hitam putih. Ruang ini terdapat pada wilayah *ijtihad* dalam rangka mencari solusi terhadap semua perkembangan (*tathawwur*) yang bersinggungan dengan najaran Islam. Adanya ruang kosong (*mantiqah al-'afw*) yang sengaja disediakan oleh syari'at untuk memberi peluang kepada kaum intelektual untuk menggunakan kemampuannya guna mencari hal yang paling *ashlah* bagi umat manusia serta paling layak dan pantas sesuai kondisi zamannya. Upaya *ijtihad* ini tetap selalu memperhatikan *maqasid syari'ah* secara umum, serta mempedomani jiwa dan *nash-nash* yang pasti dan mapan (*al-muhkamat*).

Dengan demikian, keberagaman yang 'hitam putih' tidak harus berarti radikal, karena dalam Islam, memang harus ada yang di hitam putih-kan, terutama yang berkaitan dengan persoalan *aqidah*. Namun tidak berarti Islam menjustifikasi tindakan radikalisme, karena menurut Syeikh Yusuf Qardhawi dalam bukunya "*al-shahwah al-islamiyah Bain al-juhud wa al-tatharuf*" menjelaskan bahwa radikal (*tatharruf*) adalah *al-wuquf fi altharf* (berhenti di pinggir) tidak di tengah. Dengan demikian terus radikal lebih dekat kepada bahaya, kehancuran dan jauh dari rasa aman.

Dalam teks agama, radikal sering dibahasakan dengan *al-ghuluw* dan *al-tanattu'*. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam sangat menentang tindakan radikalisme. Sekarang menjadi jelas, bahwa menjalankan agama seutuhnya tidak termasuk pada sikap radikal karena radikalisme memang bukan ajaran Islam. **Wallahu 'alam**

Ulama atau Umara'

Bincang tentang Nahdlatul Ulama agaknya selalu menarik. Bagaimana tidak, organisasi keagamaan yang sering disingkat NU ini, konon, merupakan organisasi keagamaan yang sangat kultural dan memiliki anggota terbanyak dibanding ormas serupa di dunia ini. Walaupun mungkin data riil keanggotaannya masih sangat layak untuk dihitung' lagi. Tapi, bagaimana-pun NU merupakan suatu fakta sosial dalam realitas keragamannya mengambil warna keberagaman di tengah masyarakat Indonesia yang memang heterogen.

Secara sederhana, dan filosofi namanya, organisasi NU melambang kanadanya sebuah kebangkitan (*nahdhah*) kaum ulama, sekaligus juga mengindikasikanadanyasebuah*harakah*, perjuangan dan militansi para ahli agama dalam memformat masyarakat sesuai aturan-aturan idealitas agama. Sehingga, dipandang perlu menyusun barisan yang `serentak bak galah, serengkuh bakdayung' dalam desain organisasi yang lebih modern yang bernama NU. Tidak ada yang salah dalam nama NU itu, bahkan cukup bergengsi pada zamannya, mengingat NU lahir disaat umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, sedang berada dalam cengkraman kolonialisme Barat.

NU terlahir dari rahim nusantara yang sedang terjajah, sehingga logis kalau nama *nahdhah* mengandung aroma perjuangan. Akan tetapi, sesuai dinami kasejarah yang tidak statis, NU pun

berkolaborasi dengan waktu, sehingga ada hal-hal yang harus di *cek-up* sesuai dengan nafas zaman, agar NU tetap selalu menjadi 'rumah' para ulama yang kemudian selalu mencerahkan stagnasi pengetahuan agama umat dan tetap menjadi perisai yang selalu melindungi umatnya dari segala ancaman bencana moral.

Dalam konteks kekinian, membincang NU menjadi momentum yang tepat (*furshah syanihah*) untuk mendiagnosa penyakit umat, khususnya masyarakat 'awam'. NU memiliki kesempatan. dan upaya Strategi untuk mengevaluasi kinerja ulama dalam mengimami umatnya. Sejauh manakah peran ulama, -khususnya ulama NU- dalam membentengi umat dari segala pengaruh keberagamaan? Adakah capaian-capaian yang telah diraih sehingga perlu dioptimalkan, atau terlalu banyak 'raport merahnya' sehingga perlu segera diremedialkan?. Hal ini menjadi sangat urgen, mengingat status ulama merupakan maha guru untuk umatnya. Jika ulamanya kencing berdiri maka umatnya akan kencing berlari.

Dari urgensitas evaluasi kinerja ulama tadi, maka menurut penulis, akan dapat mendeteksi beberapa penyakit umat Jambi yang layak di "UGD" kan, karena terlanjur menjadi penyakit kronis, diantaranya adalah: *Pertama*. Sangat rendahnya pengetahuan umat tentang agamanya. Minimnya pengetahuan agama ummat khususnya umat Islam Jambi terlihat dan masih banyaknya praktek-praktek kesyirikan, tahayul dan perdukunan yang semuanya itu tak jarang dianggap sebagai ajaran agama. Juga, di pelbagai pelosok desa masih adanya praktik *ubudiyah* yang berpegang pada tradisi warisan 'guru dulu' yang berpatok pada kitab "*Perukunan*", sehingga, jika ada pendapat lain dipandang sebagai suatu yang "sesat" seakan menjadi momok yang menakutkan. Asumsi semacam ini terjadi, karena di kalangan NU tradisional, khususnya yang ada di pedesaan, masih sangat alergi dengan pembaharuan.

Hal ini disebabkan oleh sikap mereka yang dinilai pada satu sisi menolak ijtihad dan sisi lain menerima *taqlid*. Sikap semacam inilah yang oleh Karel A Steenbrink dipandang sebagai penyebab utama mengapa orang beranggapan bahwa NU adalah anti pembaharuan. Menurut Toha Hamim dalam bukunya "*Islam dan NU. Di Bawah*

Tekanan Problematika Kontemporer” bahwa kenyataannya kalangan NU memfungsikan *fiqh* sebagai referensi ‘primer’ bukan sekunder. Perlu dicatat, bahwa *fiqh* bukanlah sebuah produk hukum yang monolitik. *Fiqh* tidak hanya mencerminkan keragaman aliran pemikiran dalam yurisprudensi Islam (*mazhab*). Tetapi *fiqh* juga menawarkan varian metode dalam menyajikan pembahasannya. Dengan demikian *fiqh* hanya sebatas hasil ‘kreasi’ ijtihad ulama yang sangat mungkin terbatas cakupan dan relevansinya.

Kedua. Adanya akuisisi sebagai kelompok *ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah* yang seakan memiliki otoritas kebenaran Islam. Sedangkan kelompok atau ormas Islam lain seperti Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad dan Ikadi sebagai kelompok “luar” yang bukan *ahl sunnah* dan masih disangsikan keislamannya. Kekeliruan pemahaman seperti ini harus segera di luruskan, karena akan sangat berbahaya bagi keragaman paham keberagamaan. Pemahaman yang keliru tentang keberagamaan seperti itu akan menggerogoti kemajuan Islam itu sendiri. Hal yang harus ditanamkan dalam masyarakat Islam dalam menghadapi keragaman ini adalah *nata ‘awan fi ma ittafaqna wanatasamah fi ikhtalafna* (bersinergi terhadap hal yang disepakati dan berlapang dada terhadap perbedaan).

Ketiga. Paradigma dikotomi antara Islam dan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Adanya anggapan bahwa Islam hanya berada pada pusaran Masjid, *Mushalla*, majelis ta’lim dan madrasah merupakan indikasi kuat tentang masih ‘bercokolnya’ paradigm dikotomik faham keagamaan. Faham ini, telah menggurita di dalam tatanan masyarakat. Sebagai contoh, ketika berpolitik maka jangan sekali membawa-bawa agama. Biasanya, maka produk dan moral politisi dan pemegang kekuasaan sangat jauh dan sentimen agama.

Setidaknya tiga poin penyakit tadi yang tengah menjalar di masyarakat seharusnya menjadi isu penting dan dapat dibahas dan dikaji oleh ulama saat ini. Penyakit di atas, hemat penulis, sangat pantas dan layak untuk diperbincangkan di tengah kerumunan para ulama, selanjutnya dapat diformulasikan dalam beberapa klausul rekomendasi yang kemudian dijabarkan dalam beberapa aturan dalam bernegara. Pekerjaan ini merupakan tugas ulama sebagai

manifestasi *amar ma 'ruf nahi mungkar* yang telah diintruksikan Allah melalui nabi-Nya. Karena ulama secara etimologi adalah bentuk plural dan kata *alim* yang juga disebut dengan *allamah* atau *allam* yang bermakna orang yang mengamalkan apa yang diketahui.

Dalam Ensiklopedi Islam, definisi ulama menjadi orang yang tahu atau yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah (*khasyiatullah*). Juga, ulama merupakan pewaris para nabi (QS.alFathir:28) yang harus menabur nilai-nilai kerahmatan dan kebaikan kepada umatnya. Ulama seperti inilah yang disebut dengan kategori ulama *al-khair*. Yakni ulama kebajikan yang sangat hati-hati di dalam menerapkan *ijtihad* dan tidak pernah gegabah untuk mengeksploitasi atau menyalahgunakan agama dengan cara mensubordinasikan di bawah kepentingan praktis politik keduniaan. Jika tidak, maka akan menjadi ulama yang pernah diungkapkan oleh Imam al-Ghazali dalam bukunya *Ihya ulum al-din* sebagai ulama *al-Su'* yaitu ulama jahat yang telah mensubordinasikan kepentingan agama di bawah kepentingan keduniaan. Manifestasi pekerjaan ulama *al-su'* adalah selalu menjual ayat dengan murah, dan mencarikan justifikasi, rasionalisasi atau pembenaran murahan dengan mengambil dalil-dalil agama maupun logika tertentu agar tujuan politik penguasa dapat dicapai walaupun dengan resiko pembodohan masyarakat,

Penulis selalu *husnul-zan* dengan musyawarah “para ulama”, Penulis meyakini bahwa di dalam musyawarah itu selalu berporos pada kepentingan umat, bukan sekedar sebagai ajang ‘kumpul makan’ yang pada akhirnya terkontaminasi oleh warna politik penguasa atau calon perenggut kekuasaan. Jika kumpul ulama hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan atau sebagai “ayam kampung” yang hanya dimanfaatkan telurnya oleh penguasa, maka yang seperti itu bukan musyawarah *ulama*, tapi lebih tepatnya disebut kesepakatan *umala* (kacung-kacung). Semoga agenda ‘pemulihan’ penyakit ummat dapat diterjemahkan dalam kerja riil para ulama, agar penyakit kronis umat saat ini tidak membawa pada kehancuran moral. ***Wallahu a'lam***

Menguak Wacana Terorisme

Tertangkapnya Yusron alias Abu Dujana di Indonesia, seakan semakin menguatkan asumsi, bahwa gerakan terorisme memang eksis dan tetap selalu menjadi `hantu' yang setiap waktu selalu siap bergentayangan. Isu terorisme di negeri ini sepertinya menjadi santapan harian opini publik, yang semakin hari mengarah pada justifikasi bahwa memang terorisme selalu bertalian dengan faham dogmatif keberagamaan.

Semenjak peristiwa Sabtu kelabu 11 September 2001 yang menghancurkan WTC dan Pentagon, gedung symbol kedigdayaan Amerika Serikat, isu terorisme terus menggelinding ke permukaan wacana. Ruang public seakan tak hentinya di *cekoki* hidangan isu terorisme yang sampai saat ini belum jelas identitasnya. Sepertinya, wacana terorisme senantiasa menjadi *'headline'* setiap berita di pentas global. Seolah, terorisme menjadi konco dinamika dunia yang tak boleh terlewatkan dalam pemberitaan.

Rifat Said yang menulis artikel yang berjudul "*al-Irhab fi Alam al-Aulamah*" (terorisme dalam dunia global) di harian *al-Ahram* Mesir (20/4/2007), dalam tulisan itu mengungkapkan, bahwa ada sebuah pertarungan dalam kerangka peta zaman yang baru yang disebut globalisasi, yang terkadang menyuguhkan ragam penafsiran yang layak untuk diperhatikan, yaitu adanya dua kutub dunia yang berbeda antara dunia maju dan dunia yang selalu identik dengan keterbelakangan. Di sini difahami bahwa dunia pertama adalah

keberhasilan, kemajuan dan harus dilindungi, sedangkan dunia kedua adalah kemunduran, keterbelakangan yang selalu dipandang sebagai ancaman.

Terorisme menjadi alat dan opini jitu di pentas global untuk dijadikan kambing hitam sebagai dalih pencitraan buruk terhadap dunia kedua yang 'konon' masih menjadikan agama sebagai nafas kehidupan, sehingga, dunia pertama yang berbaju Barat seakan menjadi pejuang dan pahlawan terhadap pemberangusan terorisme. Walaupun sulit untuk menutup topeng, bahwa iklan besar-besaran tentang terorisme yang disponsori oleh Barat yang memiliki *hidden agenda*, yaitu untuk kepentingan kapitalisme dan bahkan tidak mustahil demi agama (*crused*). Dengan demikian, yang tampak sekarang Islam selalu menjadi pihak tertuduh yang ditempelkan dengan perilaku teroris. Lebih dari itu, norma Islam bahkan diidentifikasi sebagai ajaran yang memang akrab dan bahkan memang mengajarkan tindakan yang tidak berperilaku kemanusiaan tersebut.

Bagi penganut Islam, tuduhan dan persepsi seperti di atas jelas ditolak, karena memang sangat kontradiktif dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Namun fakta *waqi'*-nya, para pelaku yang dianggap teroris, sebagiannya berstatus sebagai muslim. Lantas, benarkah asumsi bahwa tindakan terorisme itu bermotif agama? dan apa sebenarnya "binatang" terorisme itu?.

Mendefinisikan *term* terorisme secara *harfiyah* tidaklah begitu sulit. Namun, menerjemahkannya secara *kully* (konprehensif) dengan konteks kekinian terasa agak akut, mengingat term terorisme sudah dirasuki, *ter-sibghah* (diwarnai) oleh pelbagai kepentingan, baik ideology maupun politik. Sehingga ketika harus menuding seseorang dengan teroris, terasulit untuk meyakinkan kebenaran relevansinya antara stigma dan pelakunya. Hal ini karena *term* terorisme telah memasuki wilayah klaim masing-masing yang menjadi multi tafsir bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, semua pihak berhak untuk menghindar dan terminology terorisme yang mengakui bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tak jarang dianggap sebagai

perbuatan suci yang dijustifikasi oleh dogma agama. Di sinilah tepatnya ungkapan Fahmi Huwaidi dalam bukunya *al-Maqalat al-Mahzurah* (kumpulan artikel terlarang) yang menjelaskan, bahwa decade terakhir ini, perbuatan baik dituding sebagai sebuah kejahatan, putih menjadi hitam, dan mujahid dianggap teroris.

Namun, di tengah subyektifitas dan kerancuan makna terorisme, tidak lantas istilah ini terisolir dan luput dari pengertian akademiknya. Menurut Vidari, kata terorisme merupakan istilah asing yang digunakan untuk menyebut seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan teror di tengah-tengah masyarakat. (*Republika*, 23/6/2007). John M Echols menyebut anti teroris sebagai penggetaran atau perusuhan atau tindakan kekerasan yang disertai dengan sadisme yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan. Akan tetapi dalam kamus adikuasa, menurut Noam Avram Chomsky, terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara atau kelompok-kelompok kecil. Lain lagi dengan Amir Thohiri yang menulis dalam bukunya *al-Irhab al-Muqaddas* (terorisme suci) bahwa semua tindakan kekerasan yang diluar undang-undang perang, seperti yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia dengan tujuan memberi rasa tidakaman demi tercapainya tujuan politik.

Pengertian di atas, merupakan persepsi personal ilmuwan dalam mendefinisikan makna terorisme. Pada level kenegaraan, Mesir misalnya, pernah diadakan forum dialog antaraketua Asosiasi Keamanan Nasional Arab denganketua Dewan Syura (MPR) Mesir pada tanggal 20 Maret 1993 yang mengangkat tema “Menghadang Terorisme”. Dalam dialog ini menelurkan pengertian terorisme, yaitu segala praktek kekerasan atau ancaman dengan tujuan politis untuk mempengaruhi prestise negara atau untuk menguasai keamanan dengan obsesi menggoyang kepemimpinan nasional, yang bias dilakukan dengan pelbagai cara, seperti menghancurkan perekonomian agar tercipta keresahan yang berujung kerusuhan. Juga, sebuah obsesi untuk merubah perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara dan telah diterima oleh masyarakat.

Jika berangkat dari pengertian terorisme secara leksikal seperti di atas, maka mafhum sederhana dapat disimpulkan bahwa terorisme itu selalu ada dalam realitas sejarah kehidupan manusia. Bahkan, ada semenjak manusia itu membentuk komunitas social seperti ragedi pada bani Adam, Habil dan Qabil. Namun pengertian terorisme dalam pemikiran modern mengkristal semenjak revolusi Prancis pada tanggal 10 Agustus 1792, ketika pihak oposisi revolusi melakukan pelbagai tindakan kekerasan dalam menentang revolusi tersebut.

Dalam perkembangannya, gerakan terorisme memang sangat sering dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Hal ini terlihat dari beberapak lasifikasi yang dirangkumkan oleh para ilmuwan. Setidaknya ada tiga. *Pertama*, terorisme kriminal seperti gerakan perampokan dan penodongan. *Kedua*, terorisme hegemonic seperti yang banyak dilakukan oleh banyak penguasa terhadap lawan politiknya dalam melanggengkan kekuasaan. *Ketiga*, terorisme pemikiran seperti pemaksaan opini dan pemahaman terhadap kelompok lain.

Jika disimak dengan pola pikir yang sangat sederhana, baik definisi, sejarah dan klasifikasi terorisme, maka sangat lumrah 'terorisme' itu terjadi dalam sebuah komunitas social masyarakat. Namun ini bukan berarti penulis mengamini pekerjaan yang dilakukan oleh para teroris, atau menyederhanakan tindakan terorisme, akan tetapi lebih pada keinginan untuk melihat terorisme secara proporsional. Karena dalam realitas kekinian seakan ada kesan pemaksaan opini public bahwa terorisme memang merupakan ajaran agama. Sehingga biasanya sangat kentara ketika tampilan-tampilan formal agama yang mungkin itu memang dianjurkan dalam ajarannya menjadi identitas kelompok terorisme. Sehingga harus diwaspadai dan dicurigai.

Di sinilah letak kecurigaan, mengapa wacana terorisme selalu muncul dan diopinikan di negara-negara yang kebetulan berpenduduk muslim, atau mengapa secara umum pelaku yang tertuduh dan dituding melakukan tindakan terorisme adalah terkesan muslim yang taat, yang padahal secara jelas ajaran Islam

sangat menistai perilaku terror itu. Kecurigaan semakin bersemai ketika kelompok “lain” melakukan hal yang sama, tapi tidak begitu terdengar julukan istilah terorisme kepada mereka. Apakah kurang bejat dan terorisnya Israel yang sampai saat ini terus memporak-porandakan negara Palestina, Apakah kurang sadisnya tentara Amerika yang sampai saat ini masih bercokol di negara Irak yang berdaulat. Tidak sadiskah pembunuhan kaum muslim di Mindanao, Thailand Selatan, Kasmir dan Ambon. Sungguh pembunuh-pembunuh itu sangat pantas diopinikan sebagai teroris kelas kakap. Tapi mengapa para pembunuh-pembunuh itu tidak didakwa sebagai gerakan atau negara teroris, sehingga bisa di “borgol” Densus Anti Teror Indonesia yang sangat takut dengan teroris yang sudah tidak berdaya? ***Wallalhua’lam***

Pembebasan Perempuan

Perempuan, suatu makhluk yang cukup banyak mendapat porsi bahasan dan pengkajian, baik dalam perspektif agama maupun sosial. Diskursus tentang entitas perempuan dalam dinamika zaman senantiasa menjadi *headline* di ruang publik. Seakan keberadaan perempuan di jagad ini menjadi sebuah misteri yang selalu menarik perhatian, sehingga perbincangan tentang perempuan seperti derasan air mengalir yang tak kunjung sampai muara.

Dinamika makhluk Tuhan yang beridentitas perempuan senantiasa *online* mengiringi irama sejarah, dan hampir semua fase sejarah mendokumentasikan keberadaan dan perilaku perempuan pada zamannya. Dari peristiwa yang heroic sampai miris, dari yang romantis sampai sadis, dari cinta sampai benci, semuanya hampir tidak pernah meninggalkan cerita peran kaum Hawa. Teatrical perempuan di atas panggung sejarah tak jarang mengukir prestasi gemilang, baik sebagai penyelamat, pendukung dan bahkan pendongkrak lawan jenisnya (laki-laki), disamping itu juga tidak luput dari prestasi malang sebagai penjerumus dan perusak zaman. Itulah realitas perempuan yang sampai saat ini masih menjadi *hot issue* dalam bincang ilmuwan.

Sebenarnya entitas perempuan sebagai makhluk Tuhan dimuka bumi ini merupakan aksioma *ilahiyah* yang harus ada, sebagai wujud logic sarana regenerasi manusia. Namun perjalanannya dalam sejarah, entitas perempuan seringkali dipandang sebelah mata,

bahkan menyandang stigma kelas dua dari kaum Adam. Stigma ini bahkan telah berakar dari warisan peradaban yang pernah berdiam di bumi. Atas asumsi itulah, para ilmuwan menyatakan bahwa ada tiga fase yang dilalui oleh kaum perempuan.

Pertama. Fase *al-Ihanah* (penghinaan), kaum perempuan dipandang sebagai sampah, barang dagangan yang diperjual-belikan di pasar, sesuatu yang diwarisi dan dikawini sesuai kemauan kaum lelaki. Musthafa Husni al-Siba'iy menulis dalam bukunya *alMar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun*, bahwa dalam masyarakat Yunani kuno, kaum perempuan dilarang untuk belajar. Wanita menjadi barang najis dari kotoran Setan. Hal yang sama juga terjadi dalam anggapan bangsa Romawi. Mereka memosisikan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat hina dan tidak memiliki hak atas harta kekayaan. *Kedua.* Fase *al-Takrim* (penghormatan). Kaum perempuan dipandang sebagai mahadewi yang disembah dan dipuja. Kaum Hawa hanya dijadikan 'benda' pelepas hawa nafsu laki-laki bangsawan dan hartawan. Nilai dan harga perempuan hanya diukur dengan kualitas fisik *an sich*. *Ketiga* Fase *al-Taswiyah* (kesetaraan), kaum Hawa disamakan dengan kaum Adam. Terjadinya gerakan emansipasi yang menyetarakan kedua jenis manusia ini dalam segala hal.

Ketiga fase di atas merupakan gambaran kelam potret status kaum perempuan dalam lintas sejarah. Masa kelam peradaban manusia yang meletakkan makhluk yang berkelamin perempuan pada posisi yang tidak manusiawi itu, turut andil dan terus mencengkram paradigma budaya tentang posisi dan status kaum Hawa saat ini.

Bahkan terkadang agama juga diasumsikan sangat berperan dalam menegakkan kaum wanita dari kawasan makhluk Tuhan yang terhormat. Agama dianggap sebagai 'biang kerok' yang berfungsi sebagai jeruji besi bagi kaum wanita. Agama dituduh sebagai belenggu yang mengikat kebebasan, memenjarakan kemerdekaan dan mengungkung kaum Hawa dalam teks-teks dogmatis yang penuh tendensi. Agama juga dicurigai selalu memihak pada hegemonitas kaum Adam dalam interpretasi instruksi Tuhan dalam

kitab suci-Nya. Sehingga, saat ini gerakan perlawanan yang berbasis gender dari kaum feminis seakan menemukan momentumnya untuk berteriak tentang kebebasan, bahkan sampai 'mendemonstrasikan' dan mengkritik hak prerogatif Tuhan.

Teriakan pembebasan dari kungkungan doktrin agama yang dipelopori Barat memang sedikit beralasan, mengingat konsep mereka tentang wanita secara etimologis disebut *female*. Kata ini berasal dari bahasa Yunani femina' yang berarti *fides, faith* (kepercayaan atau iman). sedangkan 'mina' berasal dari kata '*minus*' yang berarti kurang. Jadi femina artinya adalah seseorang yang imannya kurang (*one with less faith*). Karena itu, penulis Jerman abad ke 17 seperti yang dikutip Philip J. Adler dalam bukunya *World Civilizations*, mengatakan, *it is a fact that women has only a weaker faith (in God)*. Adalah fakta bahwa wanita itu lemah dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Tidak hanya itu, keberadaan wanita juga disamakan dengan makhluk jahat. *Therefore, the female is evil by nature* (karena itu, wanita memang secara alami merupakan makhluk jahat).

Pembebasan kaum perempuan dari belenggu dogma agama terus menggenderang di ruang gaung wacana. Selanjutnya diterjemahkan dalam pelbagai even dan slogan yang mengusung tema-tema kebebasan. Gerakan emansipasi, kesetaraan gender, feminisme, *miss universe* dan adagium lainnya seringkali menjadi topeng dari gerakan kebebasan yang diteriakkan kaum Hawa saat ini. Meskipun, adagium kebebasan yang diterjemahkan itu tidak memiliki batas nilai yang sesuai dengan norma agama dan etika. Hingga, entitas kebebasan harus selalu didudukkan dalam ruang relativisme dan humanisme.

Ketika kebebasan kaum pe rem puan tadi diletakkan dalam bingkai relativisme yang tidak memiliki 'kepastiannilai' seperti yang telah ditetapkan agama, maka yang terjadi adalah bencana dan kehancuran moral. Sebabsemuaperilakuasusilasepertiseksbebas, kumpulkebo, prostitusi akan selalu beralibi pada kebebasan. Sebagai efek dominannya dalam konteks ekinian, hal-hal yang dianggapcela dan hina dalam pandangan masyarakat, sekarang

justru menjadi trend dan modern, seperti hubungan seks spru nikah, ciuman bagi remaja dan banyaklagilainnya. Sekedar untuk direnungi sebagai akibat dari adagium kebebasan perempuan, dari data yang menyebutkan bahwa 85 persen remaja umur 15 tahun berhubungan seks bebas dan hampir 50 persen remaja perempuan Indonesia melakukan hubungan seks diluar nikah. Hasil survey Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) menyatakan pula, sebanyak 85 persenremajaberusia 13-15 tahun mengaku telah berhubungan seks dengan pacar mereka.

Gendrang kebebasan kaum Hawa saat ini agaknya layak untuk didudukkan kembali sesuai kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Jika tidak, maka bencana moral akan senantiasa mengancam bangunan sendi-sendi social masyarakat. Karena, adagium kebebasan saat ini hanya bentuk lain dari produk budaya masa lampau yang menghinakan kaum perempuan. Kalau dulu bentuknya penindasan dan diskriminasi, sekarang paradigm pembebasan berujung pada eksploitasi fisik wanita untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, hukum dan bahkan kekuasaan. Kaum wanita terpenjara dalam ruang hedonistik dan lautan syahwat yang berkedok kebebasan.

Pembebasan kaum Hawa harus merdeka dari kepentingan kapitalistik yang mengeksploitasi kecantikan tubuh wanita. Pembebasan harus bertolak dari norma agama yang sudah menempatkan wanita pada posisi yang sangat mulia, terpuji dan terhormat. Hal ini terlihat dari penempatan wanita sebagai bagian dari nama surat (*al-Nisa*) dalam kitab suci al-Qur'an, juga dengan analogi yang telah diungkapkan oleh nabi Muhammad SAW kepada wanita sebagai *imad al-bilad* (tiang negara). Barangkali inilah yang diinginkan oleh RA Kartini dalam karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang. Namun jika tidak, maka yang terjadi justru habis gelap terbitlah kedurjanaan. ***Wallahu a'lam***

Beribadah Dalam Berpolitik

Dalam pandangan muslim awam, judul di atas bias jadi kontra diktif, mengingat ibadah seringkali dipahami berada pada posisi yang sangat berseberangan dengan realitas politik. Ibadah menyangkut hubungan langsung dengan Allah swt, sedangkan politik seringkali “penuh intrik” yang berurusan dengan berbagai kepentingan manusia. Begitulah pemahaman sederhana muslim secara umum tentang relasi ibadah dengan politik. Padahal, pemahaman ini bukan hanya sebatas keliru, tapi bias jadi sangat fatal bagi kemaslahatan umat Islam. Faham semacam ini menjadi virus berbahaya dalam paradigm politik umat Islam, yang sudah tentu tidak timbul dengan sendirinya.

Wujud pemikiran ini timbul dari upaya sekulerisasi yang sudah merasuk dalam pemikiran mayoritas masyarakat muslim, akibat dari *al-ghazw al-fikr* (perang pemikiran) yang dilancarkan oleh pihak *non-muslim* kepada umat Islam. Sehingga, ibadah hanya menempati ruang sacral ketuhanan yang hanya dipersepsikan dalam bentuk ritualitas ibadah *mahdhah* semata.

Iniilah fakta ironis yang sedang terjadi di tengah umat. Padahal, defenisi ibadah, menurut Ibn Taimiyah adalah suatu nama yang menyeluruh dari setiap apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik itu berbentuk perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara nyata atau tersembunyi (*ism jami' li kull ma yuhibbuhu Allah wayardhahu min al-aqwal wa al-'amal al-zhahirah wa al-bathinah*). Dari defenisi ini, maka berpolitik (*siyasah*) merupakan

wilayah amal yang tidak bias dikecualikan dari ibadah, apatah lagi politik merupakan *watsilah* (sarana) yang bias jadi sangat vital dalam memperjuangkan kemaslahatan umat.

Identitas politik yang merupakan sarana (*wastilah*) tersebut, sesuai dengan definisinya yaitu macam-macam kegiatan dalam suatu system politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Di sini tampak, bahwa politik merupakan ‘jembatan penyebrang’ dalam proses menentukan tujuan dan melaksanakan tujuan tersebut. Jika demikian, maka berlaku kaedah hukum, *li alwasa-il, hukm al-maqasid*, yaitu hukum suatu sarana (*watsilah*) sangat tergantung pada maksud dan tujuan yang akandituju. Jika tujuannya baik, maka hukum dan cara yang dilakukan, semestinya dan wajib juga baik. Karena, *tabrir al watsa-il* (membenarkan segala cara) demi tujuan yang baik, jelas juga dilarang. Dalam hal ini, para ulama telah menetapkan kaedah hukum lain, *al-ghayah la tubarrir al watsilah* (tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara).

Dalam konteks keumatan sekarang ini, berpolitik bukan semata dipahami sebagai sarana untuk menjemput kekuasaan. Namun, lebih jauh dari itu, berpolitik merupakan upaya merebutkan ruang legalitas dalam sistem negara. Perebutan legalitas merupakan suatu yang abash dalam demokrasi yang kebetulan sedang dianut dalam banyak system bernegara dewasa ini, termasuk Indonesia. Artinya, dalam system demokrasi, ruang legalitas itu sangat memungkinkan dikelola oleh siapa yang memenangkan pertarungan di medan politik. Di ranah ini, berpolitik bukan hanya sekedar ibadah biasa, namun menjadi medan ibadah yang memerlukan *mujahadah*, karena memperjuangkan legalitas kebenaran, kadang jauh lebih berat daripada melaksanakan kebenaran itu sendiri.

Jadi, berpolitik menjadi ruang ibadah yang sungguh penuh pahala, karena hakikatnya sedang memperjuangkan legalitas nilai ketuhanan dalam system hidup manusia. Ini tentu tidak semua perbuatan berpolitik demikian, karena banyak yang justeru menjual simbol kebaikan dan kebenaran untuk diperas dan menjadi mangsa ambisius nafsunya. Ini semua terpulang kepada niat, dan setiap

orang akan dihitung amalnya sesuai dengan niat dan tujuannya.
*Faman ya'mal mitsqal zarrati kahira yarah, waman ya'ma
lmitsqala zarrati syairayyarah. Wallahu 'alam.*

Kerikil Parpol Islam

Dalam pelbagai suasana, partai yang dilabelkan "Islam" selalu menjadi *prototype* dalam tindakan nyata. Seakan, Parpol Islam merupakan kendaraan yang sesuai untuk mengangkut idealism rakyat menuju perubahan kebaikan. Keberadaan Parpol Islam seakan reinkarnasi dari impian perubahan kebaikan yang telah terkubur dalam nurani mayoritas wakil rakyat saat ini. Roda pedati gradulitas politik ala "Islam" seolah semakin mendekati terminal kenyataan, ketika slogan dan simbol yang ditawarkan selalu bersenyawa dengan fakta realitas.

Memang hala panjang perubahan yang diusung oleh Parpol Islam tidak akan selalu datar, sesuai alam yang ditempuh, kadang mendaki kadang pula menurun. Jalan perjuangan tentu tidak selamanya mulus, karena ungkapan perjuangan sendiri adalah bagian sejoli dari kata kegagalan. Jika tidak ada kegagalan, maka untuk apa ada perjuangan. Di situlah dinamika sosial, yang senantiasa berdialektika dalam ranah kenyataan sebagai wujud dari *sunnah* Tuhan terhadap kodrat makhluk-Nya yang diciptakan berpasangan. Siang dan malam merupakan ayat *kauniyah* ciptaan Tuhan yang boleh dianggap cukup mewakili contoh pasangan makhluk Tuhan tadi. Tamsil siang dan malam cukup menjadi bukti, bahwa pergantian malam yang bersama "gelap"nya dan siang dengan mentari "terang"nya akan selalu bergulir mengikuti perputaran waktu dalam zaman.

Ketika sebuah keputusan untuk mengkonversi dakwah dalam percaturan politik, maka di sana sudah pasti akan ada aral yang merintang. Paradigma dakwah yang senantiasa berselimutkan sorban dan ayat suci itu dianggap menjadi nista ketika harus bergelombang dalam politik, mengingat area politik sudah begitu tercemar dijangkiti polusi dekadensi moral, sebagai akibat dari virus sekulerisme yang menjarakkan norma agama dari ruang praktik politik. Dengan demikian, identitas politik selalu berkolaborasi dengan kepicikan, keculasan dan bahkan cenderung untuk menegasikan sekaligus memandulkan fungsi kata halal ketika menuju muara kepentingan pragmatisnya.

Akibat dari wabah virus sekulerisme juga, seolah terjadi '*ijma' sukuti*' terhadap pemisahan ruang antara dakwah dan politik. Dari sini seolah terjadi justifikasi stigmatis yang meniscayakan bahwa pelaku dakwah "dilarang" untuk berkecimpung dalam politik, meskipun politik sangat acapkali menunggangi, memperalat dan bertindak oportunistik terhadap dakwah.

Selain itu juga, argumentasi pemisahan ranah dakwah dan politik diinspirasi oleh tutur sejarah yang senantiasa memposisikan kedua bidang tersebut pada ruang konfrontasi. Hal ini terlihat dalam *sunnah* dakwah yang sejarahnya selalu *vis a vis* scenario setan, baik dalam bentuknya yang "konservatif" maupun dalam *design* yang modern. Perjalanan pelaku dakwah (*da'i*) acap kali berbenturan dengan pelaku politik yang kerap menghadiahkan bilik bui kepada pelaku gerakan dakwah.

Kenyataan ini bahkan masih berlaku sampai saat ini di pelbagai dunia Islam. Phobianis gerakan dakwah Islam yang bersinergikan politik, akan selalu dihalangi dengan pelbagai cara, baik dengan "*soft power*" seperti pembunuhan karakter melalui publikasi buruk media ataupun dengan "*hard power*" yang bersembunyi dibalik legalitas kekuasaan. Pola bentuk penghalang pertama gerakan dakwah (*soft power*), sering berlaku dalam negara yang berkiblat demokrasi, dimana media menjadi penguasa opini publik. Cara inilah yang digunakan oleh Barat dalam hegemonisasi pertarungan opini dengan kekuatan Islam. Sehingga gerakan dakwah Islam

sangat sering dimunculkan sebagai bentuk organisasi kriminal, teroris, fundamentalis yang mesti dicurigai dan bahkan dijadikan musuh bersama (*common enemy*) bagi kemajuan modern Barat. Sedangkan pola bentuk kedua (*hard power*), dakwah politik sering digunakan oleh pemangku kekuasaan yang berkiblat otoritarian, dengan jeratan instabilitas publik dan kekuasaan negara, pegiat gerakan dakwah politik sering diberanguskan dibalik jeruji dan bahkan berkalung tali di tiang gantungan.

Kedua kekuatan di atas dalam konteks ke Indonesiaan, nampaknya akan selalu menjadi aral konversi dakwah politik yang "diimani" oleh Parpol Islam. Kontestasi dinamika politik utamanya menjelang pemilu, semakin menyuguhkan fakta erabolasi dakwah politik di atas. Kekuatan Parpol Islam dalam beberapa pemilu selalu menjadi duri dalam daging bagi kelompok phobianis Islam politik. Pertarungan dalam perebutan kekuasaan sebenarnya sudah ditabuhkan, walau dengan cara yang tidak terbuka. Pelbagai isu miring yang menerpa Parpol Islam, baik secara institusional kepartaian maupun "penghuni" partai itu, akan selalu menjadi mesin sekaligus martir awan dalam mengganjal keterlibatan Parpol Islam dalam kekuasaan.

Ada beberapa argument rasionalisasi, mengapa Parpol Islam harus di sandingkan dalam dinamika perebutan kekuasaan, sehingga rumah Parpol Islam seolah heroik dan fenomenal yang akhirnya menjadi konsumsi menggiurkan oleh media publik di tanah air. *Pertama*. Dualisme politik dan agama dalam rekam perebutan kekuasaan di tanah air seolah telah terbantahkan. Asumsi yang menafikan peran agama dalam politik yang member kesimpulan bahwa politik harus berjarak dari agama ternyata sudah tidak lagi relevan. Para politikus muslim umumnya selalubisanya menyuguhkan cara berpolitik dengan pendekatan-pendekatan agama, tanpa harus mengobral simbol-simbol formalisme agama. Sikap gerakan politik yang bersikukuh memformalkan simbol agama dan tidak dibarengi dengan perilaku umum gerakan politisi tersebut hanya akan menjadi kuburan dan senjatomakan tuan bagidak wah politik itu sendiri.

Kedua. Ketika klausul pertamaterjawab, makaParpol Islam diasumsikan harus tidakboleh salah. Parpol Islam seolah harus menyerupai ”*jamaahmalaikat*” yang mesti selalu benar dan tidak boleh lagi memiliki ambisi keduniawian. Anggapan ini sepertinya menjadi konsekuensi dari konversi dakwah dan politik yang bertolak dari *image* dan faham dualism politik dan dakwah. Embrio anggapan ini bertolak dari karya ”sesat” Ali Abd Raziq ’*al-Islam waUsul al-Hukm*’ yang menyatakan bahwa dogma Islam hanya pada ruang spritualitas semata dan tidak berhubungan dengan domain politik, pemerintahan dan negara. Walaupun asumsi Abd Raziq tersebut telahdi insyafinya dengan pernyataan ”ungkapan yang disampaikansetanmelaluihidahku”. Dari sini kemudi andalam perjalanan dualitas dakwah dan politik, memberi stigma timpang dan senantiasa terburu-buru dalam menggeneralisasi sasi kekhilafan dan kesalahan para politisi pegiat dakwah. Jika ada di antaramereka yang sempat bersalah, maka dijadikan justifikasi akan ketidakmungkinan bersenyawanya dakwah dan politik. Ibarat kata pepatah ”nila setitik akan merusak susu sebelanga”.

Kedepan, perjalanan Parpol sebagai alat menuju kekuasaan dengan telah mengawinkan dakwah dan politik secara penuh mesra, akan selalu menemukan kerikil dalam menapaki tujuan politiknya. Bahkan, semakin jauh perjalanan yang ditelusuri maka semakin besar pula batu sandungan yang harus dilangkahi. Tentu, semakin ketengah laut nelayan berlayar, tentu semakin tinggi gelombang badai menantang. ***Wallahu a’lam***

Kontekstualisasi *Tilawah* al-Qur'an

Sebagai wahyu, keagungan al-Qur'an sampai saat ini tetap tidak terbantahkan, hingga oleh kitab *samawi* lainnya sekalipun. Kehebatan kitab *samawi* terakhir ini selain merupakan doktrin keimanan, juga pembuktian realitas di atas durasi zaman yang selalu menyuguhkan kebenaran-kebanaran ungkapan al-Qur'an. Demikianlah adanya, kitab suci al-Qur'an tidak akan pernah terlampaui kandungannya, bahkan sampai kiamat kelak. Kehebatan wahyu terakhir ini tidak sebatas kandungan maknanya yang selalu senafas dengan denyut peradaban manusia, tapi lirik irama kata-katanya senantiasa memabukkan pencandu sastra. Setiap lirik dari bait ayat al-Qur'an memiliki nilai dan maksud tersendiri, bahkan semua tempatan kata tidak akan pernah mungkin sia-sia. Disamping itu, keistimewaan lain yang hanya dimiliki al-Qur'an adalah kitab satu-satunya yang bernilai ibadah (*al-ta'abbud*) ketika dibaca. Sehingga, dalam sebuah hadits disebutkan, ganjaran pahala membaca al-Qur'an tidak dihitung oleh Tuhan dengan jumlah kalimat, tapi dengan hitungan huruf.

Disinilah bagian dari ragam keagungan al-Qur'an. Kitab yang tidak akan pernah sepi dari ulasan pelbagai pengetahuan manusia, sehingga seolah menyimpan daya magnetis yang selalu memikat untuk dikaji, diteliti, diulas hingga akhirnya diyakini. Daya magnetik kandungan al-Qur'an bahkan melampaui ukuran rasionalitas, karena terdapat banyak hal yang bersifat imanen, transendental dan

berada dalam area yang abstrak.

Walau demikian, kitab suci al-Qur'an tidak melulu fokus pada persoalan kerohanian. Keagungannya justru "dijumpai" dan dirasakan pada nilai-nilai kontekstualitas yang dinamis, tidak stagnan, tidak pasif apalagi mati. Ungkapan al-Qur'an juga tidak mengerucut pada aturan-aturan teoritik yang terkesan sangat idealistik. Akan tetapi selalu berdialog dengan realitas yang selalu progresif. Hal ini terlihat dari penamaannya sebagai wahyu, yang secara leksikal, memiliki pengertian yang lebih umum dari sekedar tulisan (*al-kitab*), mengingat *al-kitab* merupakan bagian dari *al-wahyu* yang pernah diturunkan oleh Allah swt kepada para Rasul-Nya. Menurut Majd al-Din al-Fayruz dalam kamus *al-Muhit*, wahyu berarti isyarat, tulisan, *risalah*, ilham, perkataan yang tersembunyi (*al-kalam al-khafy*) dan setiap perkataan yang disampaikan kepada orang lain. Ibn al-Manzur dalam karyanya yang monumental *Lisan al-Arab*, mendefinisikan hal yang agak serupa. Menurut dia, *awha* yang berasal dari *waha* (asal kata wahyu) bisa berarti *kataba* (menulis) yang juga berarti *al-maktub*, *al-kutub* dan *al-khat*.

Entitas al-Qur'an sebagai wahyu menjadikannya kitab yang suci, yang selalu terjaga keorisinalan teks-teks (*nusus*) sepanjang zaman, sehingga bahasan al-Qur'an senantiasa dialogis dalam segala ruang dan waktu. Hal ini karena cakupan al-Qur'an sangat menyeluruh, mencakup segala dimensi kehidupan, baik dimensi keduniaan maupun keakhiratan. Dengan demikian, adalah sangat wajar jika mengorelasikan kandungan al-Qur'an dengan segala problematika kemanusiaan, baik teknologi, ekonomi, sosial maupun budaya.

Dalam ungkapan al-Qur'an, terdapat kalimat "*tibyan li kulli syai'i*" (penjelas segala hal) yang menegaskan bahwa tidak satupun persoalan yang tidak ditemui solusinya oleh al-Qur'an. Walau, dalam bahasa yang kadang general (*'am*), tidak spesifik, akan tetapi, dengan gaya ungkapan itulah, al-Qur'an tetap akan *acceptable* dalam dinamika zaman.

Ragam lain dari keagungan al-Qur'an adalah memiliki nilai '*ukhrawiyah*' ketika dibaca. Walau dalam pengertian yang sempit,

membaca berarti mengeja runutan setiap teks hurufnya. Akan tetapi, membaca dalam perspektif al-Qur'an tidaklah memadai jika tidak dibarengi dengan bacaan-bacaan kontekstual. Artinya, membaca *ayat al-maktubah* (teks tertulis) semestinya menjadi hulu dari saluran bacaan *ayat al-kawniyah* (fenomena alam). Sehingga, bacaan (*tilawah*) terintegrasi kedalam pola pikir, tindakan dan amal yang nyata.

Hal inilah yang selaras dengan pengertian *tilawah* al-Qur'an yang secara kebahasaan, *tilawah* adalah *muradif* (padanan)-nya *qira,ah*. Keduanya diterjemahkan menjadi bacaan. Namun dalam pengertian yang lebih spesifik, kedua kata itu (*tilawah* dan *qira,ah*) memiliki tekanan tersendiri. Menurut Ziad Khaled Moh al-Daghameen dalam tulisannya "al-Qur'an : Between The Horizons of Reading and Recitation, menyebutkan, terminologi *tilawah* adalah mengikuti petunjuk dan aturan-aturan (*sunan*) kitab suci. Ini berarti keharusan berkesinambungan dalam memahami makna dan kebenaran-kebenaran (*haqa,iq*)-nya dalam hati. *Tilawah al-Qur'an* dalam konteks ini, setidaknya memiliki beberapa fungsi dan urgensi. Pertama, *tilawah* merupakan peran penting kenabian (*muhimmah nabawiyah*), (Q.S. al-Ra'ad 30). Bacaan ini memiliki fungsi membersihkan jiwa yang membawa manusia kepada ketinggian psikologis. Dan ini telah dibuktikan oleh Rasul dengan sekaligus mengajar dan merealisasikan ajaran al-Qur'an. Kedua, *tilawah* adalah argumentasi ketuhanan (*hujjah ilahiyah*). Telah dibuktikan bahwa Tuhan tidak pernah menghukum suatu kaum yang telah diutus kepada mereka seorang Rasul dan mereka selalu membaca aturan-aturan Tuhan yang berada dalam alam, kehidupan dan manusia (Q.S. al-Qashas, 59). Ketiga, bacaan sebagai bentuk pendidikan jiwa (*tarbiyah ruhiyah*). Al-Qur'an telah menekankan akan pentingnya penyerahan nurani sebagai efek dari bacaan ayat-ayat Tuhan. Dari itu, al-Qur'an memuji bacaan orang-orang beriman yang berorientasi kepada sikap berserah diri (*istislam*) kepada Sang Pencipta. (Q.S.al-Isra 107-109). Keempat, bacaan sebagai petunjuk hukum (*hidayah tasyri'iyah*). Diantara makna *tilawah* adalah berbentuk motivasi dalam mengikuti hukum Tuhan dalam

pelbagai hal, hal ini karena kitab al-Qur'an telah menyediakan solusi dari segala problematika manusia. Kelima, bacaan merupakan penyangga dari perilaku kebaikan (*arkan min al-amal al-sholeh*). Keenam, bacaan merupakan cara untuk mengetahui aturan-aturan Tuhan. Ketujuh, bacaan merupakan tanggung jawab yang besar. Seseorang yang membaca ayat Tuhan bertanggung jawab terhadap segala tugas yang telah diembannya sebagai hamba.

Fungsi dan urgensi bacaan (*tilawah*) di atas, setidaknya layak untuk dijadikan bahan kontemplasi di tengah seringnya pelaksanaan lomba *tilawah* al-Qur'an. Lomba *tilawah* yang kemudian menjadi akrab dengan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an), bagi masyarakat muslim Indonesia, telah menyuguhkan nuansa kehangatan spiritualitas dan pesona budaya keagamaan khas. Bagi komunitas muslim Indonesia, MTQ seolah menjadi cermin kesalehan spiritual, atau lebih dari itu, sebagai gambaran aktivitas sosial keagamaan. Ini tercermin dari partisipasi semua komponen umat dalam kegiatan MTQ, yang secara tulus memfungsikannya sebagai wahana syiar Islam yang diracik dengan aroma kebudayaan lokal yang Islami.

Ringkasnya, MTQ telah menjadi program nasional yang kadang menjadi tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di bidang keagamaan. Karena, penyelenggaraan MTQ, terutama pada level regional, dianggap telah membangkitkan *ghirah* yang kuat bagi generasi muda muslim untuk senantiasa memelihara kesucian dan meningkatkan kecintaan terhadap kitab suci al-Quran. Melalui perlombaan *tilawah* ini, dijadikan injeksi spirit dalam memahami, serta berupaya mengamalkan isi dan kandungannya dalam kehidupan yang sesungguhnya, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat.

Namun dalam seremonialisasi jenjang pelaksanaan MTQ, ada yang sangat patut untuk dijadikan kacamata dalam melihat realitas publik. Sudahkan moralitas publik bersenyawa dengan orientasi *tilawah*, khususnya dalam penyelenggaraan pesta umat ini? Akankah, lantunan ayat-ayat Tuhan itu telah berakulturasi dengan budaya MTQ? Sudahkah genderang pekik ayat-ayat suci itu menerobos tembok-tembok culas politik dan benteng kekuasaan oligarkis yang

sering bersikap pongah, oportunistis dan picik, bahkan mengabaikan titah Tuhan. Atau lantunan ayat-ayat itu hanya sekedar bacaan yang tidak lebih sebatas mencari pemenang kontes? Sehingga slogan perhelatan MTQ yang selalu menyebutkan “*baldatun toyyibah wa rabb ghafur*” hanya nyayian dalam seremoni pembukaan MTQ semata. Agaknya, sangat wajib bagi seorang muslim Indonesia, khususnya penduduk Jambi yang sudah melaksanakan MTQ ke 38, untuk befikir dan merunduk kepala sejenak, sejauh manakah ukuran keberimanan kita kepada al-Qur’an? Atau iman kepada kitab al-Qur’an yang kita yakini kesuciannya itu hanya sebatas menyelenggarakan MTQ saja? Jika ini praktiknya, maka lantunan ayat suci itu tak ubahnya seperti lantunan bait puisi dan nyayian qasidah yang berfungsi sebagai hiburan *an sic*. Na’uzubillah! *Wallahu’alam*.

Pemangsa Nurani Politik

Membicarakan dinamika politik, agaknya selalu *up to date*, hangat dan mengasyikkan. Ini mengingatkan, isu politik seolah tidak lagi menjadi dominasi obrolan kaum elit, walaupun, pion catur politik tetap dikuasai dan masih dijarah oleh kaum elitis, penguasa dan politisi yang bergelimang di lingkungan kekuasaan. Walau demikian, arena politik tetap saja membius masyarakat awam, menghipnotis kesadaran tentang hak-hak primer mereka yang semakin hari terus mengalami pengikisan. Alam sadar rakyat seolah terlena oleh gempitanya reformasi, yang seakan menjanjikan terjadinya perubahan di segala level kehidupan dalam bernegara bangsa. Meskipun akhirnya, riuh demokrasi itu, sebagai buah tuntutan reformasi, acapkali menjadi simalakama, bahkan menjadi senjata yang memangsa tuannya sendiri.

Memang, riuh reformasi yang bergaung semenjak lengsernya penguasa kakap dengan rezim Orde Baru-nya, patisipasi politik rakyat semakin mengetengah, jika dibandingkan dengan posisi *marginal* di saat Orba. Akan tetapi, cita-cita reformasi yang diharapkan mampu melahirkan kondisi yang lebih baik dan keluar dari belunggu kekuasaan otoriter, kini seolah-olah mati suri. Rezim kekuasaan hanya berganti baju, simbol dan performa. Sedangkan mental dan nurani penguasa bangsa tetap berkolaborasi, bermain mata dengan ketamakan dan hedenosme yang semakin picik. Agaknya, gelegar singkat pidato Bung Karno setelah mengucap

proklamasi 1945 yang mengatakan; “sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa sendiri dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri” benar-benar belum terwujud. Atau, diartikan dengan sangat leiteral, bahwa benar-benar penguasa kita sendiri yang menggantikan negara kolonial, sehingga menjajah rakyat sendiri.

Betapa tidak, berbagai kejadian politik dalam tahun 1430-2009, menabur skeptisme dan ketidakpercayaan rakyat kepada penguasanya. Tragedi politik Jambi misalnya, dimana perseteruan yang terjadi antara penguasa, Gubernur vs Wali Kota dan Bupati, penarikan dukungan beberapa partai pendukung terhadap Wali Kota Jambi, bongkar pasang kepala dinas dengan tidak jelas standar kelaikannya. Kesemua itu memperlihatkan dengan sangat jelas, telah berlakunya arogansi kekuasaan. Dalam dramatika politik ini, kekuasaan dipertontonkan sebagai alat untuk menindas, mengelabui sekaligus juga mengalih-fungsikan amanah jabatan itu sebagai otoritas kepentingan personal dan rezim. Sehingga pertarungan politik antara “rezim’ penguasa manjadi layar lebar yang disaksikan rakyat.

Disamping itu, pesta demokrasi dengan pemilihan wakil rakyat di legeslatif (DPRD Jambi) agaknya tersimpul dalam senyuman sinis. Impian perubahan, terutama di ranah kesejahteraan rakyat, hanya mimpi indah di saat kampanye laga para perebut kekuasaan. Semboyan “suara rakyat adalah suara tuhan” hanya ucapan klise yang tak ubahnya riuh pasar dagang kaki lima. Karena, setelah terpilih, para perenggut kekuasaan itu, tidak lagi sempat memikirkan konstituen pemilihnya, mengingat pengembalian modal asupan politik merasuki setiap napas kegelisahan. Sehingga, para penguasa yang mestinya tempat bernaung rakyat, mengatasnamakan wakil rakyat, bertukar jubah. Jas, dasi dan lambang kekuasaan yang biasa dipasang di samping dada mereka, menjadi elemen-elemen pongah yang sangat haus uang rakyat. Mereka tidak segan untuk berganti kendaraan mewah, berlagak kaum elitis yang menjarak dengan rakyat. Bahkan dunia glamour, yang berpindah tempat tidur di berbagai hotel, menjadi berita kebanggaan. Seolah, dengan alibi

pelatihan, rapat, studi banding dan peningkatan profesionalitas, merubah status harta kekayaan dan uang rakyat yang dititip dalam kas negara, menjadi halal seketika.

Partai yang berhasil meraup dominan suara rakyat, dijadikan karcis penukar kekuasaan. Partai yang semestinya diarahkan untuk menjadi mesin politik, penyalur aspirasi rakyat, disulap menjadi mesin uang pribadi-pribadi pengawanya. Ini tercermin dari deal-deal politik dalam Pilgub Jambi sekarang, dimana terjadinya buka-tutup pendaftaran bakal calon kontestan gubernur Jambi mendatang.

Rumus haram bagi pengurus rakyat dalam menilap uang negara hanya ada dalam narasi seremoni pidato keagmamaan. Tapi ketika sudah mengatur anggaran dan menentukan proyek pembangunan, seolah nurani halal nyaris terusir dari ruang empati kerakyatan. Ini disenyalir dengan gagalnya beberap proyek kakap, seperti rusaknya Jalan penghubung antar daerah dalam Provinsi Jambi, terbengkalainya Jembatan Batanghari II, dan sederet masalah korupsi yang memindahkan kehormatan wakil rakyat ke rumah bui.

Semua itu terjadi, kerana ketamakan telah menghegemoni nafsu, yang sealir dengan gaya parlente kemewahan penghuni kekuasaan. Jadinya, kekuasaan menjadi tempat menguras dan memeras rakyat. Kekuasaan tidak lagi dijadikan “kekuatan” dalam mensinergikan kebenaran. Tapi, kekuasaan menjadi gurita penumpuk kekayaan. Mestinya, kekuasaan merupakan kekuatan yang melindungi kebenaran, sehingga memproduksi keadilan. Dari itu, “jika kekuasaan yang tidak bergandeng kebenaran, maka menjadi kekuatan yang penuh kezaliman. Sedangkan kebenaran yang tidak diproyeksikan oleh kekuasaan, hanya menjadi slogan yang hampa keyakinan”.

Berbagai kisah dan rentetan peristiwa “miris” yang meretas di tahun 1430-2009, seakan *signal* dari potret tidak seiramanya kekuatan dan kebenaran itu. Sehingga adegan-adegan perilaku politisi, penegak hukum, para penguasa negeri ini sudah tidak lagi beranjak dari sensitifitas nurani. Jika demikian, akankah bangsa ini terjerembab ke dalam realitas daerah gagal? Sebagaimana

menurut Rotberg dalam *The New Nature of Nation-State Failure*, menyebutkan, bahwa sindrom negara gagal, antara lain, berupa keamanan rakyat tidak bisa dijaga, korupsi merajalela, legitimasi penguasa yang kian terpuruk, ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi masalah dalam negeri.

Suatu kreteria yang tidak mudah untuk mengakui pengistilahan “negeri gagal” Rotberg di atas. Walaupun, untuk menafikan secara general tidak lah tepat. Karena berbagai tragedi politik daerah tahun 1430-2009 menjadi realita yang tengah bersaksi. Kejadian-kejadian politik yang berwujud tragis itu, akan menjadi abadi dalam memori rakyat. Segala peristiwa mengerikan dan menggelikan, yang terungkap dalam dramatika politisasi rakyat hendaknya segera diakhirkan. Kalau tidak, maka perjalanan sejarah tidak akan merubah cerita gmlang untuk masa depan.

Harus diakui, bahwa perjalanan roda politik kekuasaan 1430-2009 yang bernaung di bawah adagium demokrasi, masih menyisakan banyak catatan kealfaan. Catatan itu dinodai oleh ketidaksadaran penguasa dan rakyatnya sekaligus, terhadap tugas dan tujuan politik. Sehingga demokrasi yang menjadi mimbar ekspresi politik, semula diimpikan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, ternyata hanya melahirkan pemangsa-pemangsa nurani politik itu sendiri. Nurani politik akhirnya terkalahkan oleh sikap opotunistik di medan laga demokrasi. Sehingga hamparan demokrasi berubah menjadi papan catur politisi dan dagelan penguasa dalam mengutak-atik kepentingan kesejahteraan rakyatnya.

Ala kulli hal, apapun kata dan kejadian masa lalu, semua itu telah menjadi milik sejarah masa silam. Segala prestasi masa lalu, adalah kreasi yang sepatutnya diperjuangkan. Adapun segala kegagalannya, harus dijadikan imunitas keinsyafan. Karena meratapi *diary* tragis masa silam, juga bukanlah sikap bijaksana, menyingkat kejadian masa lampau adalah suatu yang sangat jauh dalam realitas kehidupan kekikinan. Akan tetapi, jadikan itu *ibrah* berharga, bahwa sejarah merupakan tempat berhubungnya masa lalu dengan masa kini. Maka siapa yang tidak memiliki masa silam, maka tentu tidak ada banginya masa sekarang.

Akhirnya, semangat tahun baru akan penuh nilai jika berhijrah dari kejahatan menuju kebaikan. Berpindah dari lumur dosa menuju keinsyafan. *Fal-tanzur nafsu ma qaddamat lighad*, lihatlah masa lalu untuk tatapan kebaikan hari esok. *Wallhu'alam*.

Perayaan *Valentine*, Agama atau Budaya?

A gaknya, ruang pemikiran kita tidak pernah berhenti dari gerogotan virus budaya “impor” yang tanpa disadari telah mewabah dalam perilaku keseharian kita. Virus tersebut menularkan pelbagai bentuk penyakit sosial yang semakin hari teruskumat, bahkan penularannya menjangkiti ruang pemahaman keberagamaan. Sehingga tak jarang, fatwa ulama terkecoh oleh realitas, yang seakan menganggap bahwa segala sesuatu memiliki nilai positif dan negatif. Akhirnya, para ustadz, ulama dan Intelektual Islam harus mencari argumentasi yang sedikit lunak, agar terkesan familiar dan bersahabat dengan zaman. Kasus ini paling tidak, bias ditelisik dalam kasus *Valentine’s day* yang sampai saat ini menjadi *icon* dan *trend* baru generasi muda dalam menyalurkan kasih sayang. *Valentine’s day* menjadi moment yang seakan ‘rugi’ untuk dilewati, dengan warna pink dan makanan coklatnya yang khas, hari ini dianggap sebagai ruang waktu berkasih sayang, terutama kepada sang kekasih.

Seiring “paksaan” media mencekoki opini publik dengan tayangan perayaan hari Valentine, budaya ‘impor’ ini seakan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan romantisme kaum muda. Unik dan anehnya, di tengah kesan ‘kontroversial’ MUI yang memfatwakan haramnya perayaan hari *Valentine*, kadang bagi beberapa intelektual dan akademisi Islam, seolah ingin menjawab polemik keharaman

perayaan *Valentine* tersebut. Walau, tidak memiliki standar, juga rujukan argumentasi hukum yang jelas, *Valentine* seolah hanya soal *yes* atau *no*. Ketidak-jelasan argumentasi hukum tersebut, menurut penulis, akhirnya menjadi jebakan argumentasi relativitas yang akhirnya tidak memiliki “kelamin” hukum yang valid dan tegas.

Ketidak-tegasan sekaligus kegamangan dalam menyikapi tersebut, tercermin dalam pernyataan yang berusaha memisahkan antara makna *Valentine* yang menurut mereka “sesuai makna dasar” sejarah *Valentine* itu sendiri. Dalam ungkapan *Valentine Yes*, seakan berusaha memberi alibi, ternyata di dalam *Valentine* sendiri tersirat makna positif seperti memberikan kado, saling berbagi cerita dan pengalaman pribadi atau reuni teman/sahabat lama sesuai dengan makna dasar *Valentine*. Juga, asumsi yang menambahkan bahwa “perayaan *Valentine* yang minimal dapat ditolerir bila dilakukan dengan bertukar kado sebagai tanda perhatian terhadap kawan special atau sahabat, dengan kado yang sederhana, dirayakan di tempat terbuka, tidak di tempat tertutup yang memungkinkan dapat berbuat maksiat, memilih tempat yang sederhana, tidak mengganggu orang lain, tidak berpoya-poya, tidak merayakan dengan waktu yang tidak terbatas dan tentu saja berpakaian yang sopan sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat”.

Dalam uraian di atas, terkesan bahwa semua perilaku tadi merupakan suatu perbuatan positif, sehingga menjadi legitimasi akan untuk “*yes*”nya perayaan *Valentine*. Persoalan kemudian adalah, jika perilaku tadi tidak dalam ruang waktu *Valentine*, mungkin masih *debatable*. Akan tetapi, jika dalam ruang perayaan yang masih berembelkan *Valentine*, maka di situlah letak persoalannya. Karena bagaimanapun, penamaan *Valentine* sangat kental dengan misi dan nilai agama Kristiani, bahkan termasuk persoalan teologis Kristen.

Hal ini dapat dilihat dari asal sejarah lahirnya perayaan *Valentine*. Kisahnya bermula dari raja Claudius II (268-270 M) yang mempunyai kebijakan melarang bala tentaranya untuk menikah. Karena, bagi Claudius II, dengan tidak menikah, para prajurit akan menjadi agresif dan siaga dalam berperang. Kebijakan ini mendapat perlawanan dari Santo *Valentine* dan

Santo Arinus dengan melakukan perkawinan secara diam-diam. Akhirnya, perilaku kedua Santo tersebut diketahui oleh raja Claudius II, kemudian memberi hukuman mati kepada Valentine dan Marius. Akhirnya, kematiankedua “pejuangcinta” tersebut diresmikan oleh Paus Gelasius pada 14 Februari 469 M sebagai hari *Valentine*. Jika demikian, maka sangat jelas, bahwa perayaan *Valentine* bagi umat Islam sangat bermasalah, mengingat persoalan teologis merupakan doktrin ajaran suatu nama yang sudah berada dalam ranah “hitam-putih” dan tidak mempunyai ruang untuk dinegosiasikan.

Kedua, seringkali terdapat ungkapan “setidaknya tidak dianggap ketinggalan”. Ungkapan ini sekilas sangat sederhana. Namun, menurut penulis, menyimpan kandungan *inferiority* yang sangat dahsyat. Sikap inferioritas ini bahkan telah mewabah keparadigma pemahaman keberagamaan intelektual Islam. Sehingga, banyak ditemukan para cendekiawan Islam menganggap bahwa Islam menjadi kerikil daris ains dan kemajuan. Agama Islam hanya di jadikan wacana teoritik persoalan moral semata, tidak menjadi aturan *public* di masyarakat. Jadi agama terkurung dalam ruang *public reason*. Ini artinya, persoalan integritas keberagamaan hanya menjadi patokan moral saja.

Fenomena ini bahkan telah mewabah menjadi kelaziman dalam memahami keberagamaan di ruang publik, sehingga terkesan bahwa persoalan integritas moral menjadi penting jika itu berkaitan dengan kepentingan individu, namun menjadi subordinat jika berkaitan dengan agama. Inilah buah dari sikap inferior umat yang akhirnya harus mencari interpretasi baru terhadap pemahaman agamanya, walau harus mendobrak ratifikasi dogma agama yang telah mapan. Dengan pelbagai alasan, agama terkadang dikungkung dalam penafsiran keselarasan zaman yang tidak jarang harus “memperkosakan” interpretasi subjektivitas “birahi” dengan argumentasi “kebenaran hanyalah milik Tuhan”.

Ketiga, secara tersirat, adanya kerancuan dalam menyikapi perayaan *Valentine's day*. Apakah ini berada dalam wilayah agama atau hanya persoalan budaya semata. Di sini terjadi ambivalensi

memposisikan hari *Valentine* tersebut. Dan kedua posisi itu menjadi samar untuk ditarik ke wilayah agama atau budaya.

Pada satu sisi, mewacanakan *Valentine* dalam wilayah agama, sehingga nilai normatifitas yang diusungkan sangat berbau bahasa agama. Ini tercermin dari ungkapan “dirayakan di tempat terbuka, tidak ditempat tertutup yang memungkinkan dapat berbuat maksiat”. Pemakaian kata ‘maksiat’ jelas sekali kental bahasa agama. Namun, sejauh mana pengelaborasi kata maksiat tersebut disandarkan? Penjelasan maksiat jelas sangat normatif, membutuhkan legitimasi bahasa agama dalam mendefinisikannya. Namun pada sisi lain, wacana *Valentine* disimbol kandengan budaya. Ungkapan *Valentine* ditarik ke dalam kancah budaya yang hanya “sekedar sarana penyampaian perhatian, kasih sayang”. Titikkrusialnya adalah, jika harus dibungkus dalam bahasa budaya, bukankah budaya *Valentine* lahir dari produk agama?

Memang, ada ungkapan “*al-hik mahdhal latilimu minin, ainawaja dahafa huwaahaqqu biha*” (kebaikan itu banyak telah hilang dari kaum muslimin, maka dimana punkamu menemuinya, kamu lebih berhak untuk menerimanya). Akan tetapi, dalam kasus *Valentine’s day* ini, sangat sulit memilih antara nilai yang ada didalamnya dengan formalisasi ritualitasnya. Bahkan faktanya, justru *Valentine’s day* dan kemaksiatan (dalam kacamata agama), seperti seks bebas, miras, hura-hura dan pacaran menjadi dua sisi mata uang yang tidak bias dipisahkan. Dengan demikian sangat tepat, jika MUI memfatwakan perayaan *Valentine’s day* bagi orang muslim hukumnya Haram. Bukan kahadakai dah hokum telah bertutur “*al -ridha bi al-syai’I, ridha bima yatawallada uminhu*” (menyukai sesuatu, berarti menerima efek yang dilahirkannya). Semoga Tidak!

Kontemplasi Keagamaan dalam Kekuasaan

L *ikulli ma huwa ati qarib*, ungkapan bijak ini menuturkan bahwa setiap yang akan datang itu dekat. Dalam hitungan masa yang dekat akan tinggal dalam bilangan era lampau yang menyimpan ragam makna dan *i'tibar*. Era masa lalu telah merekam pelbagai peristiwa yang kemudian menjadi catatan sejarah. Suatu catatan yang sarat makna dari dinamika kehidupan yang dihamparkan kepada manusia untuk direnungkan dan kemudian dijadikan pelajaran dalam berbuat yang lebih baik di masa mendatang. Hal ini selaras dengan nilai keberagaman Islam yang selalu menekankan arti pentingnya menjadikan masa lalu sebagai barometer dalam mengukur perilaku yang akan dilakukan. Arti firman Allah SWT menjelaskan "*Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telahdi perbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamukerjakan*". (QS al-Hasyr, 18).

Diantara yang laik untuk "dikontemplasikan" adalah dinamika politik, serta perputaran waktu dalam giliran menduduki kursi teras kekuasaan. Ritmik politik dalam saban tahun pergantian kekuasaan tampak selalu mengalami eskalasi yang mencengangkan. Karena, ada banyak anomali yang menampilkan kelucuan yang sekaligus menggelikan. Bagaimana tidak, janji politik dengan terang mengucapkan anti korupsi, namun di tengah perjalanan kekuasaan, justru ucapan itu menjerat pelaku yang sudah mengklaim akan memerangi perbuatan tercela tersebut. Jadinya, iklan anti korupsi yang terlanjur dipamerkan itu bagai tepukan air dalam dulang, yang

akhirnya memercik muka sendiri.

Dalam euforia berdemokrasi sebagai buah dari orde reformasi, pemilihan pemimpin dalam sistem Pemilu yang secara normative sangat menjunjung tinggi independensi terhadap pilihan masing-masing, kenyataannya telah merusak moral. Karena, mesin penghasil kepemimpinan tersebut telah dianggap cacat, baik moralitas maupun secara hukum. Maka, hal tersebut jelas berefek kepada hasil produksinya. Dengan demikian, masih layakkah untuk menitip asa perubahan kepada pemangku kekuasaan untuk menuju perbaikan kesejahteraan rakyat? Tentu terlalu sulit untuk membenarkan jawabannya dengan kata iya, walau untuk mengatakan mustahil juga agaknya *over confidence*. Akan tetapi, persis pepatah Arab pernah mengungkapkan "bagaimana mungkin berharap kepada bayang yang lurus, sementara tongkatnya sendiri sudah bengkok". Selanjutnya, dalam dinamika Pemilu, aroma pembodohan rakyat terasa begitu menyengat. Dengan tameng membantu, rakyat dikumpulkan hanya untuk sekedar diperas suaranya. Suara rakyat dieksploitasi untuk merenggut kekuasaan semata, sehingga terjadilah syirik kekuasaan yang telah menuhankan suara tersebut. Adagium "suara rakyat adalah Tuhan" menjadi teori nyata dalam perebutan kekuasaan. Hal ini terjadi karena wajah perenggut kekuasaan lebih mementingkan bagaimana bisa menang, sementara persoalan moralitas dalam cara meraih kemenangan tersebut hampir tidak pernah dipedulikan.

Bagi pemburu kekuasaan, paradigma "yang penting menang" sudah menjurus kepada keserakahan dan kerakusan kekuasaan, bahkan terkesan menjadi tujuan yang telah melegalkan segala cara demi ambisi melagengkan tahta kepada kerabat dan keluarga. Jika demikian, kekuasaan bukan lagi bertujuan mulia sebagai sarana perjuangan untuk merubah nasib rakyat menuju kelaikan hidup sehingga lebih bermartabat. Bukankah menurut Jhon L. Esposito bahwa tujuan otoritas politik adalah menerapkan pesan ketuhanan, sebagaimana juga telah ditegaskan oleh al-Mawardi dalam bukunya *al-Ahkam al-Sulthaniyah* bahwa tujuan dari kepemimpinan kekuasaan itu untuk menjaga agama dan mengurus persoalan dunia. Dari sini agaknya Rasyid Ridha sangat melarang seseorang

mengemis kekuasaan dengan berargumentasi dari sabda Rasulullah SAW "Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan mengangkat untuk suatu tugas ini kepada seseorang yang meminta dan seseorang yang rakus atas tugas itu". Dalam sebuah hadits Nabi juga menegaskan bahwa kerakusan seseorang terhadap harta dan kekuasaan adalah sama dan bahkan melebihi dari melepaskan dua srigala di kandang kambing (al-Turmuzi, Hadist Hasan Sahih).

Dari sini, Ibnu Taimiyah dalam bukunya *al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Islah al-Ra'i wa-al Raiyah* mengkatagorisasi manusia kepada empat golongan. *Pertama*, manusia yang menginginkan penghormatan tinggi dari orang lain dan melakukan pengrusakan di muka bumi. Mereka adalah para penguasa yang melakukan keonaran laiknya seperti Fir'aun dan kelompoknya. Jenis mereka inilah yang digolongkan kepada kelompok makhluk yang terjahat. Dalam sebuah sabda Rasul menyebutkan bahwa "tidak masuk syurga orang yang dalam hatinya menyimpan *kibr* walau sebesar biji zarah. *Kibr* tersebut adalah *bathral-haq* (menolak dan mengingkari kebenaran) *ghamth al-nas* (menghina dan angkuh kepada manusia)". *Kedua*, golongan manusia yang hanya melakukan kerusakan tanpa keangkuhan. Kelompok ini dispesifikasikan kepada jenis pencuri dan pelaku kejahatan pidana. *Ketiga*, golongan ini hanya menginginkan penghormatan, bukan kerusakan. *Keempat*, golongan yang dikategorikan sebagai ahli syurga. Mereka tidak ingin penghormatan dan juga tidak melakukan kerusakan, walau mungkin kedudukan mereka memang lebih tinggi dari yang lainnya.

Kategorisasi golongan manusia seperti di atas merupakan potret entitas manusia dalam realitas sosialnya. Realitas tersebut selalu tertangkap kamera zaman yang selanjutnya menjadi rekaman sejarah. Kemudian, sejarah akan menjadi cerminan bagi perjalanan manusia, baik secara individual maupun komunal. Sejarah senantiasa menjadi maha guru yang siaga bertutur, walau dengan bahasa bisu. Namun kadang, akibat keangkuhan yang merupakan kelemahan bawaan manusia, mengakibatkan sejarah menjadi lubang yang menyandung langkah pelakunya, yang akhirnya seringkali pelaku sejarah terperosok ke dalam lubang yang sama.

Para penguasa acap-kali menjadi nakhoda dalam dramatika sejarah, karena dalam kekuasaan, tinta catatan sejarah tidak pernah membeku, mengigatarusperubahansangat mungkin digenderangkan melalui kekuasaan. Catatan huruf sejarah selalu mengitari putaran waktu yang menyimpan sejuta makna. Tentu, ini akan member arti bagi penguasa yang menggunakan akal sehat dan kalbunya. Jika tidak, maka setiap perjalan waktu sejarah, kita melulu mencerca aib masa lalu yang kadung tersimpan dalam nostalgia zaman. Akhirnya, pepatah bijak mengatakan "*fakaiifa nu'ibu zamanana, wa al-'aibu fina*" mengapa kita selalu mencerca aib zaman, sementara celanya berada dalam diri kita sendiri. ***Wallahu a'lam***

Mengagamakan Politik

Mengupas politik seakan tak menemukan muaranya, karena selalu faktual dan dinamis. Cerita politik juga selalu menggoda untuk dibincangkan, bahkan cukup mendominasi anah ‘gosip’ di pelbagai media. Hal ini karena politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan, dan area yang strategis untuk menyemai kepentingan itu adalah kekuasaan. Maka paradigma politik menjelma menjadi sebuah ungkapan “siapa mendapatkan apa, kapan dan di mana”. Dengan demikian realitas politik sangat paradox dengan pengertian teori normatifnya.

Dalam realitasnya, perilaku politik dan norma teoritisnya terdapat tabir pemisah. Seakan keduanya berbeda jalan. Paradigma perilaku politik, bagi kebanya kanpolitisi, mengkristal menjadi kekuasaan sebagai tujuan akhir, sehingga tindakan macheavallistik, seperti dusta, menjegal, oportunisme, dan perilaku amoral lainnya menjadi hal biasa, bahkan harus dilakukan demi tercapainya kepentingan. Sedang kan norma teoritis politikhanya menjadikan kekuasaan sebagai perantara untuk mewujudkan nilai ideal sesuaidengan fitrah manusia. Sehingga, norma politik selalu mengedepankan kamus moral dalam mencapai kekuasaan.

Di sinilah tepatnya ungkapan Al Ghazali bahwa agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki pondasia akan roboh dan yang tidak memiliki penjaga akan hilang. Ungkapan ini sinkron dengan pendapat Hasan

Al Banna. Dalam bukunya *Fiqh Al Siyasi*, Al Banna menulis bahwa tidak ada kebaikan dalam agama jika menegaskan politik, dan tidak ada kebaikan dalam politik jika meninggalkan agama.

Pernyataan Al Banna tersebut merupakan konklusi dari pemahaman keagamaan yang integral. Baginya, keberagaman yang benar dan tepat adalah jika agama selalu menjadi maha guru dan tujuan berpolitik. Namun anehnya, tidak semua Muslim menyadari hal ini. Bahkan naseb kelompok gerakan Islam yang menganggap bahwa politik dan segala perangkatnya, seperti partai, demokrasi dan yang lainnya merupakan hal yang sangat paradoks dengan keinginan norma agama. Pemahaman seperti ini kadang merujuk kepada teks literal agama, dan menjustifikasi bahwa politik menjadi barang 'haram' karena tidak akada dan dilakukan pada zaman Nabi SAW.

Sebagai akibat dari adanya pengharaman politik bagi sebagian kelompok Islam, maka paradigma politik menjelma menjadi rumus logika politik yang diwariskan kaum penjajah. Rumus logika politik yang dimaksud adalah berpolitik berarti memburu kekuasaan, dengan cara apapun, semuanya mungkin dan legal demi tercapainya tujuan kekuasaan itu. Cara politik seperti ini akhirnya dengan tanpa reserve akan sekaligus menegaskan norma agama. Hingga, adagium yang lumrah di tengah masyarakat adalah 'jika berpolitik tinggalkanlah agama, dan jika menekuni agama tinggalkanlah politik.'

Pada akhirnya politik dan agama memiliki 'teritorial' masing-masing dan di antara keduanya harus terpisah. Para penghuni wilayah agama menjadi nista jika berpolitik dan para politisi lumrah dan seakan tanpa dosa meninggalkan norma agama. Walaupun kadang, di ranah kedisinian, agamawan dan politisi sama-sama 'berkuda' agama dalam berpolitik, dan sama-sama mempolitikasi agama.

Pemahaman yang salah terhadap politik, sebenarnya telah menggurita dalam benak masyarakat Muslim. Hal ini, menurut penulis, paling tidak karena ada dua faktor. *Pertama*, realitas perilaku politik sangat sarat akan tamsil dan bukti riil, bahwa orang-

orang yang dianggap memiliki label keberagamaan, seperti kyai, ustadz, dan buya seringkali larut dan terperangkap dalam dinamika politik picisan yang serupa dengan orang yang tidak mengetahui norma agama. Sehingga timbul kesan bahwa agamawan dan tidak agamawan menjadi sama saja jika berada dalam ruang politik. Akibatnya, agama menjadi tertuduh sebagai alat legitimasi politik *an sich*. Agama terfitnah menjadi justifikasi-justifikasi sempit dan terbatas sesuai dengan interpretasi pesan syahwat penggunaannya.

Kedua, adanya pengaruh dari pola pikir (*ghazw al-fikr*) yang ditanamkan oleh Barat terhadap dunia Islam. Semboyan agama untuk Tuhan, dan negara untuk semua merupakan ungkapan yang seringkali nyaring didengungkan di tengah dunia Islam. Juga, adagium gereja sebagai pewaris sekularisme yang inti pesannya memisahkan agama dengan negara. Ungkapan 'berikan hak Tuhan kepada Tuhan dan hak kaisar kepada kaisar' merupakan fakta bahwa dogma gereja sangat antipasti dengan penyatuan agama dan negara. Walaupun pada kenyataan empiriknya, Barat tetap saja menjadikan politik sebagai kendaraan dalam menyemai norma agamanya. Barat selalu saja mengurus persoalan keagamaan menggunakan otoritas politik negara.

Dua factor tersebut memberi andil yang signifikan terhadap paradigm politik di pelbagai negara Islam, termasuk di Indonesia. Pemahaman dikotomi terhadap agama dan politik di Indonesia cukup banyak mempengaruhi perjalanan bernegara-bangsa yang akhirnya member identitas Indonesia sebagai negara yang netral terhadap agama. Ujungnya, Indonesia yang berpenduduk mayoritas Muslim terbelenggu dalam aturan-aturan hukum yang tidak bersumber dari dogma keimanan Islam. Hasilnya, meskipun Muslim Indonesia mayoritas dalam jumlah tapi minoritas dalam politik.

Pengertian politik secara leksikal sangatlah sederhana. Dalam ungkapan Arab, istilah politik dibahasakan dengan *al-siyasah* yang berasal dari kata *sa-sa* yang juga berarti *dabbara* (mengatur), *amara* (perintah), *naha* (larangan). Menurut Abd Aziz Izzat dalam bukunya *Al Nizam Al-Siyasi fi Al-Islam*, pengertian politik berarti mengatur persoalan umat dan menjaga kemaslahatannya, dan tidak berarti

penyesatan, penipuan dan permusuhan. Dengan demikian, tema sentral politik dalam agama adalah mengatur dan mengarahkan persoalan umat kepada hal yang lebih maslahat sesuai keinginan agama. Di sinilah Ibn Uqail mengungkapkan bahwa perilaku politik harus selalu mendekatkan manusia kepada yang *ashlah* (right) bukan *fasad* (disright), meskipun tidak dilakukan Rasul dan tidak dijelaskan secara literal oleh wahyu.

Jika substansi politik demikian, berarti politik memiliki tugas yang sangat mulia, terpuji, dan terhormat, karena berpolitik merupakan bagian dari instrument keberagamaan dalam merealisasikan ajarannya. Ini artinya, politik menjadi keharusan bahkan kewajiban bagi setiap penganut agama (Islam), karena dalam menerjemahkan ajaran dan titah Tuhan, ada yang mesti menggunakan kekuasaan. Dan cara yang elegan dan konstitusional dalam merangkul kekuasaan itu adalah mutlak dengan politik. Dengan demikian, berpartai merupakan payung legalitas berpolitik. Dalam dunia kontemporer, partai politiklah yang rasional dan factual merupakan alat perjuangan bagi terwujudkan misi dan cita agama. Bukan justru partai disingkirkan yang akhirnya menjadi tempat berteduh politisi pemuas nafsu perut dan birahi. Fahmi Huwaidi dalam bukunya *Al Maqalat Al Mahzurah* menulis judul *Dharurat Al Hizb Al Islamy* (signifikansi partai Islam). Menurut dia ada beberapa argumentasi rasional dalam mewujudkan partai Islam.

Pertama, partai merupakan lembaga yang konstitusional dalam menyalurkan aspirasi politik umat. Kedua, adanya realitas akidah yang mengharuskan seorang Muslim untuk menjalankan kehidupan secara islami. Cara tepat untuk merealisasikannya adalah ketika dipayungi hukum dan undang-undang. Dan partai merupakan bentuk yang bias mengakomodasi kepentingan ini. Ketiga, pekerjaan politik merupakan bagian yang takterpisah kan dari pemahaman keberagamaan Islam. Seorang Muslim yang benar adalah ketika pengetahuan agama digunakan untuk kehidupan dunianya. Keempat, realitas demokrasi yang tertuang dalam undang-undang yang berdiri atas dasar 'hak mayoritas dan mengakui minoritas.

Dari beberapa argumentasi tersebut, agaknya sangat rasional untuk menjadikan politik yang berbentuk partai sebagai bagian dari instrument keberagamaan. Politik dijadikan alat untuk merealisasikan kepentingan dan kemauan agama. Maka menjadi kelaziman bagi seorang Muslim untuk mengagamakan politik, dalam arti menjadikan politik sebagai kuda dalam mewujudkan ajaran agama, bukan justru sebaliknya, menjadikan politik sebagai agama yang segalanya di politisasi sesuai selera, termasuk dogma agama. Jika itu yang terjadi, maka akhirnya kita hanya menyaksikan drama politik 'iblis' yang berjubah agamawan atau agamawan yang berhati iblis. ***Wallahu a'lam***

Membaca Konstruksi Fatwa Ibadah Corona

Ketika wabah ini dinyatakan pandemik, para ulama telah menyatakan sikap keagamaan yang terangkum dalam banyak fatwa yang telah diterbitkan. Fatwa-fatwa keagamaan tersebut sangat beragam, baik bersifat institusional seperti Fatwa Persatuan Ulama Islam Dunia (al-Ittihad al-‘Alamy li al-‘Ulama al Muslimin), Dewan Riset Ulama al-Azhar Mesir (Majma’ Buhuts al-Azhar), Majelis Ulama Indonesia (MUI), maupun dari perpektif personal ulama seperti Ustaz Abdul Shomad (UAS), Ustaz Adi Hidayat (UAH) Buya Yahya, Kiai Ahmad Bahaudin (Gus Baha) dan lainnya yang dipandang mampu dan otoritatif dalam memberi pendapat keagamaan tentang hal itu.

Secara umum, jumbuh ulama di atas sepakat, bahwa Virus Corona termasuk *waba’ tha’un* (pandemik global) yang dapat menimbulkan mafsadah, karena dapat mengancam (*dharar*) bagi kehidupan manusia. Status *dharar* tersebut merupakan bahaya besar dan mesti di musnahkan segera atau paling tidak diminimalisir secepatnya. Mafsadah (kerusakan) dan *dharar* (bahaya) tersebut adalah dua entitas yang kontras dengan orientasi umum ajaran Islam. Dari itu, dalam *maqashid syariah* (tujuan inti syariat) menjaga lima dasar kehidupan (*kulliyat khams*) yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, nasab dan harta disebut juga dengan *dharuriyat* yang

berkedudukan primer, yang tidak boleh terancam oleh dharar dan mafsadah guna menjaga kehidupan manusia.

Mengingat Covid 19 adalah wabah menular, maka langkah pencegahannya adalah dengan meniadakan kerumunan, melakukan *physical distancing* yang termasuk di dalamnya adalah menunda pelaksanaan sholat secara berjamaah di Masjid dan meniadakan pelaksanaan sholat Jumat sementara waktu. Peniadaan sementara ritual ibadah tersebut karena masuk kategori menghindari *mafsadah* (penularan) yang jauh lebih baik daripada mengerjakan kebaikan (*mashalih*) seperti ibadah berjamaah.

Namun, argumen tentang mafsadah dan dharar Covid 19 bagi manusia sebagaimana penjelasan di atas, tidak lantas menutup semua interpretasi hukum yang berbeda tentang hal tersebut. Karena, tingkat dharar dan mafsadah-nya bagi setiap orang yang dipandang masih samar di satu sisi, dan teropong keimanan kepada takdir menjadi variable yang mesti ditimbang di sisi yang lain. Selain itu, adanya asumsi 'konspirasi' politik dalam rangka menjauhkan umat dari tempat ibadah, menjadi alibi tersendiri yang juga tak boleh dianggap nihil. Dari perspektif itu semua, menurut Azyumardi Azra, sulit untuk menafikan adanya kelompok *splinter* agama, yaitu kalangan umat beragama yang memiliki cara pandang berbeda dengan arus utama (*mainstream*) (*Republika* 26/3/2020). Maka tidak salah, jika ditengah umat, masih saja ada individu atau kelompok yang melakukan amaliyah yang justru berlawanan dengan imbauan fatwa tadi.

Adanya splinter agama tersebut bukanlah asing dalam kajian turats, karena dalam sejarah fiqih, ada beberapa pendapat yang dianggap *syadz* (aneh) dan bertolak belakang dengan pandangan jumbuh ulama. Fatawa *syadzah* (pendapat yang aneh) adalah pendapat yang tidak mengikuti metodologi fatwa secara benar dan dinyatakan keliru oleh mayoritas ulama. Hal ini seperti yang dicontohkan Yusuf al-Qaradawi dalam bukunya «*al-Fatawa Syazzah*», yaitu pendapat Ibn Hazm al-Zahry tentang najisnya fisik orang musyrik dan halalhnya meminum air yang bercampur dengan air kencing sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab fiqihnya "*al-Muhalla*".

Lantas, bisakah disebut perilaku *splinter* Corona tersebut sebagai pengamal pendapat keagamaan yang syadz? Jawabannya tergantung darimana sisi mana argumen jawaban itu akan dikonstruksikan. Namun, dari perspektif menjaga maslahat yang lebih besar, dan menghindari dari wabah pandemik menular yang bersifat ghaib, maka menggunakan pendekatan *sad adz-dzari'ah* (tindakan pencegahan), rasanya lebih rasional dijadikan teori pendekatan dalam mencari formulasi pandangan hukum keagamaan terhadap Covid 19 ini.

Mengingat, pencegahan serta penanggulangan terhadap wabah Covid 19 ini adalah bagian yang include dan tak terpisahkan dari upaya dan tindakan pengobatan. Apalagi, pandangan keagamaan yang berbentuk fatwa diterbitkan institusi keagamaan yang selama ini memiliki otoritas dan dijadikan rujukan serta bagian dari sumber hukum oleh institusi negara.

Namun memang, persoalan tidak sesederhana itu, karena hukum keagamaan yang bersifat *furu'* sangat rentan terjadi perbedaan pendapat. Karena ruang hukum-nya berada dalam wilayah *ijtihadiah* yang diantara prasyarat penguatan kesimpulan hukumnya adalah waktu (*zaman*), tempat (*amakin*) dan kondisi sosial masyarakat (*ahwal ijtimai'iyah*). Di sini kemudian kaedah hukum berlaku, *al hukm yaduru ma'a al'illat wujudu wa 'adama*, bahwa kesimpulan hukum itu selalu dipengaruhi sebab dan justifikatinsi yang mengitarinya.

Jika kekhawatiran atas penularan wabah Covid 19 menjadi justifikasi peniadaan sementara sholat berjamaah dan Jumat di Masjid dianggap tidak memiliki kekuatan legitimasi, maka bagaimana dengan sikap keagamaan sahabat Nabi 'Amr bin 'Ash yang meminta rakyatnya untuk meninggalkan rumah dan hijrah ke puncak gunung dan lembah sebagai bentuk social distancing menghindari wabah, dan diyakini tidak melaksanakan sholat berjamaah dan Jum'at?

Juga pendapat fuqaha terdahulu yang pernah meniadakan sholat berjamaah di Masjidil Haram ketika terjadi wabah besar di kota Makkah pada tahun 827 Hijriyah, seperti yang diungkapkan oleh al-Hafiz Ibn Hajar (852 H) dalam bukunya *Anba' al-Ghumur*

fi Anba al-‘Umur. Sebenarnya, konstruksi argument fatwa Corona sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan danantisipasi korban lebih besar sudah cukup rasional, baik dari perspektif dalil teks (naql) dan rasionalitas (aql). Namun, berapapun tumpukan dalil itu hanya berguna bagi yang berpikir dalam mencari kebenaran. Sebab kata syekh Ghazali, “Saya tidak takut dengan manusia yang berfikir meskipun salah, karena dia masih berpotensi untuk kembali kepada kebenaran. Namun yang saya takutkan adalah orang yang tidak berfikir meskipun selalu dibimbing, sebab dia hanya seperti jerami dalam tiupan angin.

Corona dan Posisi Keberagamaan Kita

Dunia seolah tersentak oleh dahsyatnya pengaruh epidemi Corona. Kepanikan melanda sebagian manusia sejagad sebagai dampak psikologis dari pandemi Corona yang bias menyasar kepada semua puak dan bangsa. Tak hanya itu, dampak wabah Corona tidak hanya mengguncang dunia kesehatan, namun hampir semua dimensi kehidupan yang berhubungan dengan social kemanusiaan tak bias luput dari pengaruhnya. Persoalan ekonomi, politik dan bahkan pengamalan keagamaan-pun menjadi pembahasan yang ramai dalam pelbagai bincang dan komunikasi di pelbagai media.

Sebenarnya, dalam catatan sejarah, wabah yang mematikan manusia seperti Corona ini bukan hanya kali pertama terjadi. Kejadian wabah pandemic kini bahkan sudah menelan korban ratusanribumanusia. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, epidemiAmwasmelanda negeri Palestina hingga menyebar ke pelbagai kawasan di negeri Syam (Suriah, Yordania dan Lebanon). Kejadian pandemik ini terjadi sekitar tahun 17 & 18 H yang menelan 25-30 ribu jiwa manusia. Bahkan di antara korban wabah ini, beberapa orang sahabat Nabi saw, seperti Muaz bin Jabal dan Ubaidah bin Jarrah.

Yuval Noah Harari, dalam sebuah karyanya 'Homo Deus' mneyebutkan pernah terjadi wabah pandemic yang disebut

Black Death atau Maut Hitam (al-maut al-aswad) yang melanda Eropa dengan korban yang hampir sepertiga penduduk bumi. Penamaan virus 'Maut Hitam' tersebut, umumnya dianggap berasal dari gejala khas dari penyakit ini, yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderita menjadi menghitam karena pendarahan subdermal.

Kejadian pandemik yang menimpa hampir seluruh negara di dunia sekarang ini, kemudian melahirkan banyak asumsi. Pelbagai asumsi tersebut berangkat dari realitas dimana interpretasi itu memungkinkan untuk ditelisik kebenaran nalar logisnya. Dari perspektif politik, wabah Corona dicurigai sebagai bagian dari perebutan hegemoni politik dunia saat ini. Blok China dan Amerika Serikat yang senantiasa menjadi kawan seteru dalam banyak momen politik dunia. Bias dari itu, dari perspektif ekonomi melahirkan asumsi bahwa wabah Corona hanyalah kiriman Amerika, sebagai taktik 'perang dagang' negara adidaya tersebut untuk merontokkan kekuatan ekonomi China yang sedang menggurita dan menguasai banyak negara.

Lebih jauh dari itu, isu wabah Corona ini diasumsikan sebagai bagian dari perang ideologi, dimana umat Islam selalu menjadi objek common enemy bagi umat lain, yang bertujuan menghancurkan aqidah umat, sebagaimana yang juga terjadi dalam dunia ekonomi dan politik. Virus Corona dijadikan alibi sekaligus dianggap propaganda untuk menjauhkan umat dari rumah ibadahnya, terbukti dengan ditutupnya kegiatan Umroh ke tanah suci, serta timbulnya fatwa untuk menghentikan sementara sholat berjamaah di Masjid dan ibadah sholat Jum'at.

Lahirnya fatwa sebagai konsekuensi logis pengamalan keagamaan akibat Corona, tak pelak memunculkan pelbagai argumentasi dari dalil-dalil keagamaan sebagai sikap tunduk kepada nilai dan ajaran (ta'alim) agama. Bahkan semenjak awal, para ulama telah menyumbangkan banyak karya terkait wabah yang mematikan manusia tersebut. al-Hafiz Abi Bakr bin Abi al-Dun-ya (281 H) menulis karyanya *Kitab al-Thawa'in*, Tajuddin Abd al-Wahhab al-Subki (771 H) menulis buku *Juz, u fi al-Tha'un*, Syihab al-Din Ahmad bin Yahya bin Abi Hajlah al-Tilmisany (776 H) menulis *al-Thib al-*

Masnun fi Daf'i al-Tha'un, hingga Ibn Hajar al-'Asqalany (773-825 H) menulis kitab *Bazl al-Ma'un fi Fadhl al-Tha'un*, sebuah karya yang beliau tulis karna kematian tiga anaknya akibat wabah.

Semua karya di atas, adalah respon ulama terkait wabah pandemik yang mematikan manusia. Karya-karya monumental itu membuktikan bahwa semenjak awal, para ulama sudah memberi kontribusi terhadap problematika epidemi yang membawa *mafsadah* bagi kemanusiaan. Sikap responsif keagamaan para ulama itu tentu menjadi niscaya, selain sebagai tanggung jawab keilmuan, juga sejatinya, sebagai bentuk realisasi faham agama yang tujuan (*maqasid*) intinya adalah menyelamatkan kehidupan manusia.

Hari ini, pandemik Corona merupakan 'musuh' kemanusiaan yang diyakini menyerang nyawa secara senyap dan cepat. Langkahantisipasi mesti segera dilakukan agar tidak memakan korban dalam jumlah yang banyak. Dari itu, langkah preventif dalam pencegahan pandemik Corona menjadi bagian dari *dar'ul-mafasid* (menolak bahaya) yang hukumnya menjadi 'azimah (ketetapan) dalam rangka menjaga keselamatan nyawa manusia.

Semua upaya pencegahan (wiyayah) dalam memutus rantai penyebaran virus Corona, seperti pelarangan kerumunan masa, termasuk peniadaan sholat berjama'ah, sholat Jum'at di Masjid dan pekasanaan Umroh dan Haji menjadi bagian yang tak terkecualikan dari 'azimah pelarangan itu. Karena, pelaksanaan semua ibadah itu secara berjamaah di Masjid adalah tindakan jalb al-masalih (mengutamakan kebaikan) yang tidak boleh 'dianggap' lebih penting dari menjaga keselamatan nyawa manusia. Bahkan, acapkali sesuatu yang dilarang menjadi boleh, disebabkan adanya kemungkinan munculnya keburukan yang lebih besar (*qad yubah al-mamnu' litawaqu'i ma huwa a'zam minhu*).

Fatwa keagamaan perihal Corona yang telah dikeluarkan oleh banyak Institusi keagamaan seperti Majelis Ulama al-Azhar Mesir, Persatuan Ulama Islam Dunia serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberi gambaran bahwa, berdiam dirumah dengan melakukan social distanscing lebih baik ketimbang pelaksanaan

ritual ibadah secara berjamaah di ruang publik. Karena pengutamaan syi'ar tidak boleh mengancam keselamatan hidup orang banyak.

Sikap keagamaan Islam yang tersimpulkan dalam ragam fatwa para ulama tentang Corona tersebut menunjukkan bahwa syariat senantiasa selaras dengan prinsip kemanusiaan. Bahkan sesuai dengan namanya, Islam berarti keselamatan yang sasaran utamanya adalah umat manusia. Namun na'asnya, acapkali terjadi, fatwa keagamaan dan ajaran agama Islam yang telah memanusiaikan manusia itu dipandang justru sebaliknya. Bahkan, labelisasi kekejaman, kertebelakangan dan anti kemanusiaan masih saja menjadi dogma yang seolah tidak boleh terpisah dari ajaran Islam. Hal ini terjadi karena--bisa jadi--penyababnya adalah adanya *gap* yang menganga antara pemeluk agama dengan ajaran agama (*din*), sikap beragama (*tadayyun*) dan Ilmu tentang agama (*ilm al-din*). Lantas dimanakah posisi keberagamaan kita? **Wallahu a'alm**

Apa Setelah Isra' Mi'raj?

Barangkali, bagi komunitas muslim sejagad, khususnya muslim nusantara, suatu yang tidak terlewatkan dalam setiap bulan Rajab adalah peringatan momen Isra' Mi'raj. Peristiwa besar yang direkam oleh kitab suci al- Qur'an itu seolah telah berakulturasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan 'ritualitas' keberagamaan muslim Indonesia. Sehingga, riuh bulan Rajab selalu sejoli dengan momentum perayaan Isra' Mi'raj yang diyakini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Walaupun, tidak semua pendapat menyatakan peristiwa Isra dan Mi'raj-nya Rasulullah Muhammad saw itu jatuh pada waktu tersebut, karena Ibn Ishaq al-Harbiy berpendapat bahwa Isra' dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rabi al-Akhir, setahun sebelum Hijrahnya Rasulullah saw ke Madinah.

Ada banyak varian persepsi tentang kapan tepatnya kejadian peristiwa mujizat Rasul yang maha dahsyat itu, apakah pada tahun ke sepuluh ke-nabian ataukah sesudahnya? Menurut riwayat Ibnu Sa'ad di dalam *Thabaqat*-nya, peristiwa ini terjadi delapan belas bulan sebelum Hijrah. Banyaknya pendapat tentang kapan tahun kejadian Isra' Mi'raj ini disebabkan oleh ragam pandangan tentang waktu meninggalnya istri Rasulullah pertama, Siti Khadijah. Ada yang menyatakan, meninggalnya Khadijah dua tahun, tiga tahun atau empat tahun sebelum Hijrah ke Madinah. Sedangkan menurut Abu Bakr Muhammad bin Ali bin al-Qasim al-Zahabiy, peristiwa Isra Miraj terjadi delapan belas bulan setelah masa kenabian.

Lain lagi menurut seorang ulama hadist abad ke tujuh, Abu al-khitab Umar bin Dahyan, dalam kitabnya '*Ada' Ma Wajaba Fi Bayan Wadli al-Wadldla'ain Fi Syahri Rajab*' mengatakan bahwa terjadinya peristiwa Isra' pada Rajab adalah pendustaan publik. Pendapat ini diamini oleh Ibn Hajar 'Asqalany, seorang ulama yang menulis *syarh* (penjelasan) *Shahih al-Bukhari*. Menurut al-Qaradhawi, tidak ada satu hadist sahih-pun yang menjelaskan bahwa Isra' Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Pendapat ini hanya masyhur dikalangan umat, yang dinisbatkan kepada Imam Nawawi dalam fatwanya.

Apapun pendapat tentang tepatnya waktu kejadian Isra' Mi'raj, yang jelas, bahwa perjalanan Rasulullah dari Masjid al-Haram (Saudi Arabia) ke Bait al-Maqdis (Palestina) pada malam hari (*asra*) dan kemudian naik ke langit menuju Sidratul Muntaha (*mi'raj*) terjadi setelah meninggalnya Siti Khadijah dan setelah penitahan kenabian oleh Allah kepada Rasulullah (*bi'tsah*).

Perbincangan dalam perbedaan perspektif tentang kapan tepat waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, menunjukkan akan kayanya argumentasi sejarah tentang kejadian peristiwa maha agung itu. Juga, mengindikasikan bahwa kejadian dalam sejarah tidak sangat memprioritaskan pada tepat waktu kejadiannya, namun yang lebih penting adalah, apa hikmah dan pelajaran yang mampu dijadikan ketauladanan dalam sikap perilaku keseharian. Inilah agaknya rahasia besar, mengapa kitab suci al-Qur'an tidak menyebut secara jelas waktu tepat kejadiannya berbagai peristiwa yang dikisahkan dalam al-Qur'an, khususnya peristiwa Isra' Mi'raj.

Tersembunyi waktu tepat kejadian beragam peristiwa itu, khususnya Isra' Mi'raj, merupakan *ibrah*, bahwa urgensi (*awlawiyat*) peristiwa ini bukan pada kapan waktu kejadiannya, yang kemudian cenderung diperingati dan dirayakan secara seremonial. Karena faktanya, seremonialisasi peristiwa keagamaan cenderung mengarah kepada legenda dan cerita tanpa mampu mentranspormasikan pesan profetik kejadian tersebut ke ranah realitas kehidupan, baik individu maupun kehidupan kolektif.

Seremonialisasi berbagai peristiwa sejarah keagamaan, khususnya Isra' Mi'raj, akhirnya hanya sebatas ritual budaya yang seolah terjebak oleh kungkungan cerita waktu tepat kejadian suatu peristiwa itu semata. Akibatnya, penterjemahan peristiwa sejarah tersebut terjebak dalam rutinitas yang tidak jarang lari dari maksud dan tujuan sebenarnya mengapa peristiwa itu diciptakan dan dicatat oleh Allah di dalam kitab suci-Nya.

Penterjemahan peristiwa Isra' Mi'raj semacam itu, akhirnya juga terperangkap dalam pola keberagamaan yang formalistik, yang cenderung abai terhadap substansi dan orientasi ajaran agama itu sendiri. Sehingga seolah-olah, bulan Rajab hanya sebatas ruang pengulangan cerita tentang apa yang dialami dan ditemukan oleh Rasulullah dalam perjalanan mu'jizat besarnya itu. Jeratan formalisme keberagamaan inilah kemudian menjadi anomalik dan bahkan simalakama, yang membuat kualitas beragama umat tidak pernah terukur dengan baik. Bahkan, formalisme keberagamaan cenderung menjadi senjata yang memangsa umatnya sendiri.

Dari itu sangatlah relevan, jika dipertanyakan, sejauhmanakan kualitas keberagamaan umat dengan rutinnnya perayaan hari besar keagamaan itu? adakah peringatan dan perayaan hari besar tersebut memberi kontribusi terhadap pemahaman umat terhadap ajaran agamanya, sehingga mampu direalisasikan dalam semua lini kehidupan? Atau, perayaan Isra' Mi'raj telah terperangkap dalam kubangan ritual kapitalisme, yang cenderung menghitung kuantitas perayaan dan biaya perhelatannya. Bahkan, yang sungguh miris, perayaan Isra' mi'raj menjadi panggung selebritas penceramah dengan mengunggulkan gaya "srimulat" dengan menkomedikan cerita sejarah mu'jizat agung Nabi terakhir tersebut.

Disinilah kemudian pertanyaan besar pantas didengungkan, apa setelah Isra' Mi'raj? mengingat peristiwa Isra' mi'raj selalu *up to date* untuk diterjemahkan ke dalam konteks realitas keummatan. Sejauh manakah setiap individu muslim mampu mengartikulasikan ajaran yang terkandung dalam peristiwa Isra' Mi'raj tersebut? Sudahkah para eksekutor negara, wakil rakyat, kaum intelektual, ekonom, tenaga pendidik dan profesional dan rakyat sekalipun, menjadikan

kandungan hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai standar evaluasi keberagamaan, baik personal maupun secara kolektif?

Segala pertanyaan tadi terasa sangat serius, mengingat, jebakan formalisme perayaan hari besar keagamaan Islam, khususnya Isra' Mi'raj, tidak akan mengantarkan umat kepada izzahnya sesuai cita sejarah. Dengan demikian, semua peristiwa agung itu hanya sebatas cerita rutin yang miskin misi, menguras energi dan krisis orientasi. Jika itu yang terjadi, maka perayaan tahun berikutnya hanya pesta umat di atas nisan kuburan kemajuan peradaban mereka sendiri. Na'uzubillah. ***Wallahu'allam***

Pancasila di Pesantren Kami

Bersyukur bisamelanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren. Ucapan kalimat ini betul-betul saya rasakan. Meskipun banyak persepsi tentang Pesantren itu minus, tidak modern, ketinggalan, serta tidak punya masa depan, namun secara nyata, Pesantren sudah banyak sekali member kontribusi kepada ummat dan negara. Pesantren tidak hanya memberi pandangan tentang bagaimana kehidupan itu dihadapi dan dijalankan, namun juga member bekal pengetahuan tentang persiapan menuju rumah abadi yang pasti, yaitu kematian.

Namun, di titik ini terjadi mis-interpretasi dan bahkan sengaja di *blow-up* untuk kepentingan-kepentingan tersembunyi yang narasinya cukup elok, namun berisi candu yang meninabobokkan. Masuk sekolah agama, biar bias baca doa, ngurus surau, mengurus jenazah dengan mengharap amplop dari mengisi haflah. Agama, hanya pengisi ruang-ruang sunyi keisnsyafan, penuh mantra pengusir hantu dan syetan serta hanya dijadikan medium bertemu Tuhan. Agama nyaris haram untuk hadir di gedung pemerintahan, pasar dan tempat keramaian. Asumsinya, jika agama bertemu dengan sederetan makhluk ini, maka akan menggeruskan kesucian agama serta mencederai ajaran-ajaran moralnya.

Semua asumsi tersebut kemudian ditopang oleh dalil-dalil yang menguatkan persepsi itu. Hadits tentang dunia hanya penjara untuk orang beriman dan surge bagi orang kafir dieksploitasi

penafsirannya dengan kesimpulan, biarlah dunia diurus oleh “mereka”, dan kepala “kita” cukup dibalutkan lilitan sorban sambil tangan bergelang tasbih. Jemari menari di atas butiran-butiran tasbih seraya melafalkan kalimat-kalimat takbir dalam semedi. Dan hanya itu ruang dan profesi kita. Untuk negara, kita cuma punya tempat di panggung doa

Segala persepsi tadi perlahan sudah berubah. Semenjak awal menjadi santri di Pondok Syekh Maulana Qori (SMQ), kami sudah disodori pemahaman tentang kehidupan bernegara. Semenjak masuk, kami diharuskan mengikutipenataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Mengikuti penataran ini, penuh antusias, mengingat dapat bersua dengan para tokoh setempat sebagai Pemateri, juga dapat snack gratisan serta piagam penghargaan sebagai peserta. Bahkan piagam itu berderet ditempel di dinding rumah, karena telah mengikuti beberpaa kali kegiatan ini.

Semenjak ideologi Pancasila disahkan oleh MPR 21 Maret 1978 dengan nama Pedoman Peenghayatan dan pengamalan Pancasila (P4), seingat saya, semenjak menjadi santri, saya selalu terlibat dalam perhelatan ‘ritual’ negara seperti ini. Dan juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan hari besar kebangasaan, seperti peringatan 17 Agustus. Bahkan menjadi peserta dalam berbagai lomba agustusan yang diselenggarakan oleh banyak elemen, baik pemerintah, ormas maupun peguyuban masyarakat lainnya. Terlebih Ketika sedang berada di area pondok, selain dapat keringanan untuk belajar di kelas, juga dapat fasilitas kaos seragam yang gratis dari pondok.

Walau demikian, hafalan Al-Ajurrumiyah tetap selalu menjadi target dalam berlajar. Kitab yang sering disebut dengan Jurumiyah ini merupakan modal awal dalam penguasaan gramatika bahasa Arab di pondok SMQ Merangin Jambi. Kitab yang ditulis abad ke 7 Hijriyah oleh Abu Abdillah Sidi Muhmmad bin Daud al-Shanhaji seorang ulama asal Maroko menjadi pegangan dalam memamahi dan menguliti kitab-kitab lain. Banyak sahabat kami yang hafal kitab ini termasuk kitab *Matan al-Bina’* yang tidak dikenal penulisnya dan kemudian ditashihkan oleh Syeikh Ahmad Bin Umar al-Hazimy

sebagai dasar pendalaman ilmu *Shorf*.

Materi P4 tentang Pancasila, serta hafalan Jurumiyah telah menjadi bagian dari materi tempaan santri di Pondok kami. Dengan Pancasila kami mencintai negara dan dengan hafalan Juruimiyah, kami dapat mendalami agama. Bagi kami para santri, keduanya tidak untuk dipertentangkan, namun untuk dirajut dalam menyulam dasar bernegara yang sekaligus menjalankan perintah agama. Makanya, jangan tanyakan sikap nasionalisme kami, karena menjalani agama inklud di dalamnya melaksanakan Pancasila. Tapi anehnya, ada yang selau teriak mengakuPancasilais sejati, namun diam-diam ingin menguburkan dan mengaburkan Pancasila dari bumi tercintaini. Kata pepatah Arab, *asma' ja'ja'ahwa la ara thihna*, gemuruhnya luar biasa, tapibu ktinya nihil. **Wallahua'lam**

Qurban Dalam Nestapa Corona

Memasuki Idul Adha tahun ini terasa agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena gemuruh Takbir ‘lebaran haji’ sekarang ini dihiasi sedikit nestapa oleh panorama Corona. Euforia kegembiraan berqurban sedikit terasa peri, karena bencana Covid 19 yang entah sampai kapan akan berakhir. Hari-hari *tasyriq* yang diharamkan berpuasa itu, pun menyimpan duka, mengingat Corona berubah status menjadi bencana.

Meskipun dalam kondisi masih di hantui Corona, sentuhan keimanan menyambut hari raya Qurban (*Idul Adha*) tetap tak boleh pupus dari sensitifitas keberagamaan. Tamu agung yang juga dinamakan *yaum al-nahr* itu, dalam beberapa rangkain *syi’ar* utamanya adalah ibadah Qurban. Dalam bahasa jurisprudensi (*fiqh*) Islam, ibadah Qurban dinamakan *udlhiyah* yang berarti menyembelih hewan tertentu dengan niat dan sesuai waktu yang telah ditentukan, atau menyembelih binatang pada hari *taysriq* dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. Seruan syariat untuk berqurban tersebut dimulai pada tahun kedua Hijriyah yang seumur dengan perintah zakat dan perintah sholat dua hari raya. Hal ini sesuai dengan perintah Allah swt dalam firman-Nya “*maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berqurbanlah*” (QS; 108:2).

Secara historis, perintah Qurban merupakan lanjutan dari peristiwa bersejarah pengorbanan nabi Ibrahim ketika diperintahkan Allah swt menyembelih anaknya nabi Ismail. Perintah ‘menyembelih’

yang sangat berat dari perspektif naluri kemanusiaan tersebut, kemudian menjadi *i'tibar* yang sangat berharga bagi perjalanan kehidupan peradaban manusia. Kisah totalitas nabi Ibrahim as dalam merealisasikan instruksi Tuhan-nya itu, telah mengajarkan banyak hal, bukan semata dalam koridor menambah keimanan kepada Allah (*habl min Allah*), namun juga dari perspektif merajut komunikasi antar sesama manusia (*habl min alnas*).

Secara simbolik, perintah menyembelih hewan Qurban berada dalam wilayah *ta'abbudi* (ruang ibadah) yang secara harfiah harus mengikuti aturan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh baginda Rasul saw. Makanya, hewan-hewan Qurban hanya terbatas pada jenis kambing atau sapi dan sejenisnya. Akan tetapi, secara maknawi, penyembelihan hewan Qurban memiliki nuansa spritualitas yang sanggatinggi, yaitu totalitas pengabdian dan kepatuhan kepada titah Yang Maha Kuasa. Dalam ruang ini, ruang akal sedikit dieliminir untuk bertanya dahulu terhadap kegunaan melaksanakan perintah itu. Karena, sudah pasti tidak logis dan mustahil, jika perintah Tuhan tersebut tidak member manfaat serta hikmah kebaikan bagi kehidupan manusia.

Secara tegas, penyembelihan hewan Qurban sebagai bentuk simbolik penyerahan dan kepatuhan, bukan berupa “sogokan” untuk kepentingan Allah swt, namun lebih kepada *syi'ar* yang diekspresikan seorang hamba sebagai luapan syukur atas segala anugerah-Nya. Selanjutnya, secara substantif, sembelihan itu menjadi neraca ketaqwaan, karena sifat taqwa itulah orientasi utama yang diinginkan oleh Allah swt kepada hamba-Nya. Hal ini secara terang, dijelaskan oleh Allah swt “*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketaqwaan dari kamulah yang dapat mencapainya*”(QS:22,37).

Elaborasi taqwa dalam Qurban tersebut tercermin dari keharusan untuk mendistribusikan daging-daging hewan itu kepada kaum *fuqara*, yang secara social ekonomi belum mencukupi kebutuhan untuk hidup selayaknya. Bahkan, Imam Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Fath al-Wahhab 'ala Syarh Manhaj al-Thullab* menyebutkan, pembagian daging hewan itu lebih utama (*afdhal*)

diberikan secara keseluruhan kepada mereka (*fuqara*) dengan hanya menyisakan sedikit, sebatas untuk mencicipinya. Pendapat ini berargumentasi dari sabda Rasul saw yang menyebutkan, bahwa baginda nabi hanya mencicipi daging hati dari hewan Qurbannya. Jika demikian, ketaqwaan yang melebur dalam empati kemanusiaan itulah pesan esensial yang ingin disampaikan dalam ritualitas berqurban.

Memang, dalam semua ibadah Islam, pesan dan spirit kemanusiaan tidak pernah terlewatkan. Karena pada prinsipnya, ketundukan kepada Tuhan mesti selaras dengan keserasian hubungan dengan sesama manusia, bahkan kepada semua makhluk-Nya. Dari itulah, fungsi Rasul saw diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta (*rahmatan li al-'alamin*).

Orientasi taqwa dalam ritualitas Qurban sejatinya tidak menjadi ruang terasing yang seolah cara pendekatan ibadah ini saja yang bias menyelamatkan manusia dari murka Tuhan. Terma taqwa yang ada dalam Qurban sejatinya memiliki nuansa makna yang lebih universal, meliputi ketundukan dan 'ketakutan' akan murka Tuhan terhadap pelbagai penyimpangan, termasuk pada penyimpangan ekologis yang mengakibatkan lahirnya banyak bencana, termasuk musibah wabah Corona.

Persoalan wabah Corona yang berubah status menjadi bencana bagi manusia tersebut menunjukkan, bahwa pemaknaan taqwa masih sangat parsial, yang masih terkungkung dalam ruang '*ibadah mahdhah* semata. Sehingga ranah ekologis dianggap persoalan 'luar' yang tidak memiliki akar teologis. Jadinya, alam yang terbentang luas tersebut dianggap bebas dieksploitasi tanpa memikirkan dampak negatifnya. Padahal, kata *al-ardh* (bumi) yang diungkapkan dalam al-Qur'an memiliki indikasi kuat, bahwa al-Qur'an menjadikan kata *al-ardh* itu sebagai salah satu terma dalam mengungkapkan tentang urgensi lingkungan. Maka, kata *al-ardh* digunakan sebagai konotasi ekosistem, lingkungan hidup, dan habitat. Artinya, domain lingkungan dan ekosistem merupakan persoalan yang tidak bias dipisahkan dari ruang taqwa, sehingga pengelolaannya tidak menimbulkan masalah, apalagi menjadi sumber bencana bagi

manusia.

Jika benar demikian, maka pelaksanaan Qurban dalam kerangka ketaatan untuk mencari status taqwa menjadi setara dengan meminimalisir, bahkan mencegah terjadi bencana. Keduanya wajib menyimpan unsur taqwa, sehingga dapat berbuah amal yang berstatus *qurban* (mendekatkan diri dengan Allah swt). Jika unsur ketaqwaan pupus dalam semua *amaliyah* itu, baik dalam berqurban maupun dalam meminimalisir bencana, maka artinya, semua amal yang berdimensi taqwa tersebut seperti pekerjaan seseorang yang sedang menggantung asap, hanya mendapat lelah dan hanpa faedah. *Nauzubillah!*

Referensi:

Imam Zakaria bin Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Fath al-Wahhab 'ala Syarh Manhaj al-Thullab*, hal: 728

Wahbah al-Zuahyly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juz 3, hal: 596

Penolakan Dakwah UAS

Bermula dari pelatihan bahasa Arab di Pondok Pesantren Hadiqatunnajah, Jurang Mangu Timur, kumpulan penerima beasiswa Universitas al-Azhar Mesir, angkatan tahun 1998 sepakat untuk menamakan *dufah* ini dengan Islah (*Indonesian Student of al-Azhar University*). Penamaan ini setidaknya berangkat dari kenyataan bahwa kondisi negara Indonesia waktu itu sedang mengalami sebuah fase perubahan sejarah dari Orde Baru menuju Reformasi (*Ishlah*), yang ditandai dengan jatuhnya Soeharto dan digantikan oleh BJ Habibe. Berikutnya, penamaan Islah merupakan sebuah idealisme bersama, bahwa generasi penerima beasiswa Universitas yang telah kesohor di dunia itu, nanti akan menjadi penerus *ulamadan umara* untuk mereformasi kondisi suram bangsa saat itu, agar lebih baik di masa menadatang.

Berkisar dua puluh tahun berlalu (1998-2018), wujud dari tabir mimpi masa lalu itu sedikit tersibak. Sebagian besar dari generasi Islah 1998 telah mengabdikan kepada bumi pertiwi dengan beragam profesi yang mereka geluti. Dari Kiyai yang mengelola lembaga keagamaan Islam, wiraswasta, pegiat ekonomi hingga menjadi pengajar di pelbagai Perguruan Tinggi di penjuru tanah air. Namun, diantara seratusan anggota Islah yang seangkatan, Ustad Abdul Somad (UAS) agaknya lebih populer dan bahkan telah menjadi tokoh milik umat, khususnya di republik tercinta ini.

Akhir-kahir ini, UAS menjadi begitu masyhur di lintas media sosial. Selain karena tausiyah dan pengajiannya yang selalu update dan viral, penolakan UAS di pelbagai tempat, seperti di Bali, Hongkong dan PLN, menjadi *hot issue* yang nyaris beririsan dengan kepentingan-kepentingan politik kekuasaan. Dengan pelbagai tuduhan, yang tentunya hanya sekedar justifikasi usang, UAS dianggap anti NKRI, penceramah radikal, bahkan dianggap memiliki afiliasi dengan kelompok teroris ISIS. Ragam tuduhan yang dilakukan oleh sekelompok “preman nasi bungkus”, seperti yang diistilahkan oleh UAS, tentu jauh api dari panggangnya, karena rekam jejak UAS begitu mudah dilacak, bahwa sosok UAS justru kebalikan dari semua asumsi itu. Bahkan, statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu dosen di UIN Susqa Riau, sudah cukup untuk menafikan semua prasangka yang tidak jelas asal usulnya tersebut.

Namun, yang menggelitik dari fenomena ini, adalah mengapa UAS di tolak dan bahkan di persekusi? bukankah UAS dalam afiliasi pemahaman keagamaannya bagian dari *Ahlussunnah Waljama'ah* yang merupakan faham *mainstream* muslim di negeri ini, juga anggota MUI, bahkan justru menjadi anggota ‘struktural’ *Bahtsul Masa'il* yang berada dalam gerbong NU yang notabenenya memiliki pengikut paling banyak di tanah nusantara.

Penolakan UAS, sebagai da'i yang menyampaikan risalah Islam, dalam perspektif kodratnya, tentu sangat absah. Jangankan UAS, posisi para nabi dan Rasul, serta para penyeru kebenaran, dalam catatan sejarah memang selalu berhadapan dengan orang-orang yang mengingkarinya. Tabi'at kebenaran secara fitrah sudah pasti beradapan *vis a vis* dengan kemungkaran yang acapkali berkolaborasi dengan kekuasaan. Hal inilah yang dungkapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, *man abda shafhatahu li al-haqqi halaka*. Seolah sudah menjadi hukum alam, bahwa siapa yang memperjuangkan kebenaran (*al-haq*) maka sudah pasti menemukan aral dengan ancaman kehancuran.

Sikap penolakan dengan asumsi tadi, dalam kacamata kemimanan agaknya bisa maklum. Akan tetapi, disini, penulis ingin

melihat perpesktif lain dalam penolakan terhadap UAS tersebut, setidaknya boleh dirangkum dengan beberapa alasan;

Pertama, munculnya sosok UAS yang viral di pelbagai media sosial tidak bisa dilepaskan dengan realitas kontestasi politik tanah air, terutama semenjak “huru-hara” pilgub DKI Jakarta. Harus diakui, bahwa hikmah besar dalam ‘workshop’ al-Maidah 51, telah melahirkan sensitifitas keagamaan yang sangat menyadarkan pola keberagaman umat. Selama ini, umat masih dininabobokkan oleh pemahaman keislaman yang parsial, diantaranya adalah pemahaman tentang Islam yang tidak boleh bersentuhan dengan politik. Anggapan bahwa agama (Islam) harus menjauh dari realitas politik begitu menggurita, mendarah daging semenjak beberapa kurun.

Namun di saat yang sama memberi peluang besar bagi pihak “*out sider*” untuk menguasai semua akses ruang politik negara untuk menguasai kekayaan umat. Disamping itu, alibi lain yang justru dengan mata telanjang, sepuak tokoh yang menjual gerbong label agamanya, berpeluk mesra untuk berbagi kue dalam kekuasaan. Dari konteks ini, UAS hadir memberi pencerahan, bahkan dengan berani dan lantang sesuai khas bahasa Melayu-nya, memberi kontra opini, bahwa umat harus ‘melek’ politik, mesti menguasai ruang dan akses kekuasaan politik, jika ingin menegakkan kebenaran yang selaras dengan ajaran Islam.

Kedua, sosok UAS yang dengan gaya kesederhanaannya, tidak begitu mudah di”jinak”kan. Justru acapkali menghindar dari rayuan serta godaan pemegang kekuasaan saat ini. Jalan yang terkesan berbeda arah tersebut semakin menambah magnetis umat dalam mendengar serta mengidolakan UAS. Ditambah lagi, secara personal, kedekatan UAS dengan tokoh- tokoh umat yang berada dalam barisan gerbong Aksi 212, yang secara kasat mata, memiliki selera poltik yang berbeda rasa dengan kelompok yang sedang berkuasa.

Ketiga. Tipologi dakwah UAS yang *wasathiyah* (moderat) bisa merangkul semua puak yang selama ini sulit untuk bersua dalam satu titik temu, dengan sikap yang sesuai jargon ‘jadilah da’i sebelum menjadi hakim’ (*du’at qabla qudhat*), seolah berwujud deklarasi

pemersatu umat dalam wadah *ukhuwah*. Dengan melakukan pendekatan (*nata'awanu fi ittafaqna alaihi*), bersinergi dalam kebaikan yang telah disepakati, setidaknya bisa menjadi embrio atas prakarsa arus baru kekuatan umat. Kekuatan ini dari perspektif sosial, ekonomi, politik, jelas bukan remeh temeh, namun laik untuk menjadi 'modal' massa yang dapat memindahkan posisi perifer umat ke tengah gelanggang dinamika politik bernegara.

Tiga hal di atas, setidaknya bagi mazhab Machiavelis dalam politik kekuasaan, jelas menjadi ancaman. Jika jelas demikian, maka sebelum UAS menularkan misinya lebih jauh ke tengah umat, maka pengaruhnya harus diredupkan segera, atau, jika memungkinkan untuk diamputasi. Dan jalan yang lebih realistik adalah dengan cara penolakan. Sebab, jika sudah ada yang menolak, berarti ada hal yang segera diambil langkah demi ketertiban dan bahkan demi alasan keutuhan bernegara bangsa. Inilah justifikasi yang lebih pas, karena kekuatan negara ada dalam otoritasnya, dan otoritas itu ada dalam asumsi dan perspektif orang yang sedang duduk di atas kekuasaan itu. Bukankah, kebenaran otoritas itu seringkali mengalahkan otoritas kebenaran?

Sebagai kawan seangkatan, penulis selalu berharap, semoga UAS tetap menjadi anggota Islah yang *muslih*, seperti idealisme nama angkatan itu dahulu di tabuhkan. Amin. *Wallahu'alam*.

Siuman Cendekiawan (Catatan Pelantikan Pengurus ICMI)

Ketika dihubungi untuk bergabung dalam kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Wilayah Jambi (Orwil) periode 2015-2020, terkenang sejenak semasa kuliah di Universitas al-Azhar Kairo, dimana ketika itu sempat “digableng” dalam suatu acara pengkaderan yang dilaksanakan para ‘senior’ ICMI Orsat Kairo. Saat itu, belum terpikirkan apa kegunaan pelatihan dan gablengan yang penuh idealisme tersebut, karena toh status ketika itu sudah menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi keislaman tertua di dunia. Dengan pikiran ‘lugu’ itu berkesimpulan, bahwa pada diri setiap mahasiswa di kampus dengan label keislaman sudah pasti menyandang status intelektual dan cendekiawan muslim.

Bayang gablengan di bumi nabi Musa dan Yusuf itu, seolah kembali menyeruak, meresh bungkahan idealisme yang sudah seperti “batang terendam”, dan berserakan dalam aliran catatan-catatan sungai cita, yang mengalir mengikuti arus zaman yang takberujung. Kini, penobatan status sebagai cendekiawan kembali menantang, menuntut kecendekiaan itu dirumuskan dalam menyuplai gizi ‘izzah’ umat yang sudah nyaris kehilangan kemuliaannya di mata umat lain. Terlebih lagi saat ini, dimana realitas umat sedang tercerai berai, luluh lantah dibawah cengkraman hegemoni musuh-musuh abadinya.

Fakta realitas umat hari ini, sebenarnya juga tidak jauh berbeda dari zaman dimana ICMI dilahirkan. Dalam kilas sejarah lahirnya, ICMI hadir sebagai demonstrasi identitas sebagai jawaban atas asumsi yang menuduh bahwa umat Islam itu selalu terbelakang, *jumud* dan hanya penonton di gelanggang sendiri. Ibaratnya, hanya mayoritas dalam jumlah, minoritas dalam politik. Dari itu, ICMI mengurai perspektif cendekiawan yang berarti memiliki sikap dan visi intelektual yang mengatasi batas-batas disiplin, yang memiliki komitmen kuat pada kemanusiaan, harkat, nilai-nilai, aspirasi dan hati nurani yang memiliki sikap kritis dan mandiri. Pemaknaan cendekiawan itu kemudian di *ta'rif*-kan dalam ART ICMI, yang secara jelas menyebutkan bahwa cendekiawan muslim itu adalah orang Islam yang peduli terhadap lingkungannya, terus menerus meningkatkan kualitas iman dan taqwa, kemampuan berpikir, menggali, memahami dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan keagamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan untuk diamankan bagi terwujudnya masyarakat madani

Dalam istilah umumnya, cendekiawan itu disamakan juga intelektual (*intellectual*) yang dalam bahasa Arab disebut juga sebagai *mutsaqqaf* yang berarti seorang yang terpelajar (*muta'alim*) yang memiliki banyak wawasan tentang ilmu pengetahuan. Defenisi ini seolah memiliki hubungan yang utuh dengan istilah ulama, tapi entah kenapa dalam penamaannya ada perbedaan. Namun, terlepas dari penamaan itu, istilah *mutsaqqaf* sudah cukup berat untuk disandang, mengingat tuntutan jutaan aspirasi umat sudah antri menunggu jawaban. Pelbagai pertanyaan umat sudah disuguhkan kepada para cendekiawannya untuk dikuliti secara detail. Kegelisahan umat atas kenyataan mereka yang 'terpinggirkan' tersebut menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi para intelektual untuk menyelesaikannya.

Tugas para cendekiawan (*mutsaqqaf*) memang tidak ringan, karena beban problematika umat yang terasa belum beranjak dari masalah klasiknya, yaitu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Masalah klasik dan 'kronis' dalam tubuh umat

ini pernah ditanyakan sekitar seratus tahun silam (1348 H) oleh seorang ulama Melayu asal Borneo Banjar, yaitu Syaikh Muhammad Basyuni Amran yang mengajukan dua pertanyaan besar kepada kepada Syaikh Amir Syakib Arselan dan memohon kepada Syaikh Rasyid Ridha untuk memuat jawabannya di Majalah al-Manar yang terbit di Mesir. Dua pertanyaan besar itu, *pertama*, apa yang menyebabkan umat Islam lemah dan terbelakang (*inhitath*) baik dalam urusan dunia maupun agama secara berbarengan, khususnya umat muslim di Jawa dan Melayu? *Kedua*, mengapa bangsa Eropa, Amerika, Jepang lebih maju dan bisakah umat Islam maju seperti mereka tanpa kehilangan identitas agamanya?

Dua pertanyaan besar yang hampir seabad tersebut terasa masih mengiang diruang kekinian dan kedisinian para cendekiawan muslim, juga masih terasa sangat relevan untuk dieja kembali bait-bait kalimatnya. Kehadiran ICMI merupakan panggilan jiwa dalam mengurai kusut problematika umat yang kronis tersebut. Geliat gerakan ini merupakan ledakan kaum terdidik (*intellectual booming*) yang dengan ragam kefakarannya mencoba berkontribusi kepada bangsa dengan identitas khas muslim yang terdidik dan cendekia.

Atas panggilan nurani kecendikaan itulah, status cendekiawan yang sekaligus muslim tersebut perlu diartikulasikan. Menurut Ibrahim al-Shafei, ada tiga peran besar peran cendekiawan Muslim tersebut. ***Pertama***, menyebarkan wawasan dan nilai-nilai Islam yang utuh serta membangkitkan sensitifitas umat terhadap segala problematika kekinian, juga memberi pencerahan tentang orisinilitas wawasan Islam dan membedakannya dengan produk ‘inpor’. Selanjutnya, seorang cendekiawan bertanggung jawab untuk mengangkat ‘sensitifitas’ umat agar dapat memainkan peran peradabannya, dan tetap dalam kerangka terintegrasinya wawasan keislaman dan politik. ***Kedua***, seorang cendekiawan harus tetap selalu kritis terhadap pelbagai persoalan sosial dan politik sesuai karakteristik kefakarannya, Sikap kritis tersebut sebagai upaya objektif dan konststruktif untuk beradaptasi dengan dinamika perkembangan zaman dan pembaharuan. ***Ketiga***, seorang cendekiawan adalah jubah umat yang membela kemaslahatan mereka. Cendekiawan harus “membumi”, tidak boleh hanya duduk di menara

gading. Tugas berat kecendekiannya terletak dalam komitmennya (*iltizam*) kepada nilai-nilai moral dan keagamaan, sehingga memiliki integritas dihadapan umatnya.

Pelantikan ICMI Orwil Jambi periode ini, agaknya sedikit spesial, setidaknya dalam konteks ke-Jambian dan ke-Indonesiaan. Waktu pelantikan ICMI Orwil Jambi yang tidak begitu jauh dari pelantikan Zola-Fachrori sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, setidaknya menjadi momentum untuk bersinerginya kekuatan kaum intelektual dengan pemangku kekuasaan. Karena, ketika penguasa yang merepentasikan logika ototritas bersatu dengan kaum intelektual yang mewakili otoritas logika, berarti bersatunya antara kekuatan dan kebenaran. Jika dua kekuatan ini akur dan sinergis, maka arah kebijakan penguasa akan lebih terukur dan terarah sesuai prioritas kepentingan umatnya.

Dalam perspektif ke-Indonesiaan, ICMI lahir dari takdir sejarah umat yang berada dalam posisi 'marginal'. Kondisi umat Islam hari ini, tanpanya tidak begitu berjarak dengan keadaan masa lalunya. Meskipun euforia kebebasan politik terbuka dan memberi peluang kepada umat untuk memimpin, namun fakta realitasnya, umat Islam masih terseok dan bahkan tertatih dalam mencari peluang untuk memujudkan negeri ini sebagaimana representasi mayoritas. Umat Islam masih tersudutkan oleh pelbagai opini tentang terorisme, radikalisme dan ekstrimisme. Semua prilaku minus tersebut seolah selalu bergandengan dengan identitas Islam. Padahal, secara normatif, agama Islam semenjak awal sudah mengajarkan perilaku moderat dalam segala aspek kehidupan.

Dengan pelantikan kepengurusan ICMI Orwil Jambi masa ini, sepertinya kaum cendekia Jambi sudah siuman setelah sekian lama vakum dalam ketidakjelasan. Semoga pelantikan periode ini adalah sebuah keinsyafan berjamaah atas absennya kaum intelektual dalam mengayomi umatnya. Jangan sampai berkumpulnya para cendekiawan Jambi hanya sebuah parade selebrasi. Jika begitu, maka tepatlah kata petuah adat, "*banyak guru doa dak selesai, banyak tukang rumah dak jadi*". Semoga tidak! Berjayalah ICMI.

Wallahu'alam

BIOGRAFI PENULIS

H. Hermanto Harun, Lc, MHI, Ph.D lahir 10-April 1976 di Desa Batu Penyabung, Bathin VIII, Kab Sarolangun, Jambi. Dia adalah dosen Pascasarjana UIN Sulthan Thoha Saefuudin Jambi. Penulis juga mengajar di Pascasarjana Universitas Jambi pada tahun 2015-2016, AKBID JMS An-Nisa Jambi 2014-2019, College Darul Hikmah, Selangor Malaysia 2009-2010, STIT Darul Ulum Sarolangun 2006-2007.

Pendidikan yang ditempuh mulai dari SD 198/VI Batu Penyabung (1988), Pondok Pesantren Shaikh Maulana Qori (SLTP), Merangin Bangko 1991, Pondok Modern Darul Muttaqien (SLTA) Tangerang-Banten 1996, Pelatihan Bahasa Arab, Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam RI, Jakarta 1998, Sarjana (Lc) Universitas al-Azhar Kairo-Mesir 2002, Al-Ma'had al-Ály li al-Dirasat al-Islamiyah (S2) Zamalek Kairo-Mesir 2003, English Language School, Mahesa Institut Kediri, Jawa Timur 2004, Magister (MHI) UIN Sunan Ampel Surabaya 2005, Doktor (Ph.D) Universiti Kebangsaan Malaysia 2012. Penulis juga banyak mendapat berbagai macam penghargaan dalam bidang akademik diantaranya adalah: Beasiswa Islamic Devlopment Bank, 1999, Beasiswa Universitas al-Azhar, Kairo, 1998-2002, Wisudawan Terbaik Pascasarjana IAIN (UIN) Sunan Ampel Surabaya 2005, Beasiswa Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2005, Penerima Beasiswa S3 Pemerinta Kabupaten Sarolangun Jambi 2008.

Berbagai macam pengalaman kerja yang diemban baik yang struktural maupun yang non struktural diantaranya adalah: Alumni Trainning of Trainers LEMHANNAS RI 2020, Ketua Jaringan Alumni Timur Tengah (JATTI) Provinsi Jambi 2020-2025, Ketua Organisasi Internasional Alumni Al Azhar (OIAA) Cab Jambi 2017-2019, Anggota ICMI Prov Jambi 2018, Sekretaris MUI Prov Jambi 2016-2021, Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Prov Jambi 2015-2018, Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi 2016-2018, Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN STS Jambi 2020- sekarang. Pernah menjadi Tim Seleksi (Timsel) Komisioner Komite Penyiaran Indoensia Daerah Jambi (KPID), Wakil Dekan Bidang Akademik Fak Syariah UIN STS 2017-2019, Wakil Dekan Bidang Mahasiswa dan Kerjasama Fak Syariah UIN STS 2015-2017, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN STS JAmbi 2012-2015, Kepala Pusat Pengembangan dan Kerjasama UIN STS Jambi 2012-2013, Staff Ahli Pusat Penelitian UIN STS Jambi 2012.

Sewaktu masih mahasiswa di Kairo, pernah menjadi Sekretaris Forum Studi Sumatera Mesir (FSSM) 2001-2002, Ketua Keluarga Mahasiswa Jambi (KMJ) 2000-2001, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indoensia (PPMI) Mesir 2002-2003. Disamping mengabdikan di Kampus UIN Jambi, juga mendirikan dan sebagai Ketua Yayasan sekaligus menjadi pengajar di Pondok Pesantren Modern al-Kinanah Kota Jambi.

Karya Ilmiah:

1. Mengagamakan Politik (Sulthan Thaha Press).
2. Menelisik Asa Politik HBA (Ombak Jogjakarta).
3. Pembiayaan Ilmu, Membena Jati Diri Ketamadunan (Dar el Hikmah College Selangor, Malaysia).
4. Serta menulis artikel di Journal Kontekstualita, Akademis, Media Akademik, Arrisalah dll.
5. Penulis opini di berbagai media: Jambi Ekpres, Jambi Independen, Republika, Era Muslim dll.

6. Mengikuti (Partisipan & Narasumber di berbagai seminar Nasional dan Internasional.

Hubungi Penulis:

- Alamat Kantor : Rektorat UIN STS Jambi, Ruang Satuan Pengawasan Internal (SPI) . Kampus Mendalo. Sei Duren, Muaro Jambi.
- Alamat Rumah : Jl Pattimura, RT 35, Lrg KS, Kenali Besar, Alam Barajo, Kota Jambi
- E-mail : herman76@uinjambi.ac.id
- Website :<http://www.herman1976.wordpress.com>
- Mobile : 081366071814

